

**GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA BAPAK
SUMARIYADI
(STUDI TATA KELOLA SAMPAH DI DESA
LEREP TAHUN
2007-2025)**

SKRIPSI
Program Sarjana (S-1) Jurusan Ilmu Politik



Oleh:
Amanda Rizki Kurniasari
2106016122

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 4 Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi/ Proposal Skripsi

Kepda.

Yth. Dekan FISIP

UIN Walisongo Semarang di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi/ skripsi saudara/i:

Nama : Amanda Rizki Kurniasari

NIM 2106016122

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Gaya Kepemimpinan Kepala
Desa Bapak Sumariyadi (Studi
Tata Kelola Sampah Di Desa
Lerep Tahun 2007-2025)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Februari 2025



M Nuqlir Bariklana, M.Si
NIP. 198505022019031007

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

SKRIPSI

GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA BAPAK SUMARIYADI (STUDI TATA KELOLA SAMPAH DI DESA LEREP TAHUN 2007-2025)

Disusun oleh :

Amanda Rizki Kurniasari

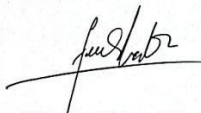
2106016122

Telah dipertahankan di depan majelis penguji sidang skripsi pada tanggal 14
Maret 2025 dan telah dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji


M. Nuglir Bariklana, M.Si
NIP. 198305022019031007

Penguji 1


Muhammad Mahsun, M.A
NIP. 198511182016011901

Sekretaris


Masrohatun, M.Si
NIP. 198806212018012001

Pembimbing


M. Nuglir Bariklana, M.Si
NIP. 198505022019031007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya Amanda Rizki Kurniasari menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Bapak Sumariyadi (Studi Tata Kelola Sampah Di Desa Lerep Tahun 2007-2025)” adalah hasil karya penulisan sendiri dan tidak terdapat karya pihak lain yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ataupun lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka. Apabila ditemukan unsur plagiarism di dalam tulisan skripsi ini, saya siap bertanggung jawab dan siap menerima konsekuensi yang ada. Terima kasih.

Semarang, 25 Februari 2024
Penulis,



Amanda Rizki Kurniasari
NIM 2106016122

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Bapak Sumariyadi (Studi Tata Kelola Sampah di Desa Lerep Tahun 200702025)”**. Sholawat serta salam semoga semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti.

Penyelesaian skripsi ini merupakan kebanggaan bagi penulis, sebagai hasil akhir dari proses pembelajaran selama perkuliahan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan kelulusan program Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dengan penuh rasa Syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Plt. Rektor UIN Walisongo Semarang atas kesempatan untuk menyelesaikan studi.

2. Prof. Dr. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan izin dalam pelaksanaan penulisan skripsi.
3. Jajaran Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag, Dr. Moh Khasan, M.Ag, Dr. Moch Parmudi M.Si.
4. Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si selaku Kepala Jurusan Ilmu Politik sekaligus dosen pembimbing penulis. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu dan ilmunya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Moh. Yamin Darsyah M.Si selaku Wali Dosen atas motivasi sejak awal perkuliahan.
6. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang atas ilmu dan bimbingan.

7. Seluruh informan penelitian yaitu Bapak Sumariyadi, S.T, Kadus seluruh Desa Lerep, Bapak Sudiro, S.Pd, Bapak Sri Haryanto, Ibu Susilo, Bapak Richard, Bapak Suryadi yang telah memberikan informasi dan data kepada penulis.
8. Ayahanda Jumali dan Ibunda Suwarni, sebagai sumber kekuatan penulis. Terima kasih atas pengorbanan, doa, dan kasih sayang yang tak ternilai. Kakak Tia Rizki Andini yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi.
9. Tidak kalah penting, calon suami tercinta Mas Chandra Dewanata yang telah menemani perjalanan menempuh pendidikan yang panjang tanpa rasa mengeluh.
10. Teman-teman penulis yang selalu memberikan bantuan dan, dukungan, yaitu Sofi, Geby, Maulina, Yasinta, Alfina, Teman-teman HMJ Ilmu Politik dan Teman-teman Ilpol D.

Penulis mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan segala Syukur Alhamdulillahirabbil'alamin.

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua tercinta Ibu Suwarni dan Bapak Jumali yang telah membesarkan, merawat, mendidik saya dengan sabar, doa tiada henti dari orang tua, dukungan, pengorbanan, serta kasih sayang. Kalian adalah sumber inspirasi dan motivasi dalam setiap langkah yang saya ambil.

Tanpa doa dan dukungan kalian, saya tidak akan mampu menyelesaikan perjalanan ini.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan),
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”

Dan hanya kepada Tuhan mu lah engkau berharap”
(QS. Al-Insyirah, 6-8)

“Keberhasilan bukan milik orang pintar, keberhasilan
milik mereka yang terus berusaha”

B.J. Habibie

ABSTRAK

Permasalahan pengelolaan sampah yang semakin mendesak di Indonesia, terutama di tingkat desa, kerana kesadaran masyarakat dan partisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan masih rendah. Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang menjadi contoh kasus yang menarik untuk diteliti, mengingat tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah dan perlunya intervensi kepemimpinan yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan: 1) bagaimana gaya kepemimpinan Kepala Desa Lerep Bapak Sumariyadi dalam pengelolaan sampah? 2) bagaimana dampak kepemimpinan dalam pengelolaan sampah di Desa Lerep?

Teori yang penulis gunakan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian di atas adalah teori Kepemimpinan oleh Ramlan Surbakti. Dalam teori Ramlan Surbakti untuk menganalisis kepemimpinan ada tiga kategorisasi kepemimpinan yaitu proses kepemimpinan dan karakter kepemimpinan, hasil proses kepemimpinan, dan sumber kekuasaan. Konsep ini digunakan untuk meneliti gaya kepemimpinan yang digunakan pemerintah Desa Lerep dalam pengelolaan sampah dan dampak dari kepemimpinan dalam pengelolaan sampah. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Hasil penelitian ini dapat dirangkum menjadi dua poin penting. Pertama, gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Kepala Desa Lerep dalam pengelolaan sampah berhasil meningkatkan

partisipasi masyarakat melalui kebijakan dan program-program pengelolaan sampah serta berhasil membawa prestasi dari pengelolaan sampah yang inovasi. Kedua, gaya kepemimpinan yang diterapkan membawa dampak positif yang signifikan. Namun, terdapat dampak negatif yang dihasilkan, yaitu terjadinya tumpang tindih kewenangan yang terjadi dalam program-program pengelolaan sampah di Desa Ilerp.

Kata Kunci: Gaya kepemimpinan, pengelolaan sampah, dampak kepemimpinan, kategorisasi kepemimpinan

ABSTRACT

Waste management is an increasingly pressing issue in Indonesia, especially at the village level, as public awareness and participation in keeping the environment clean is still low. Lerep Village, West Ungaran Sub-district, Semarang Regency is an interesting case to study, given the challenges faced in waste management and the need for effective leadership intervention. Therefore, this study aims to answer two questions: 1) what is the leadership style of Lerep Village Head Mr. Sumariyadi in waste management? 2) what is the impact of leadership in waste management in Lerep Village?

Translated with DeepL.com (free version) The theory that the author uses to answer the two research questions above is Ramlan Surbakti's Leadership theory. In Ramlan Surbakti's theory to analyze leadership, there are three categorizations of leadership, namely the leadership process and leadership character, the results of the leadership process, and the source of power. This concept is used to examine the leadership style used by the Lerep Village government in waste management and the impact of leadership in waste management. The research method that the author uses is a qualitative method with a case study approach.

The results of this study have been summarized into two important points. First, the leadership style applied by the Lerep Village Head in waste management has succeeded in increasing community participation through waste

management policies and programs and succeeded in bringing achievements from innovative waste management. Second, the leadership style applied has a significant positive impact. However, there is a negative impact, namely the overlapping of authority that occurs in waste management programs in Lerep Village.

Keywords: *Leadership style, waste management, leadership impact, leadership categorization*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian	20
D. Manfaat Penelitian	20
1. Manfaat Teoritis	21
2. Manfaat Praktis.....	21
E. Tinjauan Pustaka	21
1. Tata Kelola Sampah.....	22

2. Kepemimpinan dalam Pengelolaan Sampah ...	29
F. Metode Penelitian.....	36
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
2. Sumber dan Jenis Data	38
3. Teknik Pengumpulan Data	39
4. Teknik Analisis Data	44
G. Sistematika Penulisan	46
BAB II.....	50
KERANGKA TEORI	50
A. Teori Kepemimpinan Ramlan Surbakti	50
1. Definisi Kepemimpinan Ramlan Surbakti	50
2. Kategorisasi Kepemimpinan.....	53
B. Konsep Pengelolaan Sampah	76
1. Pengertian Sampah	76
2. Konsep Pengelolaan Sampah.....	77
3. Sumber dan Timbulan Sampah.....	82
BAB III	84
LANDSCAPE DESA LEREP DAN TATA KELOLA SAMPAH DESA LEREP	84
A. Gambaran Umum Desa Lerep	84
1. Sejarah Desa Lerep	84
2. Visi Misi Desa Lerep	86
3. Kondisi Geografis Desa Lerep.....	88

4. Kondisi Sosial Desa Lerep	93
5. Kondisi Ekonomi Desa Lerep.....	98
6. Kondisi Politik Desa Lerep.....	99
7. Kondisi Pemerintahan Desa Lerep	101
B. Profil Tata Kelola Sampah Desa Lerep	102
1. Pengelolaan Sampah di Desa Lerep	102
2. Tujuan Pengelolaan Sampah Desa Lerep	108
BAB IV	110
GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA LEREP BAPAK SUMARIYADI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH.....	110
A. Proses Kepemimpinan dan Karakter Kepemimpinan	110
1. Proses Kepemimpinan dalam Tahapan Kegiatan Tata Kelola Sampah	110
2. Karakter Kepemimpinan Kepala Desa Lerep dalam Tata Kelola Sampah.....	136
B. Hasil Proses Kepemimpinan	151
1. Keberhasilan Program Pengelolaan Sampah	151
C. Sumber Kekuasaan	173
1. Sumber Kekuasaan Formal	173
2. Kekuasaan Informal.....	180
D. Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Lerep	183
BAB V	186
DAMPAK KEPEMIMPINAN DALAM	

PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA LEREP.....	186
A. Dampak Sosial	186
1. Peningkatan Kesadaran Lingkungan.....	186
2. Peningkatan Kesadaran Partisipasi	188
3. Peningkatan Kualitas Hidup	191
4. Peningkatan Solidaritas Sosial.....	192
B. Dampak Ekonomi	194
1. Dampak Positif	194
2. Dampak Negatif.....	199
C. Dampak Politik.....	203
1. Dampak positif	203
2. Dampak Negatif.....	210
BAB VI	213
PENUTUP	213
A. Kesimpulan	213
B. Saran	215
DAFTAR PUSTAKA	217
LAMPIRAN	224
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	233

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Luas Wilayah Dusun Desa Lerep	90
Tabel 3. 2 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Lerep	94
Tabel 3. 3 Jumlah Data Kependudukan Desa Lerep	95
Tabel 3. 4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Lerep ...	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Data Jumlah Timbunan Sampah di Indonesia.....	2
Gambar 1. 2 Data Jumlah Komposisi Sampah di Indonesia.....	4
Gambar 1. 3 Sumber Sampah di Indonesia.....	4
Gambar 3. 1Peta Desa Lerep	89
Gambar 3. 2 Struktur Pemerintahan Desa Lerep.....	102
Gambar 4. 1 Musyawarah Kepada Masyarakat Desa Lerep	115
Gambar 4. 2 Musrenbangdes desa lerep.....	116
Gambar 4. 3 Website Desa Lerep	118
Gambar 4. 4 Instagram Desa Lerep.....	119
Gambar 4. 5 Kegiatan Daur Ulang Sampah.....	126
Gambar 4. 6 Pemanfaatan Sampah Menjadi Ecobrick...	145
Gambar 4. 7 Hasil Daur Ulang Sampah	145
Gambar 4. 8 Tempat Pengolahan Biogas dari Kotoran Sapi	146
Gambar 4. 9 Hasil Kompos Dari Sampah	149
Gambar 4. 10 Kegiatan Studi Banding	150
Gambar 4. 11 Sampah Menjadi Tas.....	150
Gambar 4. 12 Kegiatan Tabungan Sampah Desa Lerep.	155
Gambar 4. 13 Juara 1 Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2018.....	158
Gambar 4. 14 Hasil Daur Ulang Sampah	160
Gambar 4. 15 Juara 1 Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat Kabupaten Semarang	161
Gambar 4. 16 Struktur Organisasi TPS3R Sokaku Asri.	163
Gambar 4. 17 Pengambilan Sampah Masyarakat	168
Gambar 4. 18 Pemilahan Sampah.....	168
Gambar 4. 19 Proses Pencacahan Sampah.....	169
Gambar 4. 20 Pengepakan Kompos.....	169
Gambar 4. 21 Budidaya Maggot	169

Gambar 4. 22 TPS Indrokilo.....	170
Gambar 5. 1 Penerapan Mengurangi Sampah Plastik pada Kegiatan Pasar Desa Lerep.....	188
Gambar 5. 2 Kegiatan Daur Ulang Sampah.....	193
Gambar 5. 3 Hasil Kompos dari TPS3R.....	195
Gambar 5. 4 Kunjungan Ganjar Pranowo di Desa Wisata Lerep.....	198

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi	224
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	233
Lampiran 3 Peraturan Desa Lerep	243

BAB I

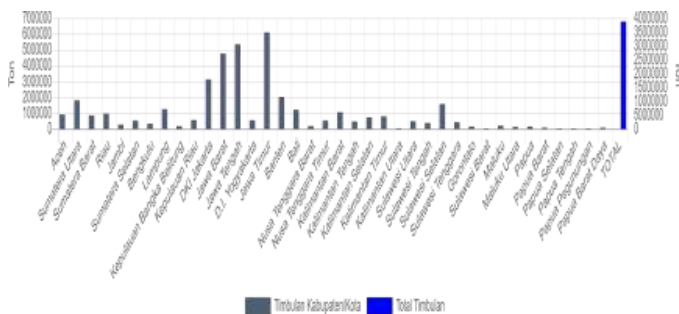
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan sampah telah menjadi isu lingkungan yang semakin krusial di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan peningkatan jenis dan karakteristik sampah menjadi semakin beragam di kalangan masyarakat (Nurikah et al., 2022). Wilayah yang menghasilkan banyaknya sampah adalah salah satunya di tingkat pedesaan, melihat sebagian besar sampah yang dihasilkan adalah sampah rumah tangga. Dalam hal ini, pemerintah harus memainkan peran yang signifikan dalam pengelolaan sampah agar sampah tidak menjadi masalah di setiap daerah, khususnya di tingkat pedesaan.

Sampah adalah permasalahan serius yang belum dapat teratasi dengan baik. Kemampuan mengelola sampah dalam menangani kapasitas sampah tidak seimbang dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan dan menurunkan nilai estetika. Selain itu, tumpukan yang mengotori area terbuka akan menyebabkan pencemaran tanah yang

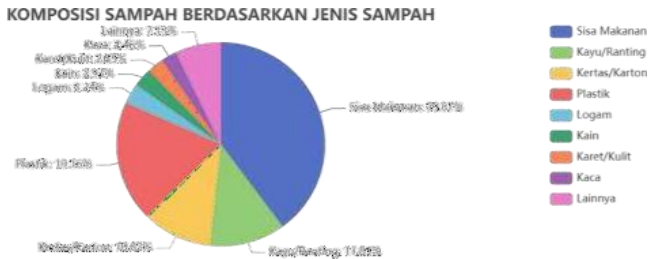
dapat mempengaruhi saluran air tanah. Pembakaran sampah juga dapat mengakibatkan pencemaran udara. Pembuangan sampah ke sungai dan selokan akan menyebabkan pencemaran air, penyumbatan saluran air, serta banjir. Menurut Meutia dalam Notoatmodjo (2010) sampah menjadi salah satu faktor utama penyebab permasalahan lingkungan, terutama dalam hal kesehatan masyarakat. Mikroorganisme patogen dan serangga pembawa penyakit seringkali berkembang biak di tumpukan sampah, sehingga berpotensi menyebarkan berbagai macam penyakit. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang baik menjadi sangat penting untuk mencegah pencemaran lingkungan dan tidak membahayakan masyarakat sekitar.



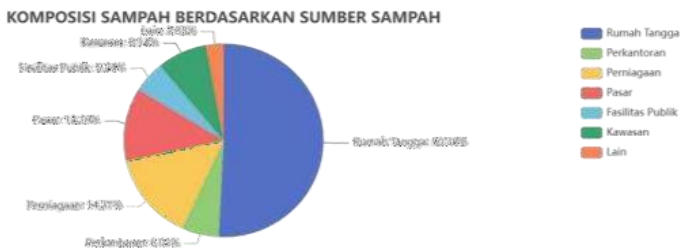
Gambar 1. 1 Data Jumlah Timbulan Sampah di Indonesia

Sumber: Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (NIPSN)

Berdasarkan grafik diatas, jumlah timbunan sampah di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 104,7 ribu ton per hari dan 38,2 juta ton per tahun. Jumlah timbunan sampah yang tinggi disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk urbanisasi yang pesat, pola konsumsi yang berubah, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dari total timbunan sampah tersebut, sampah organik masih menyumbang porsi terbesar, yaitu sekitar 39% dari total timbunan. Ini sangat mencolok mengingat sebagian besar sampah organik berasal dari limbah makanan. Sementara itu, limbah plastik menjadi perhatian utama karena peningkatannya yang signifikan, mencapai 19,1% dari total sampah. Hal ini merupakan masalah besar, mengingat plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai, sehingga dapat mencemari lingkungan dalam jangka yang panjang. Disisi lain diikuti oleh sampah kayu atau ranting sebesar 11,8% dan sampah kertas sebesar 10,8%. Sementara sisa- sisa sampah lainnya, seperti logam, kaca, kain, dan karet/kulit masing-masing menyumbang presentase yang lebih kecil.



Gambar 1. 2 Data Jumlah Komposisi Sampah di Indonesia
Sumber: Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (NIPSN)



Gambar 1. 3 Sumber Sampah di Indonesia
Sumber: Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (NIPSN)

Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (NIPSN) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat mengenai sumber-sumber sampah di Indonesia. Sumber utama sampah dibagi menjadi beberapa kategori, dan kategori rumah tangga mendominasi dengan jumlah 50,7% dari total timbunan sampah nasional. Hal

ini menunjukkan bahwa aktivitas sehari-hari masyarakat, seperti konsumsi makanan dan produk kemasan, secara signifikan terlibat terhadap masalah pengelolaan sampah. Limbah organik, seperti sisa makanan dan bahan vegetatif menjadi bagian terbesar dari sampah rumah tangga, serta limbah plastik yang berasal dari kemasan makanan dan barang lainnya. Di samping kategori rumah tangga, sektor komersial juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan, mencapai sekitar 30% dari total timbulan sampah. Berbagai usaha, seperti pasar, perkantoran, dan perniagaan menyumbangkan sampah dalam bentuk kemasan, limbah makanan, dan produk lainnya yang tidak terpakai. Hal ini menunjukkan bahwa sektor komersial perlu terlibat aktif dalam upaya pengelolaan sampah yang lebih efektif. Sektor industri lainnya menyusul dengan terlibat sekitar 8,1% dari total timbulan sampah. Meskipun dampaknya lebih kecil dibanding dengan sektor rumah tangga dan sektor komersial, limbah industri sering mengandung bahan berbahaya yang memerlukan penanganan khusus. Terakhir sektor publik menyumbangkan sekitar 5,2%

dari total timbunan sampah. Sampah dari sektor ini biasanya berupa kertas, plastik, dan limbah lainnya yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari. Jumlah sampah yang terus meningkat menunjukkan adanya masalah yang serius dalam pengelolaan sampah. Kebiasaan masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan serta membuang sampah tanpa memilah terlebih dahulu menjadi faktor dalam meningkatnya volume sampah. Hal ini diperparah dengan kurangnya kesadaran mengenai pentingnya daur ulang dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Akibatnya banyak sampah yang menumpuk ditempat pembuangan sampah. Kondisi ini memiliki dampak jangka panjang yang merugikan mulai dari penyakit yang ditularkan oleh sampah yang mengancam kesehatan masyarakat hingga rusaknya ekosistem yang dapat mengganggu keseimbangan alam. Imam Has dalam Suwerda mengemukakan dampak apabila sampah tidak dikelola dengan baik, *Pertama* sampah menyebabkan sumber penyakit, dan menciptakan lingkungan yang tidak bersih. Sampah tersebut menjadi sarang

bagi tikus, lalat, dan hewan liar lainnya dan menjadi tempat bagi mikroorganisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia. *Kedua*, pembakaran sampah menyebabkan pencemaran udara yang berdampak negatif pada kesehatan masyarakat, dan menimbulkan pemanasan global. *Ketiga*, sampah yang membusuk akan meninggalkan bau yang tidak sedap dan berbahaya untuk kesehatan. Cairan yang dihasilkan akan meresap ke dalam tanah dan menyebabkan pencemaran sumur, air, tanah, serta pembuangannya ke badan air dapat mencemari sungai. *Keempat*, membuang sampah ke sungai atau badan air akan menyebabkan sungai menjadi dangkal yang mengakibatkan terjadinya banjir.

Menghadapi situasi yang semakin mengkhawatirkan, pemerintah memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah. Tanpa adanya intervensi dan dukungan dari pemerintah, pengelolaan sampah tidak akan berjalan efektif. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk menyediakan infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah yang memadai, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan

membangun kesadaran masyarakat.

Studi tentang tata kelola sampah ini telah diteliti dan dikaji oleh para sarjana terdahulu. Sebagian sarjana memfokuskan kajian terkait pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah. Pada studi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Imam Has (2021), Hesti Nur Rahmadani (2020), Louise Theresia (2021), Nurikah dkk (2022), Dhandy Handana dkk (2022) dan Meutia Nanda dkk (2022) menemukan hasil bahwa tata kelola sampah tidak berjalan dengan baik tanpa adanya partisipasi aktif dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pentingnya strategi kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sampah, dimana partisipasi aktif dari semua pihak menjadi sebuah kunci untuk mencapai hasil yang maksimal (Has, 2021). Salah satunya adalah partisipasi dalam program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan yang merupakan elemen penting dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang sukses (Rahmadani, 2020).

(Theresia, 2021) menambahkan bahwa kebijakan publik yang jelas dan terarah sangat diperlukan dalam mendukung kolaborasi ini dan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berintegrasi dan berkelanjutan. Meskipun demikian terdapat tantangan yang dihadapi dalam implementasi pengelolaan sampah, termasuk kurangnya infrastruktur dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemilihan sampah. Dalam penelitian ini menyoroti perlu inovasi teknologi dalam proses pengelolaan sampah, seperti penggunaan aplikasi untuk memfasilitasi pemilahan sampah di rumah tangga (Nurikah et al., 2022). Pemerintah seperti Dinas Lingkungan Hidup memiliki tanggungjawab dalam menyediakan fasilitas seperti membangun program bank sampah guna menyukseskan pengelolaan sampah yang baik (Handana et al., 2022). Disisi lain juga perlu adanya pendidikan lingkungan dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan dapat mendorong partisipasi dalam pengelolaan sampah (Nanda et al., 2022).

Studi lainnya tentang kepemimpinan telah diteliti dan dikaji oleh para sarjana terdahulu. Pada studi penelitian sebelumnya

yang dilakukan oleh Agung Nurrahman dkk (2021), Mohd Rahmaddhoni Pratama dan Fitriyah (2021), Veni Victoruddien (2022), dan M. Fajar Ginting (2024) menemukan hasil yang memfokuskan kajian mengenai peran kepemimpinan dalam pengelolaan sampah. Kepemimpinan yang efektif merupakan kunci dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah. Pemimpin harus beradaptasi, berkomunikasi dengan baik, dan menciptakan lingkungan yang dapat mendukung kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan sampah yang komprehensif (Nurrahman et al., 2021). Selain itu, kepemimpinan yang efektif tidak hanya mengandalkan otoritas formal, melainkan juga memerlukan kemampuan untuk membangun sinergi dan motivasi antara masyarakat dengan menciptakan model pengelolaan sampah yang inovatif dan berkelanjutan (Pratama & Fitriyah, 2021). Peran kepemimpinan sangat dibutuhkan meskipun terdapat tantangan seperti hal kewenangan, regulasi, dan partisipasi masyarakat (Victoruddien, 2022). Oleh karenanya, salah satu peran penting yang perlu

dilakukan pemimpin adalah perlu adanya edukasi kepada masyarakat agar masyarakat terbuka dalam menghadapi perubahan dan lebih peduli terhadap lingkungan (GINTING, 2024).

Secara garis besar, berdasarkan dua kelompok studi di atas terdapat kesamaan topik kajian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya oleh penulis yaitu tata kelola sampah dan kepemimpinan tata kelola sampah. Namun, fokus kajian penulis adalah kepemimpinan tata kelola sampah desa dengan melihat gaya kepemimpinan dan dampak kepemimpinan. Dikatakan demikian, karena penulis ingin mengambil sudut pandang yang berbeda di mana banyak peneliti terdahulu mengkaji tata kelola sampah yang memfokuskan kajiannya terkait kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah dan peran kepemimpinan dalam pengelolaan sampah. Kajian ini dilaksanakan di Desa Lerep yaitu salah satu desa yang letaknya di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

Pengelolaan sampah di Desa Lerep pada awalnya menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Kebiasaan buruk membuang

sampah sembarangan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan menyebabkan timbunan sampah yang semakin menumpuk di beberapa lokasi, dan fasilitas pengelolaan sampah yang kurang memadai. Sampah yang dihasilkan masyarakat tidak dikelola dengan baik, melainkan dibuang sembarangan di sungai, saluran air dan dibakar. Kondisi ini membawa dampak buruk yang signifikan seperti pencemaran lingkungan, polusi udara, munculnya bau tidak sedap mulai mengganggu kenyamanan lingkungan. Timbunan sampah yang tidak dikelola dengan baik menjadi sarang penyakit seperti tikus, lalat, dan nyamuk. Akibatnya terjadi peningkatan kasus penyakit seperti diare, demam berdarah, dan penyakit kulit di kalangan masyarakat. Kebiasaan buruk yang dilakukan masyarakat membawa dampak buruk lainnya di Desa Lerep yaitu adanya genangan air di beberapa rumah dan banjir di Dusun Soka yang terjadi pada tahun 2016. Banjir tersebut menyebabkan sampah mengalir hingga Dusun Kretek, Karangbolo, dan Mapagan. Sampah yang dihasilkan berasal dari Dusun Indrokilo, Lerep dan Soka, mengingat tiga dusun tersebut adalah

dataran tinggi. Terjadinya genangan air dan banjir akibat dari saluran air yang tidak berfungsi karena tersumbatnya saluran air oleh sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat.

Menyikapi kondisi yang mengkhawatirkan ini, pemerintah Desa Lerep yakni Kepala Desa Bapak Sumariyadi bertindak untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kepala Desa Lerep memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk yang ditimbulkan dari kebiasaan membuang sampah sembarangan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk turun langsung melaksanakan bersih-bersih saluran air, sungai dan area yang terdapat banyak sampah. Selain itu, Kepala Desa Bapak Sumariyadi meluncurkan beberapa program inovatif pelestarian lingkungan, yakni pembentukan program bank sampah. Program ini telah beroperasi sejak tahun 2015 dan merupakan salah satu pionir dalam pengelolaan sampah di Desa Lerep. Bank sampah Desa Lerep baru memiliki fasilitas gedung sendiri pada tahun 2015. Program bank sampah tersebut dikenal "Bank Sampah Soka Resik".

Hal ini menjadi langkah yang baik untuk mengurangi sampah terutama pemerintah Desa Lerep mengusung konsep dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaannya dan menjadikan masyarakat sebagai subjek utama. Program bank sampah di Desa Lerep tidak hanya berfokus sebagai pelestarian lingkungan, namun juga menawarkan berbagai layanan kepada masyarakat, diantaranya adalah tabungan sampah. Melalui program ini, masyarakat dapat menukarkan sampah yang mereka kumpulkan dengan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Uang tabungan tersebut dapat diambil langsung dari bendahara bank sampah. Tujuan utama dari layanan tabungan sampah adalah untuk mengurangi jumlah sampah, khususnya sampah non- organik yang dihasilkan oleh rumah tangga. Adanya insentif berupa uang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program ini (Aniq, 2019).

Layanan kedua yaitu pembayaran BPJS Ketenagakerjaan. Layanan tersebut merupakan pengembangan dari nilai ekonomi yang dimiliki program bank sampah yang sudah berjalan.

Pekerja sektor informal seperti petani, buruh, ibu rumah tangga, dan tukang ojek dapat memanfaatkan hasil tabungan sampah mereka untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan bank sampah dapat dimasukkan ke dalam jaminan sosial masyarakat.

Layanan ketiga adalah daur ulang atau memanfaatkan sampah non- organik menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis. Sampah yang terkumpul dari tabungan masyarakat akan dipilah dan dijual kepada pengepul. Selain itu, barang-barang yang masih dapat dimanfaatkan akan diambil untuk didaur ulang oleh masyarakat. Melalui program ini, kesadaran masyarakat Desa Lerep akan pentingnya menjaga lingkungan semakin meningkat. Masyarakat yang dulunya sering membuang sampah sembarangan kini mulai aktif dalam mengelola sampah dan mengubahnya menjadi barang yang bermanfaat.

Program selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lerep adalah pengembangan program TPS3R yang (Tempat Pengolahan Sampah Reuse Reduce Recycle)

Sokaku Asri. Melalui program kampung iklim yang diluncurkan pada tahun 2017 dengan dukungan Dinas Lingkungan Hidup. Dengan adanya program kampung iklim, terciptalah program TPS3R yang merupakan bagian dari upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. TPS3R tersebut berpusat di Dusun Soka. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola dan memahami proses pengolahan sampah dan mendapatkan pengetahuan ekonomi inovatif tentang cara mengelola sampah. Dengan tujuan tersebut, program TPS3R Sokaku Asri adalah untuk memberikan masyarakat pengetahuan tentang cara mengelola sampah yang memiliki nilai jual. Selain program TPS3R, terdapat program selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lerep yakni, pemerintah Desa Lerep rutin melakukan pengangkutan sampah melalui petugas yang telah dibentuk untuk mengambil sampah di setiap rumah. Dalam program ini, warga membayar iuran yang dibayarkan setiap rumah tangga sebesar Rp. 15.000 dan Rp. 30.000 untuk yang memiliki usaha seperti UMKM dan lain-lain yang lebih banyak

menghasilkan sampah. Pengangkutan sampah di Desa Lerep dikelola oleh BUMDes Gerbang Lentera Desa Lerep kecuali Dusun Soka membayar iuran diluar pengelolaan BUMDes dan pengambilan sampahnya diambil oleh TPS3R, karena letak TPS3R yang berada di Dusun Soka dan TPS3R merupakan program yang ada di Dusun Soka, maka Dusun Soka membayar uang sampah kepada petugas TPS3R.

Program yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Lerep yaitu bank sampah dan TPS3R mendapat predikat Kampung Iklim oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dan meraih juara 3 di tingkat nasional. Berawal dari kondisi yang memprihatinkan dimana masyarakat acuh terhadap pelestarian lingkungan, dan memiliki kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan. Desa Lerep melakukan perubahan yang signifikan melalui program-program inovatif yang diinisiasi oleh pemerintah Desa Lerep.

Pemerintah Desa Lerep yakni kepala desa dalam upaya tata kelola sampah menjadi lebih baik aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan

sampah yang baik. Melalui berbagai kegiatan yang edukatif, Bapak Sumariyadi berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari membuang sampah sembarangan dan manfaat dari pengelolaan yang tepat. Pemerintah Desa Lerep menjalin kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang untuk mendapatkan dukungan dalam pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan. Dukungan ini termasuk fasilitas dan sumber daya untuk mendirikan tempat pembuangan sampah yang lebih baik dan program- program pelestarian lingkungan lainnya. Berbagai permasalahan yang telah dihadapi, tantangan ini tidak hanya membutuhkan kepemimpinan yang baik, tetapi juga gaya kepemimpinan yang tepat. Gaya kepemimpinan yang efektif tidak hanya dapat mengarahkan program dan kebijakan, tetapi juga dapat menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif, dan menciptakan solusi yang inovatif sesuai dengan kondisi lokal.

Penelitian tentang kepemimpinan dalam tata kelola sampah memiliki signifikasi yang relevan. Studi ini berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai

kepemimpinan di tingkat pemerintah desa khususnya dalam konteks tata kelola sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan dalam keberhasilan tata kelola sampah dan dampak kepemimpinan. Hal ini menjadi kajian yang menarik bagi penulis termuat dalam judul “Kepemimpinan Dalam Tata Kelola Sampah Pemerintah Desa Lerep, Kabupaten Semarang. Penelitian ini perlu dikaji untuk mengetahui gaya kepemimpinan dan dampak kepemimpinan, mengingat penelitian terdahulu cenderung hanya menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah dan peran kepemimpinan dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi pemimpin dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang efektif. Selain itu, penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu politik dengan memberikan wawasan baru tentang hubungan antara pemimpin, kebijakan lingkungan, dan partisipasi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini ingin menjawab 2 rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana gaya kepemimpinan Kepala Desa Lerep Bapak Sumariyadi dalam pengelolaan sampah?
2. Bagaimana dampak kepemimpinan dalam pengelolaan sampah di Desa Lerep?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini memiliki 2 tujuan yakni sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis gaya kepemimpinan Kepala Desa Lerep Bapak Sumariyadi dalam pengelolaan sampah.
2. Untuk mengidentifikasi dampak kepemimpinan dalam pengelolaan sampah di Desa Lerep.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan 2 manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Adapun penjelasan mengenai manfaat akan dapat dijelaskan dibawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini harapannya dapat memperluas pemahaman dan memperkaya literatur pada bidang tata kelola sampah. Dengan hadirnya penelitian ini, dapat membentuk pola berpikir yang sistematis dan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada kajian ilmu politik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat yang diperoleh oleh peneliti sebagai berikut :

- a. Bagi pemerintah, dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pengelolaan sampah yang efektif, serta mempertimbangkan pentingnya kepemimpinan.
- b. Bagi masyarakat, dapat mendorong masyarakat untuk ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah.
- c. Bagi peneliti lain, harapannya dapat memberikan manfaat, wawasan, dan dapat dijadikan referensi oleh peneliti selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah melakukan penggalan informasi melalui literature

review melalui penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Upaya pengkajian penelitian terdahulu dilakukan agar penulis dapat menentukan posisi hasil penelitiannya dari berbagai sudut pandang. Topik penelitian ini akan dikaji dalam dua tema yaitu tata kelola sampah dan kepemimpinan dalam pengelolaan sampah. Berikut kajian pustaka dalam penelitian ini:

1. Tata Kelola Sampah

Isu tata kelola sampah telah banyak dikaji oleh para sarjana yang berfokus pada pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah. Hal ini dapat dilihat pada studi berjudul *“Tata Kelola Sampah Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Di Pasar Tradisional Kelurahan Enok)”* oleh Imam Has (2021). Pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah yang merupakan tanggung jawab utama mereka sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penulis menjelaskan bahwa Pemerintah

Daerah memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan, strategi, dan norma, serta standar pengelolaan sampah di wilayah masing-masing. Tidak terkelolanya sampah di pasar tradisional Kelurahan Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragilir Hilir masih terdapat masalah mengenai banyaknya sampah yang bertebaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitar pasar. Studi yang dilakukan peneliti mengungkapkan bahwa kecamatan tidak mempunyai kewenangan untuk pasar, melainkan pasar menjadi kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragilir Hilir. Studi ini juga menjelaskan belum tersedianya TPS dan TPA di Kecamatan Enok yang menyebabkan sampah menjadi menumpuk di beberapa tempat seperti selokan di sekitar pasar yang mengakibatkan selokan menjadi tersumbat (Has, 2021).

Terhambatnya tata kelola sampah semacam di atas namun dilihat dari kacamata Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota

Pekanbaru juga menjadi permasalahan dalam fokus kajian tata kelola sampah. Studi tata kelola pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Hesti Nur Rahmadani (2020) tentang *“Tata Kelola Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”*. Dalam kajian yang peneliti lakukan, masih terdapat permasalahan yakni tidak tepatnya jadwal pengambilan sampah yang dilakukan oleh petugas pengangkut sampah sehingga ditemukan tumpukan sampah yang tidak diangkut berhari-hari, kurangnya angkutan seperti kendaraan truk yang digunakan dalam pengangkutan sampah sehingga sampah tidak diangkut secara merata oleh petugas, kurangnya petugas pengangkutan sampah dimana dalam satu armada hanya terdapat 4 sampai 5 orang yang didalamnya termasuk supir. Penulis juga menjelaskan mengenai terhambatnya tata pengelolaan sampah juga disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pembuangan sampah pada jam yang telah ditentukan dan pada kenyataannya

masyarakat membuang sampah di luar jadwal yang ditentukan, serta kurangnya pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mengenai pengurangan sampah yang terdapat di TPS. Penulis menyoroti pentingnya penerapan 3R dalam pengelolaan sampah (Rahmadani, 2020).

Tata kelola sampah juga penting dilihat dalam perspektif hukum dengan harapan hukum dapat mendorong individu, pemerintah, dan perusahaan untuk bertanggungjawab terhadap sampah yang dihasilkan. Dengan adanya penegakan hukum, mereka lebih sadar untuk mengurangi sampah, melakukan pendauran ulang, sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap sampah yang tidak dikelola dengan baik. Studi ini dikaji oleh Louise Theresia (2021) berjudul *"Tata Kelola Sampah Dalam Perspektif Hukum Lingkungan"*. Dalam studinya tersebut mengungkapkan bahwa sistem pengelolaan sampah dan kebersihan di Kota Palangka Raya belum mencapai tingkat optimal. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan

tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu penyebab utama permasalahan ini adalah kurangnya koordinasi antar lembaga atau instansi di bawah pemerintahan daerah setempat, khususnya dalam hal pengelolaan sampah. Penulis lebih lanjut menjelaskan bahwa terdapat faktor penghambat lainnya. Faktor-faktor ini meliputi keterbatasan anggaran, kekurangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang tidak memadai, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya sosialisasi dan edukasi (Theresia, 2021).

Kebiasaan masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungan dan membuang sampah sembarangan membuat petugas pengangkut sampah dan pemerintah kesulitan dalam menangani sampah yang terus bertambah. Hal ini dikaji oleh Nurikah, dkk (2022) berjudul *“Tata Kelola Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008*

Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kota Serang”. Partisipasi masyarakat merupakan kunci dalam keberhasilan pengelolaan sampah di Kota Serang. Peneliti menemukan bahwa kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dengan melihat kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah di sungai, irigasi, jalan raya. Hal ini membuat pengelolaan sampah di Kota Serang belum teratasi secara optimal. Peneliti menjelaskan bahwa sampah yang dihasilkan di Kota Serang adalah 800 ton per hari. Namun, kapasitas angkut sampah saat ini hanya mencapai 400 ton karena keterbatasan armada. Pemerintah Kota Serang berusaha memaksimalkan pengangkutan dengan melakukan tiga kali pengangkutan sampah menggunakan satu truk. Selain itu Pemerintah Kota Serang akan melaksanakan program 3R dalam pengelolaan sampah (Nurikah et al., 2022).

Meningkat volume sampah yang terus meningkat dan membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan,

adanya fasilitas seperti bank sampah menjadi penting sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan sampah. Hal ini dikaji oleh Dhandy Handana dkk (2022) mengenai *“Tata Kelola Pengelolaan Sampah Berbasis Bank Sampah Di Kota Padang”*. Penelitian ini mengacu pada konsep bank sampah sebagai solusi inovatif untuk mengatasi masalah yang semakin kompleks di Kota Padang. Peneliti menemukan bahwa bank sampah tidak hanya efektif dalam mengurangi volume sampah, tetapi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan yang baik. Peneliti juga berpendapat bahwa pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan (Handana et al., 2022).

Tidak hanya fasilitas seperti bank sampah sebagai solusi dalam menghadapi permasalahan ini. Pentingnya perbaikan dalam pengelolaan TPA, termasuk meningkatkan fasilitas pemilahan dan pengolahan, serta kontribusi masyarakat

dalam program pengelolaan sampah. Seperti penelitian yang dikaji oleh Meutia Nanda, dkk (2022) yang berjudul “*Tata Kelola Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar*”. Peneliti berargumen bahwa edukasi dan kesadaran masyarakat harus ditingkatkan guna mendukung pengelolaan sampah yang baik dan upaya pengurangan sampah. Tata kelola sampah di TPA Kelurahan Tanjung Pinggir membutuhkan perhatian lebih untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kerjasama antara pemerintah, pengelola TPA, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat (Nanda et al., 2022).

2. Kepemimpinan dalam Pengelolaan Sampah

Pada program tata kelola sampah, keberhasilan program tata kelola sampah sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang baik dapat mengarahkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam program pengelolaan

sampah. Kajiannya berfokus pada peran kepemimpinan dalam pengelolaan sampah. Salah satunya, kajian dari Agung Nurrahmah, dkk (2021) berjudul *“Kepemimpinan Lurah Dalam Pengelolaan Bank Sampah Di Kelurahan Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau”*. Studinya ini mengungkapkan bahwa dalam program pengelolaan bank sampah di Kelurahan Raya sudah berjalan dengan cukup baik. Kepemimpinan lurah sudah cukup mampu menjalankan program pengelolaan bank sampah dengan baik. Dalam mengoptimasi program tersebut, penulis menyarankan untuk meningkatkan partisipasi dan kontribusi dari berbagai bagian dan sektor masyarakat terutama dari pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar dan berperan sebagai jembatan bagi masyarakat, pentingnya meningkatkan kualitas manajemen bank sampah dengan melibatkan orang yang paham terkait masalah tersebut (Nurrahman et al., 2021).

Peran kepemimpinan memiliki dampak yang signifikan dalam mencapai

kerberhasilan, karena pemimpin yang efektif dapat mengarahkan, memotivasi, dan memberikan inspirasi kepada anggotanya. Studi yang dilakukan oleh M Fajar Ginting (2024) berjudul *“Peranan Kepemimpinan Lurah Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan”*. Studinya mengungkapkan bahwa di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, lurah menjalankan perannya dengan baik. Hal ini terbukti dengan adanya kelompok pengelolaan sampah yang dibentuk oleh kelurahan, yaitu PPPSU (Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum) dan kelompok yang disebut Bastari Melati. Sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik dibawah kepemimpinan lurah. Meskipun kepemimpinan lurah di Kampung Baru baik, terdapat hambatan dalam pengelolaan sampah, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat yang menyebabkan program pengeloan sampah menjadi terhambat dan

gagal. Hal ini perlu adanya edukasi kepada masyarakat (GINTING, 2024).

Peran kepemimpinan dalam menghadapi permasalahan sampah ternyata belum cukup, diperlukan pula penerapan gaya kepemimpinan yang sesuai agar dapat memberikan dampak yang maksimal dalam mencapai suatu tujuan. Hal ini dikaji oleh Mohd Rahmaddhoni Pratama dan Fitriyah (2021) yang berjudul *“Kepemimpinan Tri Rismaharini Dalam Mengatasi Pengelolaan Sampah di Kota Surabaya”*. Peneliti menjelaskan kebijakan Sustainable Development Goals yang dilakukan oleh Tri Rismaharini mampu mengatasi permasalahan limbah sampah di Kota Surabaya. Hal ini dapat dilihat dari gaya kepemimpinan Tri Rismaharini yang disiplin dan tegas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memiliki kinerja yang baik dalam jabatannya sebagai Walikota Surabaya. Cara Risma melakukan inovasi dalam pembangunan Kota Surabaya dengan cara terjun langsung ke lapangan dalam menangani masalah adalah gaya

kepemimpinan yang masyarakat suka. Gaya kepemimpinan Risma menjadi lebih berpartisipasi karena lebih memperhatikan prosedur di lapangan, yang menuntut pengelolaan sampah di Surabaya untuk teratur dan tegas (Pratama & Fitriyah, 2021).

Tercapainya suatu tujuan perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat agar menggerakkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Hal ini dikaji oleh Veni Victorrudien (2022) yang berjudul *“Bottom-Up Leadership: Peran Kepemimpinan Camat Sindang Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengelolaan Sampah”*. Peneliti mengemukakan bahwa Camat Sindang melakukan pemberdayaan masyarakat dalam program pengelolaan sampah memiliki dampak yang positif. Camat Sindang telah berhasil dalam menggerakkan masyarakat, meningkatkan kesadaran, dan mendirikan lembaga seperti bank sampah dan TPS 3R berhasil memberikan kontribusi terhadap kemandirian ekonomi dan perbaikan

lingkungan di Kecamatan Sindang. Terlepas dari itu, terdapat beberapa tantangan yang muncul karena tidak ada peraturan yang mendukung pelimpahan wewenang, yang membatasi tanggung jawab Camat dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan peran Camat sebagai pemimpin yang strategis, termasuk advokasi untuk peraturan yang mendukung serta memperkuat wewenang Camat dalam pengelolaan sampah. Selain itu, langkah yang sangat penting adalah pembentukan program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas menejerial Camat untuk menangani masalah pemberdayaan masyarakat dan lingkungan (Victoruddien, 2022).

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, terdapat kesamaan dan perbedaan antara temuan penelitian sebelumnya dengan topik yang dikaji oleh penulis. Penelitian terdahulu cenderung memfokuskan kajiannya pada kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah dan peran

kepemimpinan dalam pengelolaan sampah. Dalam tata kelola sampah masih terdapat hambatan yaitu kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat tergolong masih buruk. Hal ini dilihat dari kurangnya fasilitas yang pemerintah sediakan dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan suatu program. Hal ini peran dari kepemimpinan sangat penting dibutuhkan dalam meningkatkan partisipasi dan kontribusi aktif dalam pengelolaan sampah yang baik. Hal tersebut berbeda dengan kajian yang penulis lakukan mengenai tata kelola sampah.

Penelitian diatas mempunyai kesamaan dengan kajian penulis yaitu tentang tata kelola sampah. Namun terdapat perbedaan dengan kajian penelitian yang dilakukan penulis di mana dalam pelaksanaan tata kelola sampah, fokus kajian peneliti adalah menganalisis gaya kepemimpinan yang dilakukan Kepala Desa Lerep Bapak Sumariyadi dalam pengelolaan sampah serta mengidentifikasi dampak kepemimpinan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang memiliki arti di mana hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi dan visual, bukan dalam format numerik. Mengutip pandangan Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif menghasilkan temuan berupa uraian deskriptif yang mencakup kata-kata atau lisan orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun penelitian deskriptif sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2007), merupakan penelitian yang memaparkan fenomena, baik yang terjadi secara alami dan rekayasa dalam bentuk deskripsi atau gambaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berupaya mendapatkan pemahaman komprehensif tentang berbagai aspek yang dialami subjek penelitian, termasuk pola perilaku, cara pandang, dorongan, tindakan, dan lain-lain (Moleong, 2007).

Penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan. Maksud dari penelitian lapangan adalah peneliti

terjun langsung terlibat dalam situasi nyata untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai objek yang diteliti. Untuk memahami dan mempelajari fenomena yang sedang ditelitinya, peneliti akan melakukan interaksi langsung dan aktif dengan anggota kelompok masyarakat. Penelitian lapangan ini diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dan informan, dan data yang dihasilkannya dapat lebih akurat dan jelas.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case study*) yang bermaksud untuk menjelaskan hasil penelitian dan mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai suatu situasi. Penelitian studi kasus adalah penelitian di mana suatu kasus dilakukan secara mendalam, konsentratif, terperinci, dan komprehensif (Faisol, 1999).

Pada studi ini, penulis mengambil jenis penelitian kualitatif deskriptif berbasis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penulis mengkaji mengenai gaya kepemimpinan kepala desa Sumariyadi (studi tata kelola sampah di Desa Lerep tahun 2007-2025). Alasan kasus ini diangkat karena berawal dari permasalahan mengenai pengelolaan sampah yang tidak terkelola dengan baik, fasilitas yang tidak

memadai dan kebiasaan buruk masyarakat pada waktu itu yang membuat Kepala Desa Lerep bertindak secara langsung dalam menangani permasalahan tersebut dengan mulai membuat berbagai program dan layanan dalam mengelola sampah. Oleh sebab itu, penulis ingin meneliti kepemimpinan Kepala Desa Lerep yang ditelaah secara mendalam dan dideskripsikan dalam bentuk uraian atau kata-kata.

2. Sumber dan Jenis Data

Merujuk pada penjelasan Lofland yang dikutip dalam karya Lexy J Moleong, penelitian kualitatif menggunakan berbagai sumber data yang terdiri dari kata-kata serta didukung oleh berbagai bentuk dokumentasi dan material pendukung lainnya sebagai penguat data penelitian (Moleong, 2007).

Oleh karena itu, sumber data yaitu informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti sebagai bahan untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian, sumber data dibagi menjadi dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Berikut penjelasannya:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber

aslinya tanpa melalui perantara siapapun. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data dari hasil wawancara dengan informan ataupun narasumber dan observasi di Desa Lerep.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data tidak langsung yang didapatkan melalui perantara dan telah terdokumentasikan oleh pihak tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan beragam data sekunder yang meliputi buku, artikel jurnal, hasil penelitian skripsi terdahulu, profil desa, serta berbagai dokumen pendukung lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahapan yang paling penting dalam penelitian, karena menjadi kunci utama perolehan data. Pemahaman yang baik tentang pengumpulan data sangat diperlukan, sebab tanpa penguasaan teknik yang tepat, peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai dengan standar penelitian. Dalam upaya memverifikasi keabsahan data penelitian,

diperlukan triangulasi data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut penjelasannya :

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati dan mendokumentasikan secara terstruktur terhadap suatu unsur-unsur yang tampak dalam fenomena yang diteliti pada subjek (Widoyoka, 2014). Tujuan observasi adalah untuk memberikan gambaran detail mengenai objek kajian, rangkaian kegiatan yang berlangsung, pihak-pihak yang terlibat, serta interpretasi peristiwa berdasarkan perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati.

Berbagai jenis observasi, peneliti menggunakan observasi partisipasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung dilapangan di mana peneliti terlibat secara langsung dengan individu yang sedang diamati sebagai sumber data penelitian dan merasa terlibat dalam prosesnya. Melalui observasi partisipasi, data yang didapat lebih lengkap dan memudahkan dalam memperoleh informasi yang akurat. Pada penelitian ini, peneliti

terjun langsung di Desa Lerep, sebagai objek observasi penelitian di mana peneliti mengobservasi gaya kepemimpinan kepala desa Bapak Sumariyadi (studi tata kelola sampah di Desa Lerep tahun 2007-2025).

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan percakapan terstruktur dan terencana, di mana peneliti bertindak sebagai pewawancara yang berinteraksi dengan sejumlah informan. Proses wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan topik atau subjek penelitian yang sedang dikaji. Menurut Lexy J Moeleng, wawancara merupakan proses interaksi komunikasi antara dua orang, di mana salah satu pihak mengajukan pertanyaan dan pihak yang diberikan pertanyaan memberikan jawaban sebagai respons (Moleong, 2007).

Tujuan wawancara dalam penelitian adalah untuk memperoleh informasi atau data yang relevan dari responden mengenai subjek tertentu. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam yang

memiliki makna di mana peneliti mendapatkan informasi secara lisan melalui tanya jawab yang dilakukan secara langsung oleh sejumlah informan yang memiliki kemampuan dalam memberikan keterangan tentang masalah penelitian.

Teknik pelaksanaan wawancara yang digunakan adalah struktur dan sistematis di mana peneliti menggunakan standar wawancara dengan membuat serangkaian pertanyaan untuk diajukan kepada narasumber atau informan. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar pembicaraan tetap terfokus. Dengan cara ini, jika seseorang menjawab pertanyaan yang tidak sesuai dengan konteks, jawaban mereka dapat dikembalikan ke posisi awal. Studi penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan informan seperti kepala Desa Lerep, kadus Desa Lerep, BUMDes unit pengelolaan sampah, bendahara BUMDes, kepala TPS3R, ketua program kampung iklim, petugas pengangkut sampah desa, anggota dawas dan masyarakat Desa Lerep. Para narasumber atau informan diberikan pertanyaan seputar

tata kelola sampah di Desa Lerep, gaya kepemimpinan Kepala Desa Lerep dalam program pengelolaan sampah, dan dampak kepemimpinan pemerintah Desa Lerep.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi sebagai metode pengumpulan data melibatkan proses pengumpulan dan pencatatan data serta informasi yang terdapat dalam berbagai bentuk, seperti dokumen, buku, arsip, gambar, laporan, dan keterangan lain yang diperlukan dalam penelitian. Tujuan dokumentasi dalam penelitian adalah untuk mengumpulkan data yang kemudian ditelaah. Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan dokumen dari Desa Lerep berupa foto, rekaman atau catatan dengan narasumber terkait tata kelola sampah, dokumen yang mengatur tentang pengelolaan sampah, dokumentasi mengenai program dan kegiatan pengelolaan sampah. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan Kepala Desa Lerep dalam pengelolaan sampah dan dampak kepemimpinan dalam pengelolaan sampah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang disebut sebagai pengolahan data atau penafsiran adalah serangkaian kegiatan untuk mengelompokkan data dan hasil dari observasi, wawancara dan lain-lain agar memudahkan peneliti dalam memahami dan dapat menyajikannya sebagai temuan dari orang lain. Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data agar mudah dipahami dan dapat diinterpretasikan. Terdapat tiga alur dalam menganalisis data, yaitu sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses meringkas, memilih informasi yang relevan, dan menyisihkan data yang tidak valid dan relevan. Tahap reduksi data, peneliti menyederhanakan atau meringkas data untuk mengidentifikasi elemen penting dari data yang telah dikumpulkan peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan data yang telah disusun secara sistematis sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan. Pada penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk tulisan bentuk teks naratif. Hal ini

bertujuan agar memudahkan saat menggabungkan data maupun informasi sehingga mudah untuk dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan dimana peneliti menyampaikan hasil informasi maupun data yang telah dikumpulkan.

Analisis data yang dilakukan penulis memiliki kemiripan dengan analisis data yang telah dipaparkan sebelumnya, di antaranya :

- a. Pengumpulan informasi maupun data yang telah didapat pada data primer atau sekunder yakni observasi, wawancara, buku, dan lain- lain.
- b. Tahap reduksi data dilakukan melalui peringkasan, pemilahan data penting, dan penghapusan informasi yang tidak tepat atau tidak relevan.
- c. Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti disajikan dalam bentuk teks naratif.
- d. Melakukan analisis, menarik kesimpulan, dan melakukan verifikasi

data agar data menjadi relevan dan valid.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah struktur yang digunakan dalam menyusun skripsi agar dapat tersusun dengan baik dan rapi. Dalam sistematika penulisan terdapat urutan dan struktur setiap bab serta sub bab yang bertujuan untuk memperlihatkan hubungan yang logis dan sistematis. Berikut adalah penyusunan skripsi yang sesuai pada pedoman penyusunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini adalah membahas secara menyeluruh tentang studi yang dilakukan. Di sini, penulis menjelaskan latar belakang pemilihan topik tentang gaya kepemimpinan kepala desa Bapak Sumariyadi (studi tata kelola sampah di Desa Lerep tahun 2007-2025). selanjutnya, penulis mengidentifikasi permasalahan utama yang ingin dikaji dalam penelitian ini dan merumuskan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Selain itu, penulis juga memaparkan manfaat dari penelitian ini,

baik secara teoritis maupun praktis. Untuk mendukung penelitian, penulis melakukan kajian pustaka terhadap penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini. Terakhir, penulis menjelaskan metode yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada bab kedua secara komprehensif membahas dan mengidentifikasi teori kepemimpinan yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian. Teori-teori ini menjadi dasar konseptual dalam menganalisis data penelitian yang telah terkumpul. Penulis merujuk teori kepemimpinan pada buku Ramlan Surbakti

BAB III LANDSCAPE DESA LEREP DAN TATA SAMPAH DESA LEREP

Bab ketiga memuat gambaran secara umum Desa Lerep, kondisi geografis, demografi, kondisi sosial dan lain sebagainya. Selain itu, dalam bab ini juga akan menyampaikan gambaran terkait tata kelola sampah Desa Lerep

BAB IV GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA LEREP BAPAK SUMARIYADI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Pada bab ini menjelaskan secara rinci mengenai bagaimana gaya kepemimpinan Kepala Desa Lerep Bapak Sumariyadi dalam pengelolaan sampah.

BAB V DAMPAK KEPEMIMPINAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA LEREP

Bab ini akan membahas tentang berbagai temuan di lapangan terkait bagaimana dampak kepemimpinan dalam pengelolaan sampah di Desa Lerep

BAB VI PENUTUP

Bab ini, penulis menyajikan kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan tersebut merupakan rangkuman dari temuan-temuan baik bersifat teoritis maupun yang didapatkan dari data empiris di lapangan. Selain itu, penulis juga memberikan beberapa saran atau rekomendasi sebagai masukan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut atau sebagai solusi atas permasalahan yang dikaji kepada pemerintah ataupun

masyarakat agar dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penelitian berikutnya.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Kepemimpinan Ramlan Surbakti

1. Definisi Kepemimpinan Ramlan Surbakti

Ramlan Surbakti (1992) mempunyai pandangan tentang kepemimpinan merupakan hubungan yang bersifat dinamis antara pihak yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi dan pihak yang menerima pengaruh tersebut, serta mencakup keterampilan dalam memanfaatkan sumber daya pengaruh secara efektif. Kepemimpinan tidak hanya terbatas pada aspek formal, seperti jabatan atau kekuasaan, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial untuk menciptakan kesejahteraan publik. Pemimpin harus mampu membangun hubungan yang efektif dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, birokrasi, dan aktor politik lainnya, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas (Surbakti, 2010).

Kepemimpinan menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi tidak sebaliknya. Mirip dengan

kekuasaan, kepemimpinan adalah suatu hubungan antara pihak yang memiliki pengaruh dengan orang yang dipengaruhi, dan juga merupakan kemampuan menggunakan sumber pengaruh secara efektif. Berbeda dengan kekuasaan yang terdiri atas banyak jenis sumber pengaruh, kepemimpinan lebih menekankan pada kemampuan menggunakan persuasi untuk memengaruhi pengikut. Tidak seperti kekuasaan yang belum tentu menggunakan pengaruh untuk kepentingan bersama antara pemilik kekuasaan dan yang dikuasai, kepemimpinan merupakan upaya untuk melaksanakan suatu tujuan yang menjadi kepentingan bersama pemimpin maupun para pengikut (Surbakti, 1999).

Ramlan Surbakati (1999) menjelaskan kepemimpinan politik juga berbeda dengan elite politik, karena elite adalah orang-orang yang mempunyai nilai-nilai yang paling tinggi dalam masyarakat, seperti prestise, kekayaan, ataupun kewenangan. Memiliki kekuasaan politik berbeda dengan memiliki kepemimpinan politik, karena dua hal, yaitu sumber pengaruh yang digunakan dan tujuan penggunaan pengaruh. Sebutan politik dalam kepemimpinna politik menunjukkan kepemimpinan berlangsung dalam

suprastruktur politik (lembaga-lembaga pemerintahan), dan yang berlangsung dalam infrastruktur politik (partai politik dan organisasi kemasyarakatan). Oleh karena itu, pemimpin politik juga berbeda dengan kepala suatu instansi pemerintahan karena yang terakhir ini lebih menggunakan kewenangan dalam memengaruhi bawahannya, pemimpin politik lebih menggunakan hubungan-hubungan informal dan personal dalam menggerakkan pengikutnya untuk mencapai tujuan tertentu.

Kepemimpinan yang efektif harus didasarkan pada integritas, visi yang jelas, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Integritas merupakan fondasi utama yang memastikan bahwa pemimpin bertindak secara etis dan bertanggung jawab. Visi yang jelas membantu pemimpin untuk merumuskan arah dan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan kemampuan adaptasi memungkinkan pemimpin untuk merespons tantangan dan perubahan yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal (Surbakti, 2012). Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk membaca situasi, mengambil keputusan yang tepat, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai

demokrasi dan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik (Surbakti, 2010).

Ramlan Surbakti (2012) menjelaskan bahwa kepemimpinan harus adaptif terhadap keragaman budaya, agama, dan etnis yang ada. Pemimpin harus mampu membangun kohesi sosial dan menjaga persatuan bangsa, serta memastikan bahwa pembangunan berjalan secara inklusif dan berkeadilan. Tantangan modern, seperti globalisasi, konflik sosial, dan tuntutan *good governance* menuntut pemimpin untuk memiliki kemampuan analitis, komunikasi yang baik, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat (Surbakti, 2012).

2. Kategorisasi Kepemimpinan

Ramlan Surbakti mengkategorisasikan kepemimpinan ke dalam tiga aspek utama yang saling terkait, yaitu proses kepemimpinan dan karakter pemimpin, hasil proses kepemimpinan, dan sumber kekuasaan.

a. Proses Kepemimpinan dan Karakter Pemimpin

a) Proses Kepemimpinan

Proses kepemimpinan merujuk pada serangkaian aktivitas dan interaksi

yang dilakukan oleh pemimpin untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan mengkoordinasikan pengikut dalam mencapai tujuan bersama. Proses ini melibatkan beberapa langkah, yaitu pertama, pemimpin mempengaruhi pengikut melalui komunikasi, motivasi, dan arahan. Pengaruh ini dapat bersifat positif atau negatif tergantung pada cara pemimpin berinteraksi dengan tim. harus mampu menyampaikan visi, misi, dan arahan secara jelas kepada pengikutnya. Kedua, Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam proses kepemimpinan. Pemimpin harus mampu menyampaikan visi, misi, dan tujuan dengan jelas serta mendengarkan umpan balik dari anggota tim. Komunikasi dua arah ini penting untuk membangun kepercayaan dan keterlibatan. Ketiga, pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang ada dan masukan dari anggota tim. Proses pengambilan keputusan ini dapat melibatkan partisipasi anggota tim atau bersifat otoriter tergantung pada situasi

dan konteks yang dihadapi.

Ramlan Surbakti (1999) menjelaskan dalam proses kepemimpinan terdapat gaya kepemimpinan demokratis, yang menciptakan suatu sistem yang berlandaskan filosofi pembagian kekuasaan serta penghormatan terhadap nilai dan derajat kemanusiaan. Keberlangsungan demokrasi tidak sekedar ditentukan pada proses pemilihan pemimpin, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas pribadi pemimpin yang memegang tanggung jawab tersebut. Seorang pemimpin demokratis adalah mereka yang mampu mempertahankan dan memperbaiki nilai-nilai serta institusi demokrasi, termasuk memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dalam menggunakan kekuasaan. Demokrasi pada hakikatnya bukanlah sistem yang dikuasai oleh segelintir elit, melainkan sistem yang dijalankan oleh beberapa pemimpin yang bertanggung jawab.

b) Karakter Kepemimpinan

Berkaitan dengan proses

kepemimpinan, kepemimpinan dapat diklasifikasikan berdasarkan karakter pemimpin. Karakter yang dimaksud adalah tingkat aktivitas dalam menjalankan tugas dan tingkat penilaian terhadap tugas tersebut. Ramlan Surbakti (1992) membagi karakter kepemimpinan menjadi empat, yaitu pasif-positif, aktif-negatif, pasif-negatif, dan aktif-positif.

1) Kepemimpinan Pasif-Positif

Kepemimpinan pasif-positif adalah pemimpin memiliki penilaian tinggi terhadap tugasnya namun kurang aktif dalam melaksanakannya. Pemimpin tipe ini cenderung tidak terlalu aktif dalam mengambil inisiatif atau memimpin secara proaktif. Pemimpin lebih memilih untuk menunggu dan melihat situasi sebelum bertindak. Pemimpin pasif-positif sering kali menghindari konflik dan tidak terlalu agresif dalam mengejar tujuan serta pemimpin bersikap reaktif, merespons situasi ketika diperlukan atau diminta.

Meskipun pasif, pemimpin memiliki sikap yang positif terhadap peran dan tanggung jawabnya. Motivasi utama pemimpin pasif-positif adalah untuk mendapatkan penerimaan dan persetujuan dari orang lain. Pemimpin cenderung menghindari konflik dan lebih memilih untuk disukai oleh pengikutnya. Pemimpin seringkali merasa nyaman dalam peran yang tidak terlalu menuntut atau penuh tekanan.

Gaya kepemimpinan ini cenderung permisif dan tidak terlalu direktif. Pemimpin lebih suka mendelegasikan tugas dan memberikan kebebasan kepada orang lain untuk mengambil keputusan. Pemimpin pasif-positif seringkali menghindari tanggung jawab besar dan lebih memilih berada di belakang layar.

Gaya kepemimpinan pasif-positif memberikan dampak dalam kepemimpinan, di mana kepemimpinan pasif-positif dapat

menciptakan lingkungan yang harmonis, namun kurangnya inisiatif dan kepemimpinan yang proaktif dapat menyebabkan stagnasi atau kurangnya kemajuan dalam organisasi atau kelompok.

2) Kepemimpinan Aktif-Negatif

Kepemimpinan aktif-negatif adalah kepemimpinan yang ditandai dengan aktivitas yang tinggi namun dengan tingkat penilaian yang rendah terhadap tugasnya. Tipe kepemimpinan ini merupakan kepemimpinan yang menggabungkan tingkat energi atau aktivitas yang tinggi dengan orientasi negatif terhadap peran atau tanggung jawab. Pemimpin aktif-negatif memiliki energi yang besar dan cenderung sangat terlibat dalam tugas-tugas kepemimpinan. Mereka proaktif, ambisius, dan selalu berusaha mengambil inisiatif dalam berbagai situasi. Namun, di balik aktivitas mereka yang tinggi, pemimpin ini memiliki pandangan yang negatif

terhadap peran atau tanggung jawabnya. Mereka merasa tertekan, tidak puas, atau bahkan frustrasi dengan tugas-tugas kepemimpinan, dan motivasi mereka sering kali didasarkan pada rasa kewajiban, ambisi pribadi, atau keinginan untuk membuktikan diri, bukan karena kepedulian yang tulus terhadap orang lain atau organisasi.

Pemimpin aktif-negatif cenderung termotivasi oleh kebutuhan untuk mengontrol atau mendominasi orang lain. Mereka memiliki dorongan untuk mencapai kekuasaan atau prestise pribadi, bahkan jika itu mengorbankan kepentingan orang lain. Gaya kepemimpinan ini cenderung otoriter dan direktif, sering kali membuat keputusan secara sepihak dan kurang melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin menggunakan kekuasaan secara koersif, seperti memberikan hukuman atau sanksi untuk memastikan kepatuhan. Perilaku dan

sikap pemimpin aktif-negatif adalah keras kepala, tidak fleksibel, dan sulit menerima masukan atau kritik dari orang lain.

Meskipun pemimpin aktif-negatif dapat menghasilkan kinerja yang tinggi dalam jangka pendek karena fokus mereka yang kuat pada tujuan. Dalam jangka panjang, gaya kepemimpinan ini dapat menciptakan lingkungan yang penuh tekanan, tidak sehat, dan tidak harmonis. Pengikut merasa tertekan, tidak dihargai, atau bahkan dimanipulasi yang dapat menyebabkan menurunnya moral dan produktivitas.

3) Kepemimpinan Pasif-Negatif

Kepemimpinan pasif-negatif adalah pemimpin cenderung pasif dan memiliki penilaian rendah terhadap tugasnya. pemimpin pasif-negatif cenderung tidak terlalu terlibat dalam tugas-tugas kepemimpinan dan menunjukkan sikap yang kurang antusias atau bahkan apatis terhadap peran mereka. Pemimpin lebih

memilih untuk menghindari tanggung jawab dan mengambil pendekatan yang reaktif, hanya bertindak ketika dipaksa oleh situasi atau tekanan eksternal. Meskipun mereka memiliki posisi kepemimpinan, pemimpin pasif-negatif sering kali merasa tidak nyaman dengan peran tersebut dan melihatnya sebagai beban daripada kesempatan untuk berkontribusi.

Pemimpin pasif-negatif memiliki motivasi yang rendah untuk memimpin dan cenderung tidak memiliki visi atau tujuan yang jelas. Mereka memegang jabatan kepemimpinan karena faktor eksternal, seperti warisan, hubungan keluarga, atau tekanan politik, bukan karena keinginan atau kemampuan pribadi. Orientasi negatif mereka terhadap peran kepemimpinan sering kali tercermin dalam sikap mereka yang kurang peduli terhadap kebutuhan atau harapan pengikut. Pemimpin cenderung menghindari konflik dan mengambil keputusan yang sulit, lebih

memilih untuk menunda atau mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain. Gaya kepemimpinan mereka cenderung permisif dan tidak tegas yang dapat menciptakan ketidakpastian dan kebingungan dalam organisasi atau kelompok.

Dampak kepemimpinan pasif-negatif baik bagi organisasi maupun pengikut adalah kurangnya inisiatif dan kepemimpinan yang proaktif dapat menyebabkan stagnasi, ketidakefisien, dan kegagalan dalam mencapai tujuan. Pengikut merasa tidak termotivasi atau tidak diarahkan dengan jelas, yang dapat menurunkan moral dan produktivitas. Dalam konteks politik, seorang pemimpin pasif-negatif adalah seorang pejabat yang hanya memenuhi peran secara simbolis tanpa memberikan kontribusi yang berarti atau mengambil keputusan yang berdampak. Mereka lebih fokus pada menjaga status dan menghindari risiko daripada mengatasi tantangan atau memajukan kepentingan publik.

4) Kepemimpinan Aktif-Positif

Kepemimpinan aktif-positif adalah kepemimpinan yang ideal di mana pemimpin aktif menjalankan tugas dan memiliki penilaian yang tinggi terhadap tugas tersebut. Pemimpin aktif-positif adalah pemimpin yang energik, proaktif, dan terlibat dalam tugas-tugas kepemimpinan. Pemimpin memiliki visi dan misi yang jelas dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin aktif-positif tidak hanya aktif dalam mengambil inisiatif tetapi juga memiliki sikap yang optimis dan antusias terhadap peran mereka. mereka melihat kepemimpinan sebagai kesempatan untuk berkontribusi secara positif dan membuat perbedaan, baik bagi organisasi maupun masyarakat.

Pemimpin aktif-positif memiliki motivasi yang kuat untuk memimpin dan cenderung termotivasi oleh keinginan untuk melayani dan memberikan dampak positif.

Pemimpin memiliki integritas yang tinggi dan konsisten dalam menjalankan nilai-nilai yang mereka terapkan. Pemimpin ini juga memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain, menciptakan lingkungan yang kolaboratif dan mendukung. Mereka cenderung terbuka terhadap masukan dan kritik, serta mampu mengelola konflik dengan cara yang konstruktif. Gaya kepemimpinan ini partisipatif dan inklusif, melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan dan mendorong partisipasi aktif dari pengikutnya.

Dampak dari kepemimpinan aktif-positif baik bagi organisasi maupun pengikut adalah pemimpin mampu menciptakan lingkungan kerja yang dinamis, inovatif dan berorientasi pada hasil. Pemimpin mendorong pertumbuhan dan perkembangan individu serta organisasi, dan mampu mengatasi tantangan dengan cara yang efektif. Dalam konteks politik,

pemimpin tidak hanya bekerja keras untuk mencapai tujuan politik tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan rakyat dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemimpin mampu membangun kepercayaan dan legitimasi melalui tindakan mereka yang konsisten dan berorientasi pada kepentingan publik.

b. Hasil Proses Kepemimpinan

Ramlan Surbakti (1999) menjelaskan hasil proses kepemimpinan merujuk pada dampak yang dihasilkan dari tindakan, keputusan, dan interaksi seorang pemimpin dengan pengikutnya. Hasil ini mencerminkan sejauh mana tujuan organisasi atau kelompok tercapai, serta bagaimana kepemimpinan tersebut memengaruhi dinamika internal dan eksternal. Ramlan. Ramlan Surbakti menekankan bahwa hasil proses kepemimpinan tidak hanya terbatas pada pencapaian tujuan formal, tetapi juga mencakup aspek-aspek, seperti kepuasan pengikut, perubahan sosial, dan stabilitas

organisasi.

Hasil utama dari proses kepemimpinan adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau kelompok. Pemimpin yang efektif mampu mengarahkan sumber daya, memotivasi pengikut, dan mengambil keputusan strategis untuk memastikan bahwa tujuan tersebut tercapai. Pencapaian tujuan ini dapat diukur melalui indikator kinerja, seperti peningkatan produktivitas, pertumbuhan organisasi, atau keberhasilan program-program tertentu.

Hasil lain dari proses kepemimpinan adalah tingkat kepuasan dan motivasi pengikut. Pemimpin yang baik mampu menciptakan lingkungan yang mendukung, menghargai kontribusi pengikut, dan memenuhi kebutuhan emosional serta profesional pengikutnya. Kepuasan pengikut ini tidak dapat meningkatkan loyalitas, komitmen, dan kinerja mereka dalam jangka panjang. Ramlan Surbakti menekankan bahwa kepuasan pengikut adalah indikator penting dari keberhasilan kepemimpinan. Proses kepemimpinan yang efektif juga dapat menghasilkan perubahan positif dalam

organisasi atau masyarakat. Pemimpin yang visioner mampu mengidentifikasi kebutuhan akan perubahan dan memimpin transformasi tersebut. Perubahan ini tidak dapat berupa inovasi dalam kebijakan, peningkatan kualitas layanan, atau reformasi struktural yang mendukung kemajuan organisasi atau masyarakat.

Hasil lain dari proses kepemimpinan adalah terciptanya stabilitas dan ketertiban dalam organisasi atau kelompok. Pemimpin yang baik mampu mengelola konflik, menjaga harmoni, dan menciptakan lingkungan yang aman dan teratur. Stabilitas ini penting untuk memastikan bahwa organisasi dapat berfungsi secara efektif dan mencapai tujuannya tanpa gangguan yang signifikan.

Ramlan Surbakti (1999) menjelaskan bahwa dalam hasil proses kepemimpinan terdapat beberapa gaya kepemimpinan yaitu:

a. Kepemimpinan Ekstrimis

Kepemimpinan ekstrimis berusaha untuk menghancurkan sistem lama secara total dan menggantikannya dengan tatanan baru. Keadaan ini disebabkan karena organisasi politik yang dibangun

oleh kelompok ekstrimis memiliki struktur yang kokoh, didukung oleh anggota yang taat, disiplin, serta tidak segan menggunakan cara-cara kekerasan untuk mewujudkan tujuan mereka.

Kepemimpinan ekstrimis memiliki keyakinan yang kuat dan tidak fleksibel terhadap suatu ideologi, baik politik, agama, atau sosial. Pemimpin cenderung menolak kompromi dan melihat dunia dalam sudut pandang hitam putih, di mana mereka berada di pihak yang “benar” dan lawan mereka adalah “musuh” yang harus dikalahkan. Pemimpin ekstrimis sering kali menggunakan pendekatan konfrontatif, termasuk kekerasan, intimidasi, atau tekanan untuk mencapai tujuan mereka. Mereka memanfaatkan ketakutan atau kemarahan pengikutnya untuk memobilisasi dukungan. Pemimpin ekstrimis cenderung bersifat otoriter, di mana pemimpin memiliki kendali penuh atas keputusan dan tindakan kelompok. Mereka tidak mentolerir perbedaan pendapat atau kritik dari dalam kelompok.

b. Kepemimpinan Moderat

Kepemimpinan moderat memiliki kecenderungan untuk mempertahankan beberapa unsur dari sistem lama, baik nilai- nilai maupun figure pemimpinnya, terutama yang dinilai masih relevan dengan sistem yang baru. Organisasi yang dipimpin oleh kelompok moderat biasanya tidak memiliki struktur yang terlalu kuat, dengan pengikut yang kurang patuh dan kurang disiplin. Mereka lebih mengedepankan pendekatan dialog dibandingkan penggunaan kekuasaan atau tindakan tegas untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pemimpin moderat cenderung mengambil pendekatan yang seimbang dan hati-hati dalam membuat keputusan. Mereka menghindari tekanan yang ekstrem atau radikal dan lebih memilih solusi yang realistis dan dapat diterima oleh berbagai pihak. Mereka mampu menimbang berbagai perspektif sebelum mengambil keputusan, memastikan bahwa keputusan tersebut adil dan berkelanjutan. Pemimpin moderat

mendorong partisipasi aktif dari semua stakeholders dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin ini menghargai masukan dan kritik dari orang lain, serta berusaha menciptakan lingkungan yang inklusif. Mereka tidak memonopoli kekuasaan, tetapi membaginya dengan orang lain melalui proses yang demokratis dan transparan.

Pemimpin moderat memiliki sikap toleran terhadap perbedaan pendapat, keyakinan, dan latar belakang. Mereka mempromosikan dialog sebagai cara untuk menyelesaikan konflik dan mencapai tujuan. Pemimpin moderat menghindari retorika yang memecah belah dan lebih memilih bahasa yang mempersatukan. Pemimpin moderat bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan situasi. Mereka tidak kaku dalam pendekatan mereka dan terbuka untuk menyesuaikan strategi jika diperlukan. Mereka memahami bahwa konteks sering kali menentukan pendekatan yang paling efektif. Pemimpin moderat lebih memilih

penyelesaian konflik melalui cara-cara damai, seperti negosiasi, mediasi.

- c. Kepemimpinan wiraswasta (*public entrepreneurship*).

Pemimpin wiraswasta merupakan pemimpin yang mampu menciptakan atau mengembangkan organisasi publik secara signifikan, sehingga mampu mengubah cara distribusi sumber daya publik yang sifatnya terbatas. Ramlan Surbakti (1999) menginterpretasikan kepemimpinan wiraswasta sebagai bentuk kepemimpinan yang menggabungkan karakteristik kewirausahaan dengan kemampuan memimpin. Kepemimpinan wiraswasta sering dikaitkan dengan inovasi, pengambilan risiko, dan kemampuan untuk mengidentifikasi serta memanfaatkan peluang dalam konteks bisnis atau organisasi.

Pemimpin wiraswasta memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dan menghasilkan ide-ide inovatif. Mereka tidak takut untuk mencoba hal-hal baru dan berbeda dari yang sudah ada. Pemimpin wiraswasta sangat fokus pada

pencapaian hasil. Mereka menetapkan tujuan yang jelas dan bekerja keras untuk mencapainya. Pemimpin wiraswasta memiliki kemampuan untuk membangun dan memelihara jaringan yang kuat dengan berbagai stakeholders. Mereka memahami pentingnya kolaborasi dan kemitraan dalam mencapai tujuan.

c. Sumber Kekuasaan

Menurut Ramlan Surbakti, sumber kekuasaan merujuk pada dasar atau fondasi yang memungkinkan seorang pemimpin atau aktor politik memengaruhi orang lain. Kekuasaan tidak hanya berasal dari posisi formal, tetapi juga dari berbagai sumber lain yang bersifat formal maupun informal. Kekuasaan formal, misalnya berasal dari posisi atau jabatan resmi yang diakui secara hukum dan sosial yang memiliki hak untuk memerintah dan mengambil keputusan. Kekuasaan informal adalah jenis kekuasaan yang tidak berasal dari posisi atau jabatan resmi, tetapi dari faktor-faktor seperti kharisma, keahlian, hubungan personal, atau nilai-nilai moral. Kekuasaan ini memiliki dampak yang signifikan dalam memengaruhi

orang lain dan sering kali muncul ketika kekuasaan formal tidak efektif atau tidak ada. Ramlan Surbakti membagi gaya kepemimpinan berdasarkan sumber kekuasaan yaitu kepemimpinan rasional, kepemimpinan tradisional, dan kepemimpinan kharismatik.

a. Kepemimpinan Rasional

Kepemimpinan rasional bersumberkan kewenangan legal yang beranjak dari legalitas pola-pola peraturan normatif, dan hak orang-orang yang terpilih memiliki kewenangan berdasarkan peraturan tersebut untuk mengeluarkan perintah. Kepemimpinan rasional merupakan jenis kepemimpinan yang didasarkan pada prinsip-prinsip legal rasional, di mana kekuasaan diperoleh melalui mekanisme yang diatur oleh hukum dan norma.

Pemimpin rasional menggunakan data, fakta dan analisis yang mendalam sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Mereka menghindari keputusan yang emosional atau implusif. Pemimpin rasional

memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Pemimpin fokus pada pencapaian tujuan tersebut dengan cara yang efisien dan efektif. Selain itu, pemimpin rasional menggunakan pendekatan yang sistematis dan terstruktur dalam mengelola tugas dan proyek. Mereka membuat rencana yang detail dan mengikuti proses yang telah ditetapkan. Pemimpin ini memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Kepemimpinan Tradisional

Kepemimpinan tradisional adalah kepemimpinan yang legitimasinya bersumber pada tradisi, adat istiadat, dan kepercayaan masyarakat terhadap garis keturunan atau kelompok sosial tertentu. Ramlan Surbakti menginterpretasikan kepemimpinan tradisional sebagai bentuk kepemimpinan yang didasarkan

pada nilai-nilai, norma, dan praktik yang telah lama ada dalam suatu masyarakat atau budaya. Kepemimpinan tradisional serinh kali dikaitkan dengan sistem kepemimpinan yang bersifat turun temurun, hierarkis, dan didasarkan pada legitimasi yang berasal dari adat atau tradisi.

c. Kepemimpinan Kharismatik

Kepemimpinan kharismatik adalah kepemimpinan yang muncul karena adanya kepercayaan dan kekaguman masyarakat terhadap kualitas pribadi seorang pemimpin yang dianggap luar biasa. Pemikiran Ramlan Surbakti terkait kepemimpinan kharismatik merujuk pada kemampuan seorang pemimpin untuk memengaruhi pengikutnya melalui daya tarik, kharisma, dan kemampuan untuk menginspirasi. Pemimpin kharismatik sering kali muncul dalam situasi krisis dan mampu memobilisasi massa untuk mencapai perubahan sosial atau politik.

B. Konsep Pengelolaan Sampah

1. Pengertian Sampah

Dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, definisi sampah yaitu sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut definisi *World Health Organization* (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Dalam kamus Lingkungan Hidup, sampah memiliki dua arti, pertama bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian, barang rusak atau bercacat dalam pembikinan (manufaktur) atau materi berlebihan atau ditolak atau buangan. Kedua, *waste* (sampah atau limbah) proses teratur dalam membuang bahan tak berguna atau tak diinginkan.

Pengertian lainnya, sampah merupakan benda maupun barang yang tidak dipakai atau tidak diinginkan yang mengharuskan untuk dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia (Manik, 2007). Sampah dapat berasal dari berbagai macam seperti rumah tangga, industri, perkantoran, pertanian,

peternakan, pertambangan, dan kegiatan manusia yang lainnya. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sampah yaitu benda atau bahan yang berasal dari kegiatan manusia serta tidak memiliki nilai, dan tidak digunakan lagi yang mengharuskan untuk dibuang.

2. Konsep Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang merupakan sisa dari kegiatan manusia harus dikelola agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, serta berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Dalam mewujudkan kegiatan pengelolaan sampah, masyarakat dan para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya diharapkan dapat menggunakan bahan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat dimanfaatkan kembali, dapat didaur ulang, dan

mudah diurai oleh proses alam. Penanganan sampah adalah kegiatan yang diawali dengan pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah.

Langkah berikutnya adalah mengumpulkan dan memindahkan sampah dari sumbernya ke tempat penampungan sementara, serta mengangkut sampah dari tempat penampungan tersebut ke lokasi pemrosesan akhir. Setelah sampah terkumpul di tempat pemrosesan akhir, pengelolaan dilakukan dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah, serta/atau memprosesnya untuk mengembalikan hasil pengolahan ke lingkungan dengan aman. Secara umum, pengelolaan sampah di daerah perkotaan dilakukan melalui tiga tahap kegiatan, yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir. Alfiandra (2009) menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses pengelolaan sampah sebagai berikut:

a) Pengumpulan

Pengelolaan sampah dari lokasi asalnya hingga ke tempat pembuangan sementara sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Pada tahap ini,

berbagai sarana seperti tong sampah, bak sampah, peti kemas, gerobak dorong, atau tempat pembuangan sementara digunakan. Pengumpulan biasanya melibatkan sejumlah tenaga kerja yang bertugas mengumpulkan sampah pada periode waktu tertentu.

b) Pengangkutan

Tahap ini melibatkan pengangkutan sampah menggunakan alat transportasi tertentu menuju tempat pembuangan akhir atau pengolahan. Pada tahap ini, tenaga kerja juga terlibat dalam mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA) dalam periode waktu tertentu.

c) Pembuangan Akhir

Pada tahap ini, sampah akan diproses melalui metode fisik, kimia, atau biologis hingga seluruh proses selesai.

Departemen Pekerjaan Umum (2007) menjelaskan bahwa prinsip 3R terdiri dari tiga komponen sebagai berikut:

- (a) Prinsip pertama adalah *reduce* atau pengurangan sampah, yang merupakan upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan di sumbernya, bahkan sebelum sampah tersebut dihasilkan. Setiap individu atau sumber dapat melakukan pengurangan sampah dengan mengubah pola konsumsi, yaitu beralih dari kebiasaan boros yang menghasilkan banyak sampah menjadi lebih hemat dan efisien, sehingga hanya menghasilkan sedikit sampah.
- (b) Prinsip kedua adalah *reuse*, yang berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah tanpa melalui proses pengolahan. Contohnya termasuk menggunakan kertas bolak-balik, memanfaatkan botol bekas minuman sebagai tempat air, dan lain-lain. Dengan cara ini, reuse dapat memperpanjang masa pakai barang melalui perawatan dan

pemanfaatan kembali secara langsung.

- (c) Prinsip ketiga adalah *recycle*, yang berarti mendaur ulang bahan yang sudah tidak terpakai menjadi bahan atau barang baru setelah melalui proses pengolahan. Beberapa jenis sampah dapat didaur ulang secara langsung oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi dan alat yang sederhana, seperti mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, keset kaki, dan sebagainya, atau mengubah sisa makanan dari dapur menjadi kompos.

Dari berbagai definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengolah sampah menjadi bentuk lain yang bermanfaat dan tidak membahayakan lingkungan. Dalam penelitian ini, pengelolaan sampah yang dimaksud mencakup aktivitas yang dilakukan di tingkat rumah tangga,

seperti mengurangi penggunaan bahan yang sulit terurai, memilah sampah, memindahkan sampah dari sumbernya ke tempat penampungan sementara, memanfaatkan kembali sampah, serta kegiatan kebersihan seperti gotong royong untuk kerja bakti di lingkungan tempat tinggal.

3. Sumber dan Timbulan Sampah

Sampah dapat berasal dari berbagai sumber yang memiliki aktivitas yang berbeda-beda. Menurut Tchobanoglous et al. (1993), sumber sampah dalam suatu komunitas umumnya terkait dengan penggunaan lahan dan zonasi, yang mencakup kategori sumber sampah sebagai berikut:

- Perumahan
- Komersial
- Institusional
- Konstruksi dan pembongkaran
- Fasilitas umum perkotaan
- Lokasi instalasi pengolahan
- Industri

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah pada sampah yang dihasilkan dari institusi. Sampah di institusi biasanya berasal dari sekolah,

rumah sakit, penjara, pusat pemerintahan, dan lain-lain. Jenis sampah yang dihasilkan mirip dengan yang dihasilkan di daerah komersial, meliputi kertas, kardus, plastik, kayu, sisa makanan, kaca, logam, limbah berbahaya dan beracun, serta lainnya.

BAB III

LANDSCAPE DESA LEREP DAN TATA KELOLA SAMPAH DESA LEREP

A. Gambaran Umum Desa Lerep

1. Sejarah Desa Lerep

Nama Lerep pertama kali ditemukan oleh seorang kyai bernama Kyai Kadilungu, yang diyakini oleh para sesepuh sebagai seorang wali. Pada saat itu, terjadi peperangan antara Sunan Hasan Munadi dari daerah Nyatnyono melawan Ki Hajar Buntit, yang dikenal sebagai tokoh kafir pada masa itu. Sunan Hasan Munadi sempat beristirahat di suatu tempat yang tenang dan indah, yang kini dikenal sebagai Dusun Lerep. nama “Lerep” sendiri memiliki makna ayem dan keleberan yang oleh masyarakat setempat diartikan sebagai ketentraman dan ketenangan.

Kerto Amijoyo adalah tokoh yang terkenal karena sikapnya yang ramah, sopan, dan suka menolong. Pada tahun 1942, beliau memimpin wilayah Tegalrejo, Karang Tengah, yang sekarang mencakup daerah Kretek, Lorog, dan Karangbolo. Karto Amijoyo kemudian melihat wilayah atas, yaitu Soka, Lerep, dan Indrokilo, yang saat itu belum memiliki pemimpin. Pada tahun 1943,

beliau berinisiatif mempersatukan wilayah atas dengan wilayah Gorno. Karto Amijoyo mengumpulkan warga dari kedua wilayah tersebut dan disepakati sebagai pemimpin (Kepala Desa) pertama untuk wilayah atas dan Gorno. Setelah kesepakatan itu, wilayah tersebut dinamai Desa Lerep karena merupakan wilayah terluas dan menjadi pusat kediaman utama (Keprabon).

Dalam jejak Sejarah Desa Lerep, Karto Amijoyo tercatat menjadi lurah pertama yang memimpin Desa Lerep pada tahun 1920 hingga 1955. Tentu sebelum Karto Amijoyo menjadi lurah yang lain, tetapi tidak ada jejak Sejarah yang ditemukan. Pada tahun 1930-an, ketika Karto Amijoyo pada saat itu menjadi pemimpin Gorno yang membawahi Dusun Tegalrejo, Karang Tengah yang saat ini menjadi nama Dusun Kretek, Dusun Lorog, dan Dusun Karangbolo bergabung dengan Desa Lerep yang terdiri dari Dusun Soka, Dusun Lerep, dan Dusun Indrokilo yang pada saat itu mengalami kekosongan pemimpin. Pada tahun 1980-an, terdapat kawasan perumahan Kretek bernama Perumahan Mapagan yang menjadi Dusun Mapagan pada tahun 2013. Setelah Karto Amijoyo, kepala desa diganti oleh Yusman pada tahun 1955-1963, kemudian diganti

Suhari pada tahun 1963-1973, Sunarno pada tahun 1973-1991, Suwarno pada tahun 1991-1999, Sofiyanto pada tahun 1999-2007, dan Sumariyadi pada tahun 2007-Sekarang.

2. Visi Misi Desa Lerep

Pemerintah Desa Lerep menggaungkan visi misi yang dimiliki yaitu:

Dengan semangat kegotongroyongan mewujudkan masyarakat Desa Lerep yang bertaqwa, aman, tentram, Sejahtera, bermartabat, dan guyub rukun santosa

Dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, dirumuskan serangkaian misi sebagai langkah yang akan dijalankan. Misi ini memungkinkan sebagai penyedia produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk. Berikut adalah misi yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Desa Lerep:

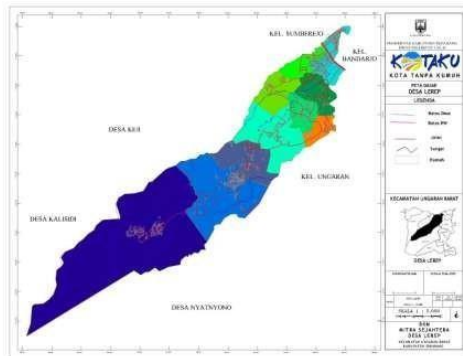
- a. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa menuju pelayanan prima (*smart service*), transparansi anggaran serta melayani dengan sepenuh hati;
- b. Pemantapan kehidupan beragam menuju masyarakat Desa Lerep yang semakin bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing;

- c. Pemantapan slogan guyub rukun dalam membina persatuan dan kesatuan masyarakat desa;
- d. Optimalisasi pendayagunaan potensi ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pengelolaan desa wisata;
- e. Optimalisasi pembangunan partisipatif berbasis masyarakat bidang infrastruktur, ekonomi, kesehatan, pendidikan, keagamaan, sarana olahraga dan bidang sosial budaya;
- f. Pemantapan upaya mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- g. Optimalisasi upaya pelestarian lingkungan hidup untuk kehidupan yang aman dan aman;
- h. Pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan sosial masyarakat kelompok rentan, warga miskin, lansia, yatim/piatu, difabel dan wanita hamil;
- i. Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat desa yang tangguh dan tanggap bencana.

3. Kondisi Geografis Desa Lerep

Desa lerep merupakan salah satu desa di Kabupaten Semarang yang memiliki ketinggian lebih kurang 340-910 mdpl. Desa ini merupakan desa yang berada di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Desa Lerep terletak pada titik geografis $110^{\circ}21'45''$ - $110^{\circ}23'45''$ BT dan $07^{\circ}06'30''$ - $07^{\circ}08'50''$ LS. Bentuk topografi desa 217,12 Ha datar, 209,77 Ha bergelombang, 236, 36 Ha curam, 109,07 Ha sangat curam. Suhu desa biasanya mecapai lebih kurang $24-34^{\circ}\text{C}$. Orbitan atau jarak dari Pemerintahan Desa mencapai lebih kurang 0,9 km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan, lebih kurang 1,85 km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten, lebih kurang 18 km, lebih kurang 471 km dari Ibu Kota Negara. Desa lerep memiliki 8 dusun, yaitu Dusun Indrokilo, Dusun Lerep, Dusun Soka, Dusun Tegalrejo, Dusun Lorog, Dusun Karangbolo, dan Dusun Mapagan.



Gambar 3. 1Peta Desa Lerep

Sumber: Website Desa Lerep

Kemudian, Secara geografis Desa Lerep memiliki batas wilayah, yaitu:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Bandarjo dan Sumur Rejo;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Perhutani dan Nyatnyono;
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Nyatnyono dan Ungaran;
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Keji dan Kalisidi.

Desa Lerep memiliki luas wilayah sebesar 682,32 Ha yang digunakan untuk area persawahan sebesar 21,93% atau 149,62 Ha serta sisanya

78,07% atau 532,07 Ha adalah area bukan persawahan. Luas lahan sawah dibagi menjadi sawah irigasi teknis seluas 10,26 Ha atau 6,86% dari total luas sawah, sawah irigasi setengah teknis 33,29 Ha atau 22,25% dari total luas sawah, sawah tadah hujan 106,07 Ha atau 70,89% dari total luas sawah. Sementara untuk lahan area bukan sawah yang meliputi permukiman seluas 38,13 Ha atau 5,59% dari total luas wilayah, tanah pemakaman 82,28 Ha atau 1,21% dari total luas wilayah, pekarangan dengan 46,45 Ha atau 6,81% dari total luas wilayah, area taman dengan luas 2,71 Ha atau 0,32% dari total luas wilayah, tanah untuk kantor dengan luas 5,23 Ha atau 0,775% dari total wilayah dan tanah prasarana umum lainnya seluas 3,36 Ha atau 0,49% dari total luas wilayah.

Tabel 3. 1 Luas Wilayah Dusun Desa Lerep

No.	Dusun	Luas (Ha)	%
1	Indrokilo	119,42	17,50
2	Lerep	161,22	23,63
3	Soka	108,56	15,91
4	Tegalrejo	54,28	7,96
5	Lorog	59,71	8,75
6	Karangbolo	32,57	4,77
7	Kretek	65,14	9,55

8	Mapagan	81,42	11,93
Jumlah		682,32	100

Sumber: Dokumen Desa Lerep

Berdasarkan tingkat kelandaiannya, Desa Lerep terbagi menjadi empat kategori, yaitu wilayah datar (kemiringan 0-2%) seluas 127,12 Ha (18,63%); wilayah gelombang (kemiringan 2-15%) seluas 209,77 Ha (34,64%); dan wilayah sangat curam (kemiringan >40%) seluas 109,07 Ha (15,99%). Desa Lerep yang terletak di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, termasuk daerah yang rawan bencana alam. Wilayah ini memiliki potensi tinggi untuk mengalami bencana, seperti kawasan rawan letusan gunung api, kawasan rawan longsor, serta kawasan rawan banjir.

a. Rawan letusan gunung api

Berdasarkan analisis peta bencana yang disusun oleh Direktorat Vulkanologi Bandung, wilayah di sekitar Gunung Ungaran, meskipun telah lama tidak menunjukkan aktivitas vulkanik, tetap memiliki potensi bahaya geologi yang signifikan. Zona rawan bencana gunung api mencakup kawasan yang diprediksi akan terkena dampak langsung dari fenomena

geologis seperti luncuran awan panas, aliran lahar, dan terjangan material vulkanik.

Secara spesifik, beberapa dusun yang terletak di lereng dan area sekitar puncak Gunung Ungaran, meliputi Dusun Indrokilo, Dusun Lerep, Dusun Soka, Dusun Tegalrejo, dan Dusun Lorog diidentifikasi sebagai wilayah dengan resiko tinggi terhadap potensi bencana geologis berupa luncuran awan panas, lahar, dan jatuhnya material.

b. Rawan Tanah Longsor

Kawasan yang berpotensi mengalami longsor adalah area dengan karakteristik tanah yang mudah bergerak atau longsor. Hal ini terjadi karena adanya zona tanah yang bergerak dengan struktur tanahnya yang tidak stabil, di mana pergeseran atau patahan batuan induk mengakibatkan ketidakstabilan permukaan tanah. Di Desa Lerep, wilayah rawan bencana tanah longsor tersebar di tiga dusun, yaitu Dusun Indrokilo, Dusun Lerep, dan Dusun Soka.

c. Rawan Banjir

Daerah rawan banjir adalah wilayah yang memiliki risiko tinggi mengalami genangan air yang berlangsung lebih dari enam jam selama musim hujan dalam kondisi normal. Di Desa Lerep, zona yang berpotensi terkena banjir meliputi area sekitar beberapa jembatan, seperti jembatan Kaliplilit Karangbolo, jembatan Kalibelan Kretek, dan Mapagan. Selain lokasi tersebut, beberapa dusun lainnya seperti Soka, Kretek, dan Mapagan juga rentan terhadap banjir yang disebabkan oleh pola pemukiman dan penurunan kualitas lingkungan.

4. Kondisi Sosial Desa Lerep

Desa lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang mempunyai ketinggian kurang lebih 310-940 meter di atas permukaan laut. Posisinya yang berada di area lereng gunung menjadikan desa ini dikenal luas dengan panorama persawahan dan Kawasan perhutannya yang membentang. Secara lokasi, Desa Lerep memiliki jarak tempuh yang strategis, yaitu sekitar 0,9 km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan, 1,85 km dari

Pusat Pemerintahan Kabupaten, 18 km dari Pusat Provinsi, dan 471 km dari Ibu Kota Negara.

Masyarakat Desa Lerep merupakan masyarakat agraris, karena didominasi area hutan dan persawahan menjadikan mayoritas penduduknya hidup sebagai masyarakat agraris. Meski demikian, mata pencaharian penduduk Desa Lerep tidak terbatas pada sektor pertanian dan perkebunan saja. Kedekatan lokasi desa dengan kawasan industri di Ungaran telah membuka peluang kerja bagi warga untuk bekerja sebagai buruh pabrik dan karyawan di sektor swasta. Berikut terdapat table mata pencaharian atau jenis pekerjaan warga Desa Lerep:

Tabel 3. 2 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Lerep

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pensiunan	170
2	POLRI	50
3	Karyawan Swasta	3.869
4	Buruh	997
5	Wiraswasta	1.735
6	PNS	434
7	Perdagangan	75
8	Karyawan BUMN	23
9	Jasa	53
10	TNI	31

11	Petani/Pekebun	345
12	Karyawan BUMD	1
13	Guru/Dosen	117

Sumber: Website Resmi Desa Lerep

Kondisi kependudukan Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang pada tahun 2024 berjumlah 13.498 jiwa dengan jumlah laki-laki 6.819 dan jumlah perempuan 6.679. Meskipun terjadi peningkatan penduduk, pertumbuhan penduduk di Desa Lerep berlangsung dalam tingkat yang terkendali dengan baik. Berikut terdapat data jumlah penduduk Desa Lerep:

Tabel 3. 3 Jumlah Data Kependudukan Desa Lerep

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	6.819 Orang
2	Perempuan	6.679 Orang

Sumber: Dokumen Desa Lerep

Berdasarkan data di atas mengenai tingkat kependudukan di Desa Lerep, dapat memberikan tantangan sekaligus peluang bagi sistem Pendidikan. Dengan populasi yang besar, kebutuhan akan pendidikan menjadi semakin mendesak, karena setiap individu memerlukan akses yang memadai untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Oleh karena itu,

pendidikan menjadi aspek penting dalam menentukan kualitas hidup suatu masyarakat. Tingkat pendidikan juga berperan penting dalam membentuk kemampuan masyarakat. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang dimiliki, semakin besar pula kontribusi yang dapat diberikan kepada lingkungan sekitarnya, sehingga kualitas sumber daya manusia pun akan semakin meningkat. Berikut tingkatan pendidikan di Desa Lerep:

Tabel 3. 4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Lerep

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	2.632
2	Belum Tamat SD/Sederajat	850
3	Tamat SD/Sederajat	3.170
4	SLTP/Sederajat	2.349
5	SLTA/Sederajat	2.993
6	Diploma I/II	28
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	339
8	Diploma IV/Strata I	1.027
9	Strata II	108
10	Strata III	2
Jumlah		13.498

Sumber: Website Desa Lerep

Meskipun data menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Lerep merupakan lulusan SLTA/Sederajat, hal ini tidak menjadi

penghalang bagi kemajuan dan kesejahteraan desa. Semangat gotong royong dan kerja keras masyarakat telah berhasil mendorong perkembangan desa, khususnya dalam aspek pemberdayaan masyarakat dan peningkatan perekonomian, tanpa memandang latar belakang pendidikan.

Penduduk Desa Lerep mempunyai peran penting dalam mendukung aspek pembangunan menuju desa yang lebih maju. Untuk mencapai pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang pada periode 2020- 2025, perencanaan pembangunan desa dirancang melalui program “Gerbang Lentera” (Gerakan Pembangunan Desa Lerep Aman Tenteram dan Sejahtera). Sedangkan keterpaduan pembangunan antar urusan dilaksanakan dalam rangka:

- a. Penanggulangan kemiskinan (*pro poor*);
- b. Menciptakan dan memperluas lapangan kerja (*pro job*);
- c. Memacu pertumbuhan ekonomi (*pro growth*);
- d. Mendukung kelestarian lingkungan

(pro environment);

- e. Mendukung pelayanan prima (*pro public service*).

Dalam rangka mencapai target pembangunan desa maju periode 2020-2025, desa memfokuskan upayanya pada perbaikan tata kelola pemerintahan, meliputi pengembangan sumber daya manusia aparatur, penguatan kelembagaan seperti BUMDes, dan penyempurnaan sistem manajemen pemerintahan. Di samping itu, dilakukan upaya pemberdayaan terhadap lembaga desa dan warga setempat, serta pengembangan peluang usaha yang memanfaatkan potensi lokal

5. Kondisi Ekonomi Desa Lerep

Desa Lerep mencatatkan persentase kemiskinan di bawah 25% pada tahun 2018, dengan jumlah keluarga miskin yang terindeksifikasi sebanyak 79. Data yang diperoleh dari situs sidesa.jatengprov.go.id menunjukkan bahwa pada tahun 2020, tingkat kesejahteraan sosial di Desa Lerep berada pada Desil 1, dengan angka 1,26.000 yang dihitung berdasarkan jumlah keluarga per individu. Tingkat kesejahteraan ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap kemajuan desa, terutama dalam upaya mengurangi kesenjangan

sosial dan kemiskinan di Desa Lerep. Dari segi tempat tinggal, mayoritas masyarakat Desa Lerep mempunyai rumah sendiri, dengan persentase mencapai 93,2%, yang setara dengan 626 kepala rumah tangga. Sementara itu, warga yang tinggal dengan status kontrak atau sewa mencapai 3,4% atau sebanyak 23 kepala keluarga, dan mereka yang tinggal tanpa sewa berjumlah 3,0% yang terdiri dari 20 kepala keluarga.

6. Kondisi Politik Desa Lerep

Pada masa Orde Lama, tepatnya tahun 1955, Indonesia mulai menerapkan sistem Pemilihan Umum. Periode ini menandai awal kemunculan berbagai partai politik, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Umat Islam Masyumi Suro, dan Partai Nahdlatul Ulama (NU). Kemudian, pada masa Orde Baru, hanya terdapat tiga partai politik yang diakui, yaitu Golkar, Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam konteks Sejarah Desa Lerep, desa ini telah berdiri sejak tahun 1920 di bawah kepemimpinan Karto Amijoyo. Pada masa itu, sistem Pemilu belum diterapkan, sehingga masyarakat Desa Lerep masih menggunakan metode pemilihan berdasarkan sistem kerajaan.

Pemilihan pemimpin dengan cara ini tidaklah tanpa alasan, mengingat sejarah awal penemuan Desa Lerep oleh Sunan Hasan Munadi yang merupakan punggawa Demak dengan pangkat Tumenggung. Oleh karena itu, pada masa itu, pemilihan pemimpin masih dilakukan dengan sistem kerajaan. Proses pemilihan pemimpin dengan sistem kerajaan di Desa Lerep berakhir pada tahun 1955, yang juga merupakan tahun terakhir Karto Amijoyo menjabat sebagai pemimpindesa sebelum digantikan oleh Yusman. Dengan demikian, sistem Pemilu di Desa Lerep baru dimulai pada tahun 1955 saat pemilihan Yusman, peserta Pemilu didominasi oleh partai-partai politik yang memiliki pandangan nasionalis dan religious.

Yusman menjabat sebagai pemimpin desa Lerep dari tahun 1955 hingga 1963, setelah itu posisinya diambil alih oleh Suhari, yang memimpin dari tahun 1963 hingga 1973. Selanjutnya, Sunarno menjabat dari tahun 1973 hingga 1991, dan kemudian Suwarno memimpin dari tahun 1991 hingga 1999, saat reformasi pemerintahan berlangsung, Desa Lerep mulai dikuasai oleh politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). setelah Suwarno,

Sofianto menjabat sebagai pemimpin desa dari tahun 1999 hingga 2007. Dan saat ini, Sumariyadi menjabat sebagai kepala Desa Lerep sejak tahun 2007 hingga sekarang. Saat ini, partai politik yang dominan di Desa Lerep adalah PDI.

Kondisi politik Desa Lerep juga dapat dilihat pada saat terjadinya pesta demokrasi. Ketua PPS, Ibu Lestari menyatakan bahwa pada saat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah di Desa Lerep seluruh masyarakat Desa Lerep sangat antusias dalam menyambut pesta demokrasi. Pada tahun 2004, partisipasi masyarakat Desa Lerep dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mencapai 91,44% partisipasi, dengan jumlah daftar pemilih tetap 9.009 dan jumlah pengguna hak pilih 8.238.

7. Kondisi Pemerintahan Desa Lerep

Pemerintahan desa adalah elemen dalam sistem pemerintahan yang memiliki wewenang untuk mengelola dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur masyarakat sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa, didukung oleh Sekretaris Desa atau disebut carik, dan staf lainnya. Saat ini, Desa

Lerep dipimpin oleh Bapak Sumariyadi, ST. yang telah menjabat selama tiga periode sebagai Kepala Desa Lerep, dengan Ibu Sri Lestari, S.Kom sebagai Sekretaris Desa Lerep. Saat ini, Desa Lerep mempunyai 19 perangkat yang terdiri dari 15 laki-laki dan 4 perempuan, mempunyai 8 dusun, 10 RW, dan 72 RT.

Gambar 3. 2 Struktur Pemerintahan Desa Lerep



Sumber: Dokumen Desa Lerep

B. Profil Tata Kelola Sampah Desa Lerep

1. Pengelolaan Sampah di Desa Lerep

Sampah di Desa Lerep memiliki pengelolaan sampah yang terdiri tiga macam. Pertama, masyarakat yang ingin memilah dan mengantarkan menjadi pelanggan di bank sampah. Kedua, masyarakat hanya ingin memilah dan tidak

ingin mengantar ke bank sampah menjadi pelanggan dari TPS3R. Ketiga, masyarakat yang hanya mengumpulkan dan menaruh sampah di tempat sampah dilayani oleh BUMDes Gerbang Lentera Desa Lerep. Masyarakat yang memilah dan mengantarkan ke bank sampah tidak dipungut biaya, melainkan masyarakat mendapatkan uang dari hasil memilah sampah seperti kardus, botol dan lain-lain yang kemudian hasil pilahan tersebut dijual dan memiliki nilai ekonomi. Sedangkan masyarakat yang ingin memilah dan tidak mengantarkan ke bank sampah menjadi pelanggan TPS3R dengan membayar biaya sebesar Rp. 15.000 per bulan. Berbeda dengan yang dilayani BUMDes, masyarakat membayar 13.000 per bulan. Pengangkutan sampah di Desa Lerep mulai dari petugas pengangkut sampah pelanggan TPS3R dan BUMDes diambil seminggu 2x.

Pengelolaan sampah di Desa Lerep memiliki alur pengelolaan sampah. Pertama, proses pengumpulan sampah yang dilakukan oleh masyarakat desa, di mana setiap rumah tangga bertanggung jawab untuk mengumpulkan sampah dari lingkungan mereka. Dalam tahap ini, Kadus berperan penting dalam mengorganisir dan memfasilitasi pengumpulan sampah. Kedua,

pemisahan sampah yang diharapkan masyarakat desa untuk melakukan pemisahan sampah antara yang organik dan anorganik yang merupakan langkah krusial untuk memudahkan proses pengolahan selanjutnya. Kelompok pengelolaan sampah di Desa Lerep juga terlibat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemisahan sampah. Ketiga, pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan diangkut oleh petugas pengangkut sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang telah disediakan oleh pemerintah desa. Di TPS, sampah ditampung sebelum diangkut oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup. Keempat, pengolahan sampah organik maupun anorganik. Sampah organik diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik dipilah untuk didaur ulang. Hasil olahan, seperti kompos memberikan manfaat ekonomi dari hasil penjualan kompos serta mengurangi jumlah sampah yang dibuang.

Pengelolaan sampah di Desa Lerep memiliki program-program pengelolaan sampah, seperti Bank Sampah Soka Resik dengan layanan tabungan sampah, BPJS Ketenagakerjaan, dan daur ulang serta TPS3R Sokaku Asri, di mana program tersebut berhasil menjadikan Desa Lerep

menjadi desa kampung iklim yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dalam upaya pengelolaan sampah yang efektif di Desa Lerep, pemerintah desa menjalin kerja sama yang erat dengan berbagai stakeholders. Pertama, berasal dari instansi pemerintah, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Semarang. Kedua, berasal dari sektor swasta yang meliputi PT. Coca Cola Amatil Indonesia dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera. Ketiga, berasal dari kelompok masyarakat, meliputi Proklim Sokaku Asri, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) Sokaku Asri, Bank Sampah Soka Resik, serta Proklim dari wilayah lain. Keempat, berasal dari masyarakat Desa Lerep, pengunjung, dan konsumen pupuk kompos. Kelima, berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yaitu Bintari Foundation dan Mercy Corps. Keenam, berasal dari media massa, yang terdiri dari lembaga pers.

Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lerep mendapatkan sumber

penganggaran pertama kegiatan pengelolaan sampah adalah APBN yang dialokasikan Kementerian PUPR sebesar Rp. 500.000.000 sebagai dana pembangunan TPS3R Sokaku Asri. Sumber dana kedua diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, yang mengalokasikan anggaran dari APBD sebesar Rp.500.000 hingga Rp. 600.000 setiap bulannya. Dana ini digunakan sebagai bantuan untuk operasional yang mencakup penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mesin pengolah sampah yang berada di Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R). selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk mendukung kendaraan yang bertugas mengangkut sampah dari setiap rumah anggota TPS3R Sokaku Asri.

Terdapat juga sumber pendanaan lain yang berasal dari iuran masyarakat yang terdaftar sebagai anggota TPS3R Sokaku Asri. Setiap rumah tangga diwajibkan membayar iuran sebesar Rp. 15.000 setiap bulannya. Dana yang terkumpul dari iuran ini dialokasikan sebesar Rp.12.500 digunakan sebagai dana operasional TPS3R, yang mencakup gaji untuk pekerja yang mengelola TPS3R tersebut. Sementara itu, sisa dana sebesar

Rp. 2.500 dialokasikan untuk membayar retribusi sampah yang harus disetorkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang. Pengelolaan sampah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa LeepMasyarakat yang menjadi pelanggan bank sampah didaftarkan untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan. Tujuan dari layanan ini adalah untuk membantu masyarakat, seperti petani, ibu rumah tangga, tukang bangunan, tukang ojek, dan lain-lain. Uang yang harus dibayarkan adalah 17.000 per bulan. Masyarakat yang menjadi pelanggan bank sampah sampah dapat membayar uang BPJS Ketenagakerjaan dari hasil tabungan sampah seperti kardus, botol, dan sampah yang memiliki nilai ekonomi yang telah dikumpulkan di bank sampah.

Keterlibatan suatu aktor dalam suatu program atau kegiatan diawali dengan langkah-langkah yang ditentukan oleh para pihak yang terlibat, berdasarkan wewenang dan inisiatif yang mereka miliki. Keterlibatan tersebut juga dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan program, seperti kegiatan pengelolaan sampah yang dijalankan di Desa Lerep, di mana program-program yang telah dilaksanakan sebagai

bagian dari program kampung iklim. Pengelolaan sampah di Desa Lerep mencakup beberapa peran aktor, seperti mengupayakan peningkatan kapasitas masyarakat melalui inisiatif yang digerakkan oleh kelompok warga, mendukung proses penyusunan anggaran oleh pemerintah, serta mempromosikan terwujudnya lingkungan yang bersih melalui usaha yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Selain itu, pengelolaan ini juga berfungsi sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya untuk memenuhi amanat dari Kementerian Lingkungan Hidup

2. Tujuan Pengelolaan Sampah Desa Lerep

a. Melindungi Kesehatan Masyarakat

Pengelolaan sampah di Desa Lerep bertujuan untuk mengurangi risiko demam berdarah yang terjadi di Desa Lerep, penyakit kulit, dan lain-lain yang disebabkan karena penumpukan sampah.

b. Meningkatkan Kualitas Lingkungan

Mengurangi pencemaran tanah, air, dan udara yang diakibatkan oleh sampah, serta menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan desa.

c. Mendorong Daur Ulang dan Pengolahan Sampah

Menanamkan pemahaman kepada masyarakat

mengenai nilai penting dari kegiatan daur ulang dan pengolahan sampah, sehingga dapat mengurangi jumlah sampah.

- d. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
Mendorong keterlibatan masyarakat dalam program pengelolaan sampah, sehingga tercipta rasa tanggung jawab bersama terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan.

BAB IV

GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA LEREP BAPAK SUMARIYADI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Pengelolaan sampah adalah tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah desa, termasuk Desa Lerep. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Kepala Desa Lerep Bapak Sumariyadi sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan sampah. Dalam bab ini, analisis akan dilakukan berdasarkan teori kepemimpinan Ramlan Surbakti yang mencakup proses kepemimpinan dan karakter kepemimpinan, hasil proses kepemimpinan, dan sumber kekuasaan. Melalui analisis ini, diharapkan mendapatkan pemahaman dan wawasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana gaya kepemimpinan Kepala Desa Lerep Bapak Sumariyadi dalam pengelolaan sampah.

A. Proses Kepemimpinan dan Karakter Kepemimpinan

1. Proses Kepemimpinan dalam Tahapan Kegiatan Tata Kelola Sampah

Proses kepemimpinan dalam tata kelola sampah merupakan elemen penting yang menentukan keberhasilan pengelolaan sampah. Dalam konteks ini, pemimpin berperan sebagai penggerak yang tidak hanya mengarahkan,

tetapi juga sebagai fasilitator yang mendengarkan aspirasi masyarakat dan menginspirasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mengatasi sampah. Kepala Desa Lerep memiliki beberapa langkah strategis dalam pengelolaan sampah:

a. **Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan dalam pengelolaan sampah di Desa Lerep merupakan proses yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, komunikasi yang efektif, dan koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, kepala desa berperan sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi masyarakat, dengan memastikan bahwa komunikasi dan koordinasi antar pihak berjalan dengan lancar.

Proses pengambilan keputusan dimulai dengan musyawarah yang melibatkan masyarakat, tokoh

masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Musyawarah ini berfungsi sebagai forum untuk mendiskusikan masalah sampah yang dihadapi, seperti volume sampah yang dihasilkan, jenis sampah yang mendominasi, serta pola pembuangan sampah yang tidak teratur. Selain itu, musyawarah juga menjadi wadah untuk bertukar pendapat, mengumpulkan ide, dan merumuskan solusi yang berasal dari masyarakat. Dalam proses ini, Pemimpin Desa lerep, dalam hal ini Bapak Sumariyadi menjelaskan tantangan dan masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sampah, sekaligus mendorong masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan saran mereka. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya transparan dan akuntabel, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

Setelah proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi

aktif masyarakat Desa Lerep melalui musyawarah, langkah selanjutnya adalah mempresentasikan hasil keputusan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Musrenbang merupakan wadah resmi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk seluruh kepala dusun, BPD, kecamatan, perangkat desa, pendamping lokal desa, Kepala Desa Lerep, dan pendamping desa-desa se-Kecamatan Ungaran Barat untuk membahas dan menyepakati prioritas program pembangunan, termasuk program pengelolaan sampah. Dalam forum ini, hasil musyawarah desa terkait pengelolaan sampah didiskusikan secara mendalam, dengan mempertimbangkan aspek teknis, finansial, dan keberlanjutan. Melalui proses ini, dihasilkan program-program pengelolaan sampah, seperti bank sampah dengan layanan tabungan sampah, layanan BPJS Ketenagakerjaan dari hasil tabungan bank sampah,

layanan daur ulang, dan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle). Untuk mendukung implementasi program-program ini, diperlukan sumber daya yang memadai, termasuk anggaran untuk pengadaan fasilitas, seperti tempat sampah, alat pengolahan limbah, dan tenaga kerja. Namun, kunci utama keberhasilan program ini terletak pada tingkat partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sumariyadi

“Kunci utama keberhasilan program pengelolaan sampah yang ada di Desa Lerep ada di tingkat partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat. Sebanyak apapun program pengelolaan sampah yang ditetapkan, apabila tingkat partisipasi masyarakat dan keterlibatan masyarakat rendah, program pengelolaan sampah di Desa Lerep tidak akan berjalan. Maka dari itu, saya melaksanakan pengambilan keputusan dengan

melibatkan masyarakat dalam membahas pengelolaan sampah dan tujuan saya mengadakan kegiatan pengambilan keputusan bersama masyarakat adalah untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung program pengelolaan sampah.” (Wawancara : Bapak Sumariyadi, Kepala Desa Lerep, Pukul 17.49, Tanggal 15/12/2024 Di Rumah Bapak Sumariyadi



Gambar 4. 1 Musyawarah Kepada Masyarakat Desa Lerep
Sumber: Dokumen Desa Lerep



Gambar 4. 2 Musrenbangdes desa lerep

Sumber: Dokumen Desa Lerep

Selain partisipasi masyarakat, komunikasi dan koordinasi memainkan peran yang sangat krusial dalam memastikan keberhasilan program-program pengelolaan sampah di Desa Lerep. Komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat, pengurus program pengelolaan sampah, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa menjadi fondasi utama dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah yang efektif. Pemerintah Desa Lerep, di bawah kepemimpinan Bapak Sumariyadi, mengadakan pertemuan rutin setiap hari

senin yang dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, dan kadus. Sementara itu, pertemuan yang melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, dan pengurus program pengelolaan sampah dilakukan pada hari lain. Dalam pertemuan ini, setiap individu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan masukan, sehingga tercipta komunikasi dua arah yang efektif.

Selain pertemuan langsung, Pemerintah Desa lerep juga memanfaatkan berbagai media komunikasi, seperti pamflet, MMT, media sosial, dan grup WhatsApp, untuk menyebarkan informasi terkait kegiatan daur ulang sampah, kerja bakti, dan kegiatan lainnya. Pemanfaatan media sosial menjadi sarana komunikasi berbasis online yang efektif di Desa Lerep. Melalui media sosial, semua informasi dan kegiatan terkait pengelolaan sampah dapat disampaikan dengan cepat dan efisien, memungkinkan masyarakat untuk tetap

terlibat bahkan ketika komunikasi langsung tidak memungkinkan.

Koordinasi yang baik juga terjalin antara pemerintah desa dan pihak-pihak terkait, seperti pengurus program-program pengelolaan sampah, masyarakat dan tokoh masyarakat. Melalui kolaborasi ini, berbagai inisiatif seperti, pelatihan pengelolaan sampah dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Dengan demikian, komunikasi dan koordinasi yang baik tidak hanya mendukung proses pengambilan keputusan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan dengan baik dan berkelanjutan.



Gambar 4. 3 Website Desa Lerep

Sumber: Website Desa Lerep



Gambar 4. 4 Instagram Desa Lerep
Sumber: Instagram Desa Lerep

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Lerep merupakan langkah strategis yang dirancang untuk mengatasi permasalahan sampah, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Setelah melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan musyawarah dan diskusi dengan masyarakat, pemerintah desa menetapkan serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Desa Lerep

mengeluarkan Peraturan Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dwi Lestari Kaur Umum dan Perencanaan.

“Desa Lerep memiliki Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup di mana tujuan dikeluarkan peraturan desa adalah untuk mendorong partisipasi aktif dari pemerintah desa dan seluruh komponen masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Peraturan ini juga memiliki tujuan lain untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup bagi kesejahteraan manusia secara keseluruhan.”

Kepala Desa Lerep, Bapak Sumariyadi juga menyampaikan terkait mulai diluncurkan kebijakan dan

peraturan desa

“Saya menetapkan serangkaian kebijakan karena melihat masyarakat yang susah dibilangi untuk tidak membuang sampah sembarangan bahkan masyarakat membuang sampah di saluran air, tidak membakar sampah. Pada tahun 2015 akhir menuju tahun 2016, terjadilah banjir di Desa Lerep. Salah satu dusun yang terkena banjir lumayan tinggi adalah Dusun Soka. Saya turun langsung ketika terjadi banjir, saya melihat sampah berserakan terbawa arus. Hal ini berdampak untuk Dusun Karangbolo, Kretek, dan Mapagan karena sampah dari Dusun Soka, Indrokilo, Lerep turun dan sampah yang berhenti di Kretek, Karangbolo, dan Mapagan yang merupakan dusun yang datar. Melihat kejadian tersebut, warga mulai panik dan mulai menyalahkan pemerintah desa. Pemerintah Desa Lerep sudah

menyediakan tempat pembuangan sampah, namun masyarakat tidak mengelola sampah dengan baik” (Wawancara Bapak Sumariyadi, Kepala Desa, Pukul 17.00 WIB, Tanggal 15/12/202, Rumah Bapak Sumariyadi)

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Lerep melibatkan langkah strategis yang dirancang untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program-program yang telah ditetapkan. Langkah pertama yang diambil adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik, di mana kepala desa mengadakan pertemuan dan musyawarah untuk menjelaskan kebijakan yang akan diterapkan serta dampak positif yang diharapkan. Dalam tahap ini, masyarakat diajak untuk berpartisipasi aktif dalam merumuskan solusi terhadap masalah sampah yang ada, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan.

Langkah kedua, penetapan jadwal pengambilan sampah yang teratur, di mana petugas pengambil sampah dilatih untuk melakukan pengumpulan sampah di setiap wilayah secara konsisten. Petugas pengambilan sampah Desa Lerep dibagi menjadi dua, yaitu petugas dari BUMDes yang melakukan pengambilan sampah seminggu 2x di tujuh dusun dan petugas dari TPS3R yang melakukan pengambilan sampah seminggu 2x di satu dusun yaitu Dusun Soka. Alasan Dusun Soka pengambilan sampahnya tidak melalui BUMDes adalah letak TPS3R yang berada di Dusun Soka. Hal ini disampaikan oleh Bapak Suryadi selaku anggota BUMDes unit pengelolaan sampah.

“BUMDes mengambil sampah masyarakat Desa Lerep seminggu 2x untuk 7 dusun, kecuali Dusun Soka untuk sampahnya memang disarankan untuk diambil langsung oleh petugas TPS3R karena letak TPS3R di Dusun Soka. Dusun Soka

membayar uang sampah ke bendahara TPS3R tidak ke bendahara BUMDes. Nanti sampah dibuang ke TPS Indrokilo kemudian dari petugas DLH mengambil sampah dari TPS Indrokilo dan dibuang ke TPA.” (Wawancara : Bapak Suryadi, BUMDes unit pengelolaan sampah Desa Lerep, Pukul 19.48 WIB, Tanggal 17/12/2024 Di Rumah Bapak Suryadi).

Bapak Sumariyadi juga menginisiasi pemilahan sampah. Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah desa mengadakan edukasi dan pelatihan bagi masyarakat tentang cara memilah sampah dengan benar.

Langkah ketiga, mengadakan pelatihan bagi masyarakat di mana mereka diajarkan untuk melakukan daur ulang dan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat, melainkan juga mendorong mereka untuk berinovasi dalam

mengelola sampah di lingkungan mereka.

Setelah implementasi kebijakan, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah dilaksanakan. Pemerintah desa mengumpulkan umpan balik dari masyarakat melalui pertemuan dengan kades Desa Lerep untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta keberhasilan yang dicapai. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah, serta penurunan volume sampah. Sesuai yang disampaikan Kades Desa Lerep. “Adanya kebijakan, pertemuan rutin, komunikasi, dan pelatihan yang dilakukan oleh Kepala Desa, tingkat partisipasi masyarakat Desa Lerep terhadap pengelolaan sampah meningkat pesat. Bahkan masyarakat sudah pandai memilah sampah sendiri dan masyarakat sering melakukan kegiatan daur ulang memanfaatkan sampah menjadi barang yang memiliki

manfaat dan nilai ekonomis. Kebijakan yang dilakukan Kepala Desa belum ada kendala karna kegiatan pertemuan rutin, kegiatan daur ulang, pengambilan sampah, masih dilakukan hingga sekarang.” (wawancara : Kadus se Desa Lerep)



Gambar 4. 5 Kegiatan Daur Ulang Sampah
Sumber: Dokumentasi Desa Lerep

b. Evaluasi dalam Proses Kepemimpinan

Tahap evaluasi dalam proses kepemimpinan tata kelola sampah di Desa Lerep merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa program yang telah dilaksanakan tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan

dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. evaluasi ini dilakukan secara berkala, untuk menilai pencapaian yang telah diraih serta mengidentifikasi tantangan yang muncul selama pelaksanaan program-program pengelolaan sampah.

Proses evaluasi ini melibatkan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, laporan petugas kebersihan, laporan tim pengelolaan sampah, dan kondisi lingkungan desa. Proses ini melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung, di mana mereka diajak untuk memberikan umpan balik mengenai kebijakan pengelolaan sampah yang telah diterapkan. Dengan cara ini, masyarakat merasa memiliki andil dalam proses evaluasi, yang pada akhirnya meningkatkan rasa tanggung jawab mereka terhadap kebersihan lingkungan.

Salah satu aspek yang dievaluasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program pengelolaan sampah. Kepala desa dan tim pengelola

sampah di Desa Lerep melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan, seperti jumlah sampah yang berhasil dipilah, frekuensi kegiatan gotong royong, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan edukasi dan pelatihan yang diberikan Pemerintah Desa Lerep. Berdasarkan informasi dari tim pengelola sampah, adanya edukasi, pelatihan, dan program-program pengelolaan sampah, tingkat partisipasi masyarakat di Desa Lerep meningkat sekitar 80%. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sudiro, Ketua Proklim Desa Lerep.

“Semenjak adanya program-program pengelolaan sampah, kegiatan edukasi dan pelatihan pengelolaan sampah, tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan meningkat pesat. Bahkan di TPS3R dan TPS, jumlah sampah yang dihasilkan tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya.” (Wawancara: Bapak Sudiro, Ketua Proklim, Pukul 20.00

WIB, Tanggal 17/12/2024 Di Rumah Bapak Sudiro).

Bapak Sumariyadi, Kepala Desa Lerep juga menyampaikan terkait tingkat partisipasi masyarakat.

“Saya turun langsung ke lapangan dan menemukan bahwa disetiap dusun, masyarakat mendaur ulang sampah menjadi barang kerajinan di mana kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat melalui karang taruna, dan dawis. 80% masyarakat sudah membiasakan memilah sampah dan mendaur ulang sampah.” (Wawancara Bapak Sumariyadi, Kepala Desa, Pukul 17.00 WIB, Tanggal 15/12/202, Rumah Bapak Sumariyadi).

Dalam evaluasi ini, belum sepenuhnya masyarakat yang aktif dan berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Hal ini menjadi tantangan bagi Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Kepala Desa Lerep merumuskan strategi untuk meningkatkan keterlibatan mereka

dengan mengadakan pelatihan tambahan tentang cara efektif dalam memilah sampah. Selain itu, evaluasi juga mencakup analisis dampak dari program-program pengelolaan sampah terhadap kondisi lingkungan desa, seperti penurunan jumlah volume sampah yang dibuang sembarangan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Dalam proses evaluasi ini, kepala desa juga memberikan penghargaan kepada individu atau kelompok yang berkontribusi signifikan dalam program kebersihan. Penghargaan ini tidak hanya berupa sertifikat atau hadiah, tetapi juga pengakuan publik dalam forum desa, yang berfungsi untuk memotivasi masyarakat lainnya agar lebih aktif berpartisipasi. Dengan memberikan pengakuan dan penghargaan, kepala menunjukkan bahwa setiap kontribusi sekecil apapun, sangat berarti dalam upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Hal ini menciptakan budaya saling menghargai

dan mendorong masyarakat untuk berinovasi dalam pengelolaan sampah di lingkungan mereka.

Hasil evaluasi juga digunakan untuk merumuskan rekomendasi dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Pemerintah desa bersama tim pengelola sampah menyusun laporan evaluasi yang mencakup analisis mendalam tentang keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Laporan ini kemudian disampaikan kepada masyarakat dalam pertemuan terbuka, di mana kepala desa menjelaskan hasil evaluasi dan langkah-langkah yang akan diambil berdasarkan umpan balik yang diterima. Evaluasi yang dilakukan secara berkala ini juga menjadi landasan penting untuk perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah di Desa Lerep. Dengan mengidentifikasi masalah dan tantangan yang ada, kepala desa dapat merancang program-program yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat. selain itu, evaluasi juga membantu dalam mengukur dampak jangka panjang dari program-program pengelolaan sampah, sehingga kepala desa dapat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

c. Jejaring Partisipasi Masyarakat

Jejaring partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Lerep merupakan elemen penting yang mendukung keberhasilan program-program tata kelola sampah yang telah direncanakan dan diimplementasikan. Kepala desa berperan sebagai penghubung yang aktif dalam membangun kemitraan dengan berbagai pihak, seperti instansi pemerintah, sektor swasta, kelompok masyarakat, masyarakat, LSM, dan media massa. Melalui kolaborasi ini, kepala desa berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan sampah. Salah satu langkah

awal yang diambil adalah mengadakan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas isu-isu terkait pengelolaan sampah dan mencari solusi bersama.

Pertemuan ini, kepala desa Lerep, Bapak Sumariyadi mengajak masyarakat untuk berbagi ide dan pengalaman, sehingga setiap individu merasa dihargai dan memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan. Kepala desa juga mendorong terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat yang fokus pada isu-isu lingkungan, seperti davis di setiap dusun dan karang taruna. Kelompok ini berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk berkolaborasi dalam kegiatan program-program pengelolaan sampah, seperti kelompok davis dapat mengedukasi masyarakat tentang cara mengolah sampah menjadi barang yang berguna, sementara kelompok karang taruna dapat mengorganisir kegiatan gotong royong untuk membersihkan area publik. Dengan

membentuk jejaring partisipasi yang kuat, kepala desa tidak hanya memperkuat komitmen masyarakat terhadap pengelolaan sampah, tetapi juga menciptakan budaya kolaboratif yang berkelanjutan dalam menjaga kebersihan Desa Lerep.

Kepala Desa Lerep juga menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan, seperti sekolah yang ada di Desa Lerep untuk mengintegrasikan pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum. Sekolah yang ada di Desa Lerep mengadakan pendidikan lingkungan dengan mengajarkan siswa untuk membuat ecobrick, membuat kerajinan dari sampah, dan lain-lain. Melalui program ini, siswa diajarkan tentang pentingnya pengelolaan sampah dan cara-cara yang dapat mereka lakukan untuk berkontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Kepala Desa Lerep, Bapak Sumariyadi juga memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jejaring partisipasi masyarakat melalui

media sosial dan platform komunikasi lainnya, informasi mengenai program pengelolaan sampah, jadwal kegiatan, dan hasil evaluasi dapat disebarluaskan dengan cepat dan efektif. Masyarakat dapat memberikan masukan, berbagi pengalaman, dan berpartisipasi dalam diskusi online mengenai isu-isu lingkungan. Dengan cara ini, kepala desa menciptakan ruang dialog yang terbuka dan transparan, di mana setiap suara masyarakat didengar dan dihargai. Hal ini tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan warganya.

Melalui jejaring partisipasi masyarakat yang kuat, Kepala Desa Lerep telah menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Masyarakat merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan desa, dan mereka lebih merasa termotivasi untuk berpartisipasi dalam program-program yang telah dirancang. Jejaring ini juga memungkinkan adanya

pertukaran pengetahuan dan pengalaman masyarakat, sehingga mereka dapat belajar satu sama lain dan mengembangkan solusi yang lebih inovatif dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian, jejaring partisipasi masyarakat bukan hanya sekedar dukungan dalam pelaksanaan program, tetapi juga merupakan fondasi yang kuat untuk menciptakan budaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Desa Lerep.

2. Karakter Kepemimpinan Kepala Desa Lerep dalam Tata Kelola Sampah

Karakter kepemimpinan Kepala Desa Lerep, Bapak Sumariyadi sangat mempengaruhi pengelolaan sampah. Beberapa karakter yang menonjol antara lain:

- a. Gaya Kepemimpinan yang Diterapkan
Berdasarkan karakter kepemimpinan, gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Lerep, Bapak Sumariyadi selaku Kepala Desa Lerep dalam pengelolaan sampah, di mana kepala desa aktif menjalankan tugas dan memiliki

penilaian yang tinggi terhadap tugas tersebut. Dalam konteks ini, kepala desa menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap tugasnya dengan terlibat langsung dalam setiap aspek pengelolaan sampah, mulai dari pengambilan keputusan hingga pelaksanaan program-program pengelolaan sampah. Salah satu karakteristik utama dari pemimpin Desa Lerep adalah keterbukaan dan komunikasi yang efektif. Kepala desa secara rutin, yaitu setiap hari senin mengadakan pertemuan antara pemerintah desa, kadus, dan tokoh masyarakat untuk diskusi dan evaluasi. Selain itu, kepala desa juga mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendiskusikan isu-isu terkait pengelolaan sampah, di mana kepala desa tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendengarkan masukan dan saran dari warga, menjelaskan program-program yang akan diterapkan, dan menjelaskan kebijakan yang akan

diterapkan.

Kepala desa menciptakan suasana yang inklusif dan kolaboratif, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, kepala desa juga menilai tinggi pekerjaan dengan cara memberikan umpan balik yang konstruktif dan mengadakan evaluasi berkala terhadap hasil kerja masyarakat. Hal ini tidak hanya memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Kepala desa menunjukkan sikapnya dengan menginisiasi program-program pengelolaan sampah, mengadakan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilahan dan pengelolaan sampah yang baik. Dalam setiap kegiatan, kepala desa tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga terlibat langsung, seperti ikut serta

dalam kegiatan pembersihan lingkungan, yang menunjukkan komitmennya terhadap kebersihan desa.

Kepala Desa Lerep juga mengajak masyarakat untuk terlibat dalam merumuskan rencana aksi yang jelas dan terukur, sehingga program yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam proses ini, kepala desa mengadakan diskusi kelompok dan forum terbuka, di mana masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan ide-ide mereka. Selain itu, Bapak Sumariyadi selaku Kepala Desa Lerep menilai tinggi pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat. Bapak Sumariyadi memberikan penghargaan kepada individu atau kelompok yang berkontribusi signifikan dalam program-program pengelolaan sampah. Secara keseluruhan, karakter kepemimpinan yang diterapkan oleh Kepala Desa Lerep dalam tata kelola sampah

menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap partisipasi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Karakter kepemimpinan yang diterapkan Kepala Desa Lerep tidak hanya efektif dalam mengatasi masalah sampah, tetapi juga memperkuat ikatan dengan masyarakat.

b. Motivasi dan Inspirasi

Kepala desa memainkan peran yang sangat penting dalam memotivasi dan menginspirasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kepala Desa lerep tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program, tetapi juga berusaha untuk membangkitkan semangat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik melalui sosialisasi yang intensif, dan mengadakan pertemuan dengan masyarakat. Bapak Sumariyadi juga menginisiasi program edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang

pentingnya mengelola sampah. Kepala desa mengadakan pelatihan bagi petugas kebersihan dan masyarakat tentang cara efektif dalam memilah sampah, pelatihan pembuatan pupuk kompos dari sisa-sisa sampah, mendaur ulang sampah, serta mengedukasi mereka tentang dampak negatif dari sampah yang dibuang sembarangan. Dalam program-program ini, kepala desa berusaha untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan interaktif, sehingga masyarakat merasa lebih terlibat dan termotivasi untuk menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari.

Kepala Desa Lerep juga berperan sebagai inspirator dengan menunjukkan komitmen dan dedikasinya terhadap pengelolaan sampah. Kepala Desa Lerep terlibat langsung dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan, yang tidak hanya meningkatkan kebersihan desa, tetapi juga

memperkuat rasa kebersamaan di antara warga. Dengan terjun langsung ke lapangan, kepala desa memberikan contoh nyata tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Tindakan ini menginspirasi masyarakat untuk mengikuti jejaknya, menciptakan rasa tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Bapak Sumariyadi selaku Kepala Desa Lerep juga sering berbagi cerita sukses dari individu atau kelompok yang telah berhasil dalam program pengelolaan sampah, sehingga masyarakat merasa termotivasi untuk berkontribusi lebih dalam menjaga kebersihan desa.

Selain memberikan motivasi dan inspirasi, Kepala Desa Lerep menilai tinggi pekerjaan, seperti menilai tinggi usaha yang telah dilakukan masyarakat dengan memberikan penghargaan, pengakuan, dan lain-lain. Hal ini menjadikan masyarakat aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dan masyarakat

merasa dihargai setiap usaha yang telah dilakukan. Sesuai yang disampaikan Kadus Desa Lerep.

“Kepala Desa, menilai tinggi pekerjaan dengan memberikan penghargaan dalam bentuk pengakuan publik di forum desa. Hal ini membuat masyarakat lebih bergerak untuk aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Tiap desa selalu memiliki pengakuan masing-masing. Seperti contohnya Dusun Soka yang masyarakatnya aktif memanfaatkan sampah menjadi barang yang dapat dimanfaatkan kembali. Selain itu Dusun Kretek yang terkenal dengan dusun ecobrick. Dusun Mapagan yang memanfaatkan sampah menjadi barang kemudian barang tersebut dijual yang digunakan untuk liburan bersama dan acara dusun. Dusun Indrokilo memanfaatkan limbah organik dari kotoran sapi menjadi biogas menggantikan gas elpiji. Dan dusun-dusun lainnya

masyarakat sudah pandai memanfaatkan sampah mejadi hal yang bermanfaat. Motivasi yang dilakukan kepala desa membawa perubahan besar yaitu masyarakat aktif dalam berpartisipasi dalam pengelolaan sampah serta kepala desa langsung turun lapangan untuk memberikan contoh kepada masyarakat.”



Gambar 4. 6 Pemanfaatan Sampah Menjadi Ecobrick

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 4. 7 Hasil Daur Ulang Sampah

Sumber: Instagram Desa Lerep



Gambar 4. 8 Tempat Pengolahan Biogas dari Kotoran Sapi
Sumber: Instagram Desa Lerep

c. Keteladanan Kepala Desa Lerep

Peran keteladanan pemimpin di Desa Lerep sangat penting dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik, dan hal ini sangat terkait dengan aspek etika dalam kepemimpinan. Kepala desa tidak hanya aktif melaksanakan tugasnya, tetapi juga menjadi contoh nyata bagi masyarakat dalam hal perilaku dan komitmen terhadap kebersihan lingkungan. Keteladanan ini terlihat jelas ketika kepala desa secara langsung terlibat dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan, memberikan contoh cara memanfaatkan sampah, menunjukkan

bahwa kepala desa tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga berkontribusi secara fisik dalam menjaga kebersihan.

Keteladanan ini membawa Desa Lerep berhasil menjadi Desa Proklim, karena kepala desa mampu membangun kesadaran masyarakat. Proklim merupakan program dari DLH (Dinas Lingkungan Hidup) berupa adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Desa Lerep berhasil meraih juara 3 tingkat nasional. Hal ini, Desa Lerep menjadi tempat studi banding hingga sekarang karena memanfaatkan sampah menjadi pupuk kompos, menjadi barang-barang kerajinan yang dapat menghasilkan nilai ekonomi. Desa Lerep juga berhasil mengurangi sampah plastik.

Kepala desa menghimbau masyarakat untuk mengurangi sampah, seperti saat kegiatan masyarakat dihimbau untuk menggunakan piring, selain itu pasar pon yang ada di Desa Lerep

menggunakan daun sebagai alas makanan. Cara ini dilakukan untuk mengurangi plastik. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Sudiro selaku Ketua Proklim di Desa Lerep.

“Desa Lerep dinobatkan menjadi Desa Proklim karena masyarakat dan keteladanan pemerintah desa yang berhasil membangun kesadaran masyarakat dan menjadikan Desa Lerep menjadi desa yang bersih dan mampu mengurangi sampah sekitar 80%. Selain itu masyarakat yang mulai sadar menjaga lingkungan dengan memanfaatkan sampah menjadi barang yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi, masyarakat yang mulai paham untuk memilah sampah, dan Desa Lerep berhasil memanfaatkan sampah menjadi pupuk kompos yang memiliki manfaat untuk para petani karena dapat meningkatkan struktur, kesuburan tanah, serta bagus untuk tanaman. Keberhasilan ini

membawa Desa Lerep menjadi juara 3 Proklim tingkat nasional” (Wawancara : Bapak Sudiro, Ketua Proklim, Pukul 20.00 WIB, Tanggal 17/12/2024 Di Rumah Bapak Sudiro).



Gambar 4. 9 Hasil Kompos Dari Sampah

Sumber: Dokumen Desa Lerep



Gambar 4. 10 Kegiatan Studi Banding

Sumber: Instagram Desa Lerep



Gambar 4. 11 Sampah Menjadi Tas

Sumber: Proklim Sokaku Asri

Melalui peran keteladanan, Kepala Desa Lerep dapat membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik, sehingga menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

B. Hasil Proses Kepemimpinan

1. Keberhasilan Program Pengelolaan Sampah

Keberhasilan program pengelolaan sampah di Desa Lerep yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dapat dilihat dari berbagai inisiatif yang telah diimplementasikan. Program-program pengelolaan sampah telah berhasil menjadikan Desa Lerep sebagai kampung iklim yang merupakan Program dari DLH (Dinas Lingkungan Hidup) karena Desa Lerep berhasil dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pengelolaan sampah yang inovatif. Selain itu, Kepala Desa Lerep menjalin kerja sama dengan stakeholders, di antaranya KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Kementerian PUPR, DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Provinsi Jawa Tengah, dan DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Semarang serta mendapatkan dukungan berupa, pelatihan dan pendanaan program-program pengelolaan sampah agar program-program tersebut semakin maju dan menjadi contoh daerah lain. Program-program pengelolaan sampah yang ada Di Desa Lerep berhasil mendapatkan Juara 3 Program Kampung Iklim

tingkat nasional dan program-program pengelolaan sampah di Desa Lerep berhasil memanfaatkan sampah dan menghasilkan nilai ekonomi, memberikan perlindungan sosial dari hasil tabungan sampah, berkurangnya volume sampah serta hasil dari daur ulang sampah didaftarkan ke paket wisata di mana wisatawan diberikan edukasi mengenai pengelolaan sampah yang baik mengingat Desa Lerep merupakan Desa Wisata yang telah mendapatkan tanda kehormatan Satya Lencana Kepariwisata dari Presiden RI. Program pengelolaan sampah antara lain:

a. Bank Sampah

Program bank sampah di Desa Lerep telah didirikan pada tahun 2015. Dalam program bank sampah, Kepala Desa Lerep menginisiasi adanya layanan di dalam program bank sampah yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan dapat memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial. Program bank sampah di Desa Lerep mengusung konsep dengan melibatkan warga secara langsung

dalam pelaksanaannya dan menjadikan masyarakat sebagai subjek utama. Kepala desa membentuk kepengurusan bank sampah, di mana dengan adanya kepengurusan bank sampah dapat memudahkan dalam menjalankan program bank sampah. Program bank sampah memiliki layanan, yaitu layanan tabungan sampah, layanan BPJS Ketenagakerjaan, dan layanan daur ulang.

Pertama, layanan tabungan bank sampah di Desa Lerep merupakan inovasi yang dirancang untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sekaligus memberikan manfaat ekonomi. Dalam layanan ini, masyarakat dapat mengantarkan sampah mereka yang dapat dijual, seperti kardus, kertas, botol plastik, dan jenis sampah lainnya ke bank sampah yang telah dibentuk oleh pemerintah desa. Setelah sampah tersebut diterima, pengurus bank sampah akan melakukan penimbangan untuk menentukan berat dan nilai

ekonomis dari sampah yang disetorkan. Hasil dari penjualan sampah akan dicatat oleh teller bank sampah, kemudian hasil penjualan sampah ditabung. Masyarakat dapat mengambil hasil uang tabungan sampah satu tahun sekali, bertepatan dengan hari raya idul fitri, sehingga mereka dapat merasakan manfaat langsung dari partisipasi mereka dalam program pengelolaan sampah. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Richard selaku Direktur Bank Sampah Soka Resik.

“Adanya layanan tabungan sampah diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sampah daripada sampah dibuang sembarangan. Pemerintah desa serta saya mengajak masyarakat dengan menjadikan sampah menjadi uang. Sampah nanti dapat dibawa ke bank sampah, dan hasil dari sampah tadi ditabung oleh pengurus bank sampah dan diambil setiap satu tahun sekali ke bendahara bank

sampah yaitu pada waktu lebaran”
 (Wawancara : Bapak Richard,
 Direktur Bank Sampah Soka Resik,
 Pukul 10.00 WIB, Tanggal
 22/12/2024 Di Rumah Bapak
 Richard).



Gambar 4. 12 Kegiatan Tabungan Sampah Desa Lerep
Sumber: YouTube

Kedua, layanan BPJS Ketenagakerjaan di Desa Lerep merupakan inovasi yang terintegrasi dari layanan tabungan sampah, di mana pelanggan bank sampah yang menghendaki untuk didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, maka hasil dari penjualan sampah dapat digunakan untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan. Namun, bagi masyarakat yang tidak menghendaki untuk didaftarkan ke BPJS

Ketenagakerjaan, maka hasil penjualan sampah diambil ketika hari raya idul fitri. Layanan ini merupakan keunikan dari program bank sampah yang diinisiasi oleh kepala desa yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, seperti petani, buruh, ibu rumah tangga, tukang ojek. Dalam upaya inovatif ini, kepala desa berkomitmen untuk membantu masyarakat agar dapat memiliki proteksi melalui BPJS Ketenagakerjaan, khususnya dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja. Misalnya, jika seorang petani mengalami kecelakaan saat bekerja di sawah, seperti digigit ular, dan terpaksa dirawat di rumah sakit, mereka akan mendapatkan perlindungan di kelas satu apabila terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, jika seorang pencari nafkah meninggal sebelum usia 60 tahun, keluarga yang ditinggalkan dapat mengklaim asuransi sekitar 48 juta rupiah, yang sangat berarti bagi anak-anak yang masih

bersekolah. Dengan adanya jaminan ini, harapan untuk melanjutkan pendidikan anak tetapi terjaga, meskipun premi yang dibayarkan hanya sebesar Rp 17.000 per bulan. Keberhasilan program ini juga diakui secara nasional, di mana pada tahun 2018, Desa Lerep meraih juara satu Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari keunikan masyarakat membayar BPJS Ketenagakerjaan bukan dari uang melainkan dari sampah. Penghargaan ini merupakan apresiasi dari pemerintah pusat terhadap upaya desa dalam menciptakan solusi yang inovatif, yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan. Inovasi yang diterapkan tidak hanya memberikan perlindungan sosial, tetapi juga menciptakan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik, dan menjadikan Desa Lerep sebagai contoh inspiratif dalam pengembangan program jaminan sosial berbasis komunitas.



Gambar 4. 13 Juara 1 Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2018
Sumber: Dokumen Desa Lerep

Ketiga, layanan daur ulang yang telah diimplementasikan melalui program bank sampah yang bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan sampah secara berkelanjutan. Nasabah bank sampah menyetor berbagai jenis sampah yang memiliki nilai jual ke dalam bank sampah yang dikelola oleh kelompok masyarakat. Setiap nasabah bank sampah diberikan insentif berdasarkan jumlah dan jenis sampah yang mereka setor, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah. Sampah yang terkumpul kemudian dipilah kembali untuk menentukan jenis sampah yang dapat didaur ulang, sehingga dapat menghasilkan

barang-barang yang memiliki nilai guna, seperti kerajinan tangan. Misalnya, sampah plastik dapat diolah menjadi tas, tempat pensil, atau barang-barang dekoratif. Hasil daur ulang sampah dijual ke para wisatawan Desa Lerep, mengingat Desa Lerep merupakan Desa Wisata.

Layanan daur ulang dari program bank tidak hanya berhasil mengurangi jumlah volume sampah di Desa Lerep, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat melalui penjualan produk daur ulang. Inisiatif ini mencerminkan komitmen desa terhadap keberlanjutan dan pengelolaan sampah yang lebih baik, serta membangun budaya peduli lingkungan di kalangan masyarakat. Melalui program bank sampah, Desa Lerep menjadi contoh yang inspiratif dalam pengelolaan sampah yang inovatif, di mana sampah yang awalnya dianggap sebagai limbah dapat diubah menjadi barang-barang yang bermanfaat dan bernilai ekonomi. Adanya layanan daur ulang, volume sampah di Desa Lerep berkurang 80%. Hal ini, Desa Lerep berhasil meraih

prestasi Juara 1 Lingkungan Bersih dan Sehat tingkat Kabupaten Semarang.



Gambar 4. 14 Hasil Daur Ulang Sampah

Sumber: Dokumen Desa Lerep



**Gambar 4. 15 Juara 1 Lingkungan Bersih dan Sehat
Tingkat Kabupaten Semarang**

Sumber: Dokumentasi Kepala Desa Lerep

- b. TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reuse Reduce Recycle)

Program Tempat Pengelolaan Sampah Reuse Reduce Recycle (TPS3R) di Desa Lerep merupakan sebuah wadah kelompok atau organisasi berbasis sampah atau lingkungan yang letaknya berada di Dusun Soka, Desa Lerep. TPS3R Sokaku Asri merupakan bagian Program Kampung Iklim dan telah diakui oleh DLH Kabupaten Semarang yang berfokus pada upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Tujuan dari kegiatan TPS3R adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola dan memahami proses pengolahan sampah secara efektif, serta memberikan pemahaman tentang cara mengelola sampah yang memiliki nilai jual. TPS3R Sokaku Asri mempunyai tugas untuk mengolah sampah organik dari masyarakat, seperti sisa makanan, daun, ranting, dan lain-lain. Kegiatan TPS3R Sokaku Asri pun sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 yaitu tempat yang bertujuan untuk melaksanakan pengumpulan, pemilahan, pemrosesan akhir, penggunaan ulang, dan pendauran ulang. Berikut bagan pengurus TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reuse Reduce Recycle) Sokaku Asri:



Gambar 4. 16 Struktur Organisasi TPS3R Sokaku Asri
Sumber: TPS3R Sokaku Asri

Struktur TPS3R Sokaku Asri terdapat dua bidang yang memiliki rencana kerja tersendiri, yang diuraikan sebagai berikut:

1) Bidang Produksi

Bidang produksi TPS3R Sokaku Asri memiliki rencana yang berfungsi sebagai panduan operasional dalam proses produksi, dengan tujuan menciptakan produk atau layanan yang memiliki nilai tambah. Program kerja tersebut sebagai berikut:

- a) Mengurus Gedung TPS3R, mengurus peralatan atau

mesin yang digunakan dalam operasional di TPS3R, mengurus alat angkut sampah masyarakat dan sarana prasarana lain

- b) Mengatur jadwal pengambilan sampah. Pengambilan sampah dilakukan selama seminggu 2x
- c) Mengatur jalannya proses produksi, yaitu memilah, mencacah, fermentasi, dan pengepakan kompos dari sampah masyarakat yang diambil;
- d) Pelatihan tenaga kerja difokuskan pada pengelolaan sampah masyarakat, meliputi pengumpulan, pemilahan, pencacahan, fermentasi, pengayakan, dan pengemasan.;
- e) Melakukan tindak lanjut terhadap keluhan pelanggan terkait sampah jika terdapat penumpukan sampah yang

belum diangkut oleh petugas. Untuk layanan pengambilan sampah, pelanggan dikenakan biaya sebesar Rp 15.000 setiap bulannya dan TPS3R wajib membayar retribusi Rp.300.000.

2) Bidang Pengembangan

Bidang pengembangan memiliki kegiatan untuk mengembangkan pengetahuan teknik penanganan dan pemrosesan limbah untuk menghasilkan produk yang bernilai guna. Dalam bidang pengembangan, kegiatan yang dilakukan adalah pembuatan kompos dari sampah organik, seperti sisa makanan, buah busuk, daun, ranting dan lain-lain. Kompos yang telah jadi digunakan oleh para petani Desa Lerep. selain itu, hasil kompos dijual ke petani lain. Selanjutnya ada ternak kambing, di mana pengurus TPS3R dan pemerintah desa

berharap dengan adanya ternak kambing, kotoran dari kambing dapat dijadikan campuran kompos agar mutunya lebih bagus.

Kegiatan lain yang ada di TPS3R Sokaku Asri juga terdapat budidaya maggot. Dalam budidaya maggot, TPS3R Sokaku Asri membeli telur, kemudian diberi media pakan yang bersifat lembut dan mudah ditembus. Telur maggot diberi plastik dan dalam tiga hari, telur akan menetas dan langsung keluar mencari makan. Setelah seminggu, dibuatkan media baru diberi sampah- sampah seperti sisa makanan, batang pisang yang dicacah dan lain-lain. Manfaat maggot dapat digunakan untuk ternak ayam, ternak lele. Hasil dari budidaya maggot, berhasil terjual di berbagai daerah. Kegiatan ini menjadikan TPS3R Sokaku Asri dijadikan tempat studi banding dari berbagai

daerah hingga sekarang dan meraih Juara 3 Program Kampung Iklim tingkat nasional yang diselenggarakan oleh DLH (Dinas Lingkungan Hidup). Seperti penjelasan Bapak Sri Haryanto selaku Ketua TPS3R Sokaku Asri

“Adanya TPS3R Sokaku Asri sangat berguna buat masyarakat, karna sasaran saya ya agar masyarakat dapat belajar cara mengelola dan mengolah sampah. Saya dan pemerintah desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar cara membuat kompos, budidaya maggot dan dari pengurus TPS3R memberikan pemahaman buat memilah sampah yang benar” (Wawancara Bapak Sri Haryanto, Pukul 16.30, Tanggal 19/12/2024, Rumah Bapak Sri Haryanto)



Gambar 4. 17 Pengambilan Sampah Masyarakat
Sumber: Dokumen Pribadi



Gambar 4. 18 Pemilahan Sampah
Sumber: Dokumen Desa Lerep



Gambar 4. 19 Proses Pencacahan Sampah
Sumber: Dokumen Desa Lerep



Gambar 4. 20 Pengepakan Kompos
Sumber: Dokumen Desa Lerep



Gambar 4. 21 Budidaya Maggot
Sumber: TPS3R Sokaku Asri

c. Pengangkutan Sampah

Desa Ilereng mengimplementasikan program pengangkutan sampah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Unit Pengelolaan Sampah, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Pemerintah desa secara rutin melakukan pengangkutan sampah 2x seminggu melalui petugas yang telah dibentuk khusus untuk mengambil sampah dari setiap rumah. Sampah yang telah terkumpul kemudian dibuang ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang terletak di Dusun Indrokilo.



Gambar 4. 22 TPS Indrokilo

Sumber: Dokumen Pribadi

Dalam program ini, masyarakat diwajibkan membayar biaya operasional pengambilan sampah sebesar Rp 15.000, sedangkan untuk pelaku usaha, seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menghasilkan lebih banyak sampah dikenakan biaya Rp 30.000. Pembayaran biaya operasional pengambilan sampah langsung dibayarkan ke bendahara BUMDes Gerbang Lentera.

Uang dari masyarakat digunakan untuk membayar karyawan, membayar supir, membayar biaya retribusi ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH), membayar transportasi, dan membayar kerusakan mobil pengangkut sampah. Melalui wawancara dengan bendahara BUMDes, Ibu Susilo mengatakan

“Uang dari masyarakat yang bayar sampah dari BUMDesa digunakan buat bayar petugas pengambil sampah, supir, bayar retribusi ke DLH sebesar Rp. 200.000, soalnya kalau dari BUMDes telat bayar uang retribusi, petugas dari DLH

gamau ngambil, jadi menyebabkan sampah di TPS numpuk. Selain itu ya buat bayar bensin, bayar kerusakan mobil, bayar perawatan mobil” (Wawancara Ibu Susilo selaku Bendahara BUMDes Gerbang Lentera, Pukul 20.00, Tanggal 17/12/2024, Rumah Ibu Susilo)

Pengelolaan pengangkutan sampah ini sepenuhnya ditangani oleh BUMDes Gerbang Lentera Unit Pengelolaan Sampah, kecuali Dusun Soka yang membayar uang sampah di luar pengelolaan BUMDes, karena letak TPS3R di Dusun Soka. Hal ini, Dusun Soka untuk pengambilan sampah diambil oleh petugas TPS3R. TPS3R membayar uang retribusi ke BUMDes sebesar Rp 300.000. Setelah sampah dibuang ke TPS Indrokilo, sampah tersebut akan diambil oleh petugas dari DLH (Dinas Lingkungan Hidup) untuk dikelola lebih lanjut. Sampah yang diambil oleh petugas BUMDes memiliki volume yang sedikit, hal ini disebabkan karena masyarakat sudah pandai memilah sampah

dan mengolahnya menjadi barang yang bermanfaat. Setiap dusun, mengharuskan masyarakat untuk memanfaatkan sebaik mungkin dan setiap dusun memiliki ciri khas dalam mengelola sampah.

Kebijakan ini merupakan salah satu inisiatif dari kepala desa untuk mendorong masyarakat agar lebih bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pemerintah desa juga melihat bahwa volume sampah di Desa Lerep berkurang sebesar 80% karena setiap Kadus (Kepala Dusun) menghimbau warga untuk mengelola sampah dengan baik, karena apabila sampah dibuang sembarangan, dibakar akan membawa dampak dan generasi selanjutnya juga akan merasakan dampak buruk.

C. Sumber Kekuasaan

1. Sumber Kekuasaan Formal

Kekuasaan formal yang dimiliki oleh pemerintah desa, khususnya kepala desa merupakan salah satu elemen penting dalam struktur pemerintahan lokal yang berfungsi untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek

kehidupan masyarakat, termasuk pengelolaan sampah di Desa Lerep. Kekuasaan ini berasal dari jabatan resmi yang diemban dan diperoleh melalui proses pemilihan yang sah dan diakui oleh masyarakat. memberikan kepala desa wewenang dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan, merumuskan kebijakan, mengalokasikan anggaran, mengatur sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan sampah dan mengatur pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Dalam kekuasaan formal ini, Kepala Desa Lerep mengeluarkan Peraturan Desa Lerep Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup, menetapkan regulasi mengenai pemilahan, pengumpulan, pengolahan sampah, serta memberikan sanksi bagi warga yang melanggar ketentuan tersebut.

Kepala Desa Lerep juga membentuk tim atau kelompok kerja yang khusus menangani masalah pengelolaan sampah, yang terdiri dari masyarakat dan perangkat desa. Tim ini memiliki tugas untuk melaksanakan program-program kebersihan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pelatihan pengelolaan sampah, serta mengawasi

pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik, sehingga memudahkan koordinasi dan kolaborasi dalam pengelolaan sampah. Sumber kekuasaan formal ini juga diperkuat oleh dukungan dari lembaga pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Semarang. Lembaga pemerintah tersebut memberikan bimbingan teknis dan sumber daya tambahan untuk mendukung program-program pengelolaan sampah di Desa Lerep.

Regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa Lerep juga mencakup program-program pengelolaan sampah, program edukasi, dan pelatihan bagi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Melalui kegiatan ini, masyarakat dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan sampah,

sehingga meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, Pemerintah Desa Lerep juga menjalin kolaborasi dengan sektor swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Ada beberapa bentuk dukungan dari pihak eksternal yang diberikan untuk mendukung pengelolaan sampah di Desa Lerep. Seluruh pihak pendukung ini berasal dari luar Desa Lerep, termasuk PT.Coca Cola Amatil Indonesia, Mercy Corps, dan lembaga pers. Ketiga entitas tersebut memberikan kontribusi dengan menjalankan peran sesuai dengan kapasitas dan wewenang mereka, serta sejalan dengan program yang telah ditetapkan oleh organisasi masing-masing.

Dukungan pertama datang dari Mercy Corps, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus pada perlindungan lingkungan. Mercy Corps juga berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dalam menghadapi situasi krisis, berkomitmen dalam peningkatan kualitas hidup, serta menciptakan perubahan positif. Salah satu tindakan yang diambil oleh Mercy Corps adalah menyediakan alat-alat dan bantuan kepada masyarakat di

seluruh Indonesia guna meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup, serta memberdayakan mereka untuk membentuk komunitas yang produktif dan tangguh. Di sisi lain, dukungan yang diberikan kepada Bank Sampah mencakup pembuatan video branding yang menjelaskan metode pembayaran BPJS Ketenagakerjaan yang dapat dilakukan masyarakat dengan mengumpulkan sampah dan menyimpannya di bank sampah. Selain Mercy Corps, dukungan lain untuk program-program pengelolaan sampah di Desa Lerep berasal dari PT. Coca Cola Amatil, yang merupakan sektor swasta dengan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab Perusahaan terhadap lingkungan di sekitarnya. Program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan ini meliputi penyediaan sejumlah tempat sampah yang kini tersedia di setiap rumah anggota TPS3R Sokaku Asri.

Dukungan ketiga datang dari lembaga pers atau kelompok aktor media massa, yang meliputi berita mengenai Program Kampung Iklim Dusun Soka, Desa Lerep. lembaga-lembaga pers ini, mencakup Suara Merdeka, Jateng Daily, Jateng Pos, Ungaran News, dan

Radio Idola. Keberadaan media-media ini sangat penting karena mereka berperan dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang program-program pengelolaan sampah. Dengan meliputi kegiatan dan inisiatif yang dilakukan, media massa dapat membantu menarik perhatian publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan.

Dukungan lain berasal dari Bintari Foundation, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada perlindungan lingkungan, berperan penting dalam pengelolaan sampah. Dalam kolaborasinya dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Semarang, Bintari Foundation menyelenggarakan workshop yang membahas tentang perubahan iklim serta langkah-langkah adaptasi dan mitigasi yang perlu diambil untuk mengurangi dampak dari masalah tersebut. Workshop ini dilaksanakan sebanyak empat kali dalam setahun, dengan sasaran peserta yang meliputi pegawai DLH Kabupaten Semarang, kelompok masyarakat, dan masyarakat umum. Kegiatan ini dirancang untuk memperdalam pengetahuan dan

kepedulian terhadap permasalahan lingkungan, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya penanganan limbah dan pelestarian alam.

Sumber kekuasaan formal dalam tata kelola sampah di Desa Lerep juga mencakup pengaturan anggaran yang dialokasikan untuk program-program pengelolaan sampah. Kepala desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola anggaran yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dana desa, sumbangan masyarakat, dan bantuan dari pemerintah pusat atau daerah. Dengan pengelolaan anggaran yang baik, pemerintah desa dapat memastikan bahwa program-program pengelolaan sampah mendapatkan dukungan finansial yang memadai, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif. selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran juga menjadi aspek penting dalam membangun keyakinan warga terhadap pemerintah desa, yang pada akhirnya dapat memicu keterlibatan aktif warga dalam inisiatif pengelolaan sampah.

2. **Kekuasaan Informal**

Sumber kekuasaan informal dalam tata kelola sampah di Desa Lerep memainkan peran yang sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan warga dalam pengelolaan sampah. Berbeda dengan sumber kekuasaan formal yang berlandaskan pada struktur organisasi dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah desa, sumber kekuasaan informal lebih berkaitan dengan hubungan sosial, norma, dan nilai-nilai yang berkembang di dalam komunitas. Salah satu bentuk kekuasaan informal yang signifikan adalah pengaruh tokoh masyarakat dan pemuka agama yang memiliki kedudukan dan reputasi yang dihormati oleh masyarakat. tokoh-tokoh ini sering kali menjadi jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat, membantu menyampaikan pesan-pesan penting mengenai pengelolaan sampah dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program-program pengelolaan sampah. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Lerep saat melakukan wawancara.

“Saat menciptakan program-program pengelolaan sampah, kebijakan, pemerintah desa membentuk anggota

di setiap program-program pengelolaan sampah. Anggota tersebut kami ambil dari masyarakat agar yang harapannya dapat menyampaikan pesan dengan cara yang lebih akrab dan mudah dipahami. Setiap anggota dari program-program pengelolaan sampah, wajib ada anggota perempuan agar dapat memberikan edukasi kepada ibu-ibu tentang pemilahan sampah dan pengolahan limbah rumah tangga.” (Wawancara Bapak Sumariyadi, Kepala Desa, Pukul 17.00 WIB, Tanggal 15/12/202, Rumah Bapak Sumariyadi).

Kelompok-kelompok masyarakat yang terbentuk secara sukarela, seperti kelompok sukarela TPS3R bagian pemilahan, pembuatan pupuk kompos, kelompok pelatihan daur ulang sampah dan lain lain juga merupakan sumber kekuasaan informal yang berkontribusi besar dalam pengelolaan sampah. Kelompok-kelompok ini sering kali mengorganisir aksi kolektif warga tentang urgensi menjaga

kebersihan lingkungan. Melalui kegiatan-kegiatan ini, mereka tidak hanya mengedukasi masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di antara mereka.

Sumber kekuasaan informal lainnya adalah norma dan nilai yang berkembang di dalam. Di Desa Lerep terdapat budaya gotong royong, di mana masyarakat saling membantu dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam pengelolaan sampah. Budaya ini menciptakan tekanan sosial yang positif bagi individu untuk berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ketika seseorang melihat tetangganya aktif dalam kegiatan bersih-bersih atau pemilahan sampah, mereka cenderung merasa terdorong untuk ikut serta, sehingga menciptakan efek yang memperkuat partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, norma-norma sosial yang mengedepankan pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan juga berfungsi sebagai pendorong bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pengelolaan sampah.

Secara keseluruhan, sumber kekuasaan informal dalam tata kelola sampah di Desa Lerep sangat berperan dalam membangun

kesadaran dan partisipasi masyarakat. melalui pengaruh tokoh masyarakat, kelompok-kelompok sukarela, dan norma sosial, masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam pengelolaan sampah. Kekuatan sumber kekuasaan informal ini melengkapi kekuasaan formal yang ada, menciptakan sinergi yang kuat dalam upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

D. Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Lerep

Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Kepala Desa Lerep dalam pengelolaan sampah dapat dianalisis secara mendalam menggunakan teori kepemimpinan Ramlan Surbakti. Dalam konteks ini, Kepala Desa Lerep mengadopsi berbagai gaya kepemimpinan yang saling melengkapi, yang berkontribusi pada efektivitas pengelolaan sampah di Desa Lerep. Kepala Desa Lerep menggunakan gaya kepemimpinan aktif-posistif. Hal ini dapat dilihat bahwa kepala desa tidak hanya aktif dalam melaksanakan tugasnya, tetapi juga menilai tinggi pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat. Kepala Desa Lerep menunjukkan komitmen yang tinggi dengan terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan sampah, yaitu pelatihan pemilahan sampah, daur ulang, gotong royong, dan program-

program pengelolaan sampah. Sikap yang ditunjukkan oleh pemimpin ini menginspirasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan. Kepala Desa Lerep menjadi yang pertama turun tangan dalam memberikan contoh. Hal ini menunjukkan bahwa kepala desa tidak hanya memimpin dari belakang, tetapi juga bersedia bekerja sama bersama masyarakat. Selain itu, kepala desa memberikan penghargaan, maupun pengakuan langsung kepada individu atau kelompok yang berkontribusi signifikan. Sikap yang diterapkan Kepala Desa Lerep merupakan bagian dari gaya kepemimpinan aktif-positif, di mana kepala desa menilai tinggi pekerjaan. Kepala Desa Lerep juga melibatkan masyarakat secara aktif dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik, seperti melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan hingga pelaksanaan program-program pengelolaan sampah. Selain itu, Kepala Desa Lerep menggunakan gaya kepemimpinan wiraswasta. Gaya wiraswasta terlihat dari kemampuan kepala desa untuk menciptakan dan mengembangkan program-program inovatif yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah, seperti, program bank sampah dengan tiga layanan bank sampah, TPS3R,

dan pengangkutan sampah.

Kepala Desa Lerep juga menunjukkan gaya wiraswasta dengan mengembangkan program-program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola sampah. Pelatihan ini mencakup cara pemilahan sampah, daur ulang, dan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Dengan memberikan pelatihan ini, kepala desa tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi juga mendorong mereka untuk berinovasi dalam pengelolaan sampah di lingkungan mereka.

BAB V

DAMPAK KEPEMIMPINAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA LEREP

Dalam bab ini, akan dibahas dampak kepemimpinan Kepala Desa Lerep dalam pengelolaan sampah, yang mencakup dampak sosial, ekonomi, dan politik. Setiap dampak akan dianalisis dari perspektif positif dan negatif, serta tantangan yang dihadapi. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas kepemimpinan dalam konteks pengelolaan sampah di Desa Lerep.

A. Dampak Sosial

1. Peningkatan Kesadaran Lingkungan

Dampak sosial yang menonjol dari pengelolaan sampah di Desa Lerep adalah peningkatan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan dan edukasi yang diinisiasi oleh Pemerintah Desa Lerep, masyarakat mulai memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan dampak negatif dari pembuangan sampah sembarangan. Program-program pengelolaan

sampah, seperti bank sampah dengan layanan tabungan sampah, layanan BPJS Ketenagakerjaan, dan layanan daur ulang, TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle), serta pengangkutan sampah telah membuka mata masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

Kesadaran lingkungan yang meningkat ini tidak hanya terbatas pada pemahaman teoritis, tetapi juga tercermin dalam tindakan nyata. Masyarakat mulai memilah sampah di rumah tangga, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi, pelatihan, dan edukasi yang diberikan oleh Pemerintah Desa Lerep telah berhasil mengubah pola pikir masyarakat dari yang sebelumnya acuh terhadap lingkungan menjadi lebih peduli dan bertanggung jawab.

Peningkatan kesadaran lingkungan ini juga berdampak pada perubahan budaya masyarakat. Masyarakat Desa Lerep mulai mengadopsi kebiasaan baru yang lebih ramah lingkungan, seperti mengurangi penggunaan bahan-bahan yang sulit terurai dan memanfaatkan sampah untuk dijadikan barang yang memiliki nilai ekonomi. Perubahan budaya ini tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga menciptakan generasi yang lebih sadar akan pentingnya menjaga kelestarian alam.



Gambar 5. 1 Penerapan Mengurangi Sampah Plastik pada Kegiatan Pasar Desa Lerep
Sumber: TPS3R Sokaku Asri

2. Peningkatan Kesadaran Partisipasi

Pengelolaan sampah di Desa Lerep juga telah membawa perubahan perilaku di

kalangan masyarakat. kebiasaan buruk, seperti membuang sampah sembarangan, membakar sampah, membuang sampah ke suang dan saluran air mulai berkurang. Masyarakat mulai mengadopsi perilaku yang lebih ramah lingkungan, seperti memilah sampah, mendaur ulang, dan mengurangi penggunaan plastik.

Perubahan perilaku ini tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga pada kesehatan masyarakat. Dengan berkurangnya sampah yang dibuang sembarangan, risiko penyakit yang ditularkan melalui sampah, seperti diare, penyakit kulit, dan demam berdarah juga menurun. Selain itu, perubahan lingkungan ini juga menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan sehat untuk ditinggali. Partisipasi masyarakat Desa Lerep dalam pengelolaan sampah di Desa Lerep mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat dalam

mengikuti program-program pengelolaan sampah, seperti bank sampah, TPS3R, dan kegiatan daur ulang. Kepala Desa Lerep melalui gaya kepemimpinan yang demokratis, berhasil melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan sampah, mulai dari pengambilan keputusan hingga evaluasi.

Partisipasi aktif masyarakat ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program pengelolaan sampah, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan terhadap kebersihan lingkungan. Masyarakat merasa bahwa mereka adalah bagian dari solusi, bukan hanya penerima manfaat. Hal ini mendorong mereka untuk lebih bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi volume sampah yang dihasilkan.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga menciptakan solidaritas sosial yang lebih kuat. Kegiatan gotong royong dan kerja bakti yang diadakan di setiap dusun telah mempererat hubungan sosial antarwarga. Masyarakat

saling membantu dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga menciptakan suasana yang harmonis dan saling mendukung.

3. Peningkatan Kualitas Hidup

Pengelolaan sampah yang baik di Desa Lerep berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan berkurangnya volume sampah yang dibuang sembarangan, lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat. Hal ini mengurangi risiko penyebaran penyakit yang disebabkan oleh sampah, seperti diare, demam berdarah, dan penyakit kulit. Selain itu, udara yang lebih bersih dan bebas dari bau tidak sedap juga meningkatkan kenyamanan hidup masyarakat.

Peningkatan kualitas hidup ini juga terlihat dari segi ekonomi. Program-program pengelolaan sampah, seperti bank sampah dan TPS3R telah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Masyarakat dapat menabung sampah dan mendapatkan uang dari hasil

penjualan sampah yang mereka kumpulkan. Selain itu, layanan daur ulang juga memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat, seperti pembuatan kerajinan tangan dari sampah yang dapat dijual kepada wisatawan.

4. Peningkatan Solidaritas Sosial

Pengelolaan sampah di Desa Lerep meningkatkan solidaritas sosial di antara masyarakat. Kegiatan gotong royong dan kerja bakti yang diadakan telah mempererat hubungan sosial antarwarga. Masyarakat saling membantu dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga menciptakan suasana yang harmonis dan saling mendukung.

Solidaritas sosial juga terlihat dari partisipasi masyarakat dalam program-program pengelolaan sampah. Masyarakat tidak hanya berpartisipasi sebagai individu, tetapi juga sebagai kelompok, seperti kelompok dawai, dan karang taruna.

Kelompok-kelompok ini berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk berkolaborasi dalam kegiatan pengelolaan sampah, sehingga menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama.



Gambar 5. 2 Kegiatan Daur Ulang Sampah

Sumber: Dokumen Desa Lerep

B. Dampak Ekonomi

1. Dampak Positif

a. Penciptaan Nilai Ekonomi dari Sampah

Terciptanya nilai ekonomi dari sampah yang sebelumnya dianggap sebagai limbah. Melalui program bank sampah, sampah dikumpulkan oleh masyarakat dipilah dan diolah menjadi barang-barang yang memiliki nilai jual, seperti sampah palstik didaur ulang menjadi tas, tempat pensil, atau barang-barang kerajinan lainnya yang kemudian dijual kepada wisatawan atau masyarakat sekitar, mengingat Desa Lerep merupakan Desa Wisata dan pengelolaan sampah di Desa Lerep telah didaftarkan kepala desa ke dalam paket wisata. Hal ini tidak hanya mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, tetapi juga menciptakan sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat.

Program pengelolaan lain, seperti TPS3R juga berperan dalam menciptakan nilai ekonomi dari sampah organik. Sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan ranting diolah menjadi kompos yang

kemudian dijual kepada petani. Pupuk kompos ini tidak hanya bermanfaat bagi pertanian, tetapi menjadi sumber pendapatan bagi pengelola TPS3R. Dengan demikian, sampah yang sebelumnya dianggap sebagai masalah kini menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.



Gambar 5. 3 Hasil Kompos dari TPS3R

Sumber: Dokumen Desa Lerep

b.Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui Tabungan Sampah dan Daur Ulang

Program tabungan sampah yang dijalankan oleh bank sampah memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat. Masyarakat yang mengumpulkan dan menyetorkan sampah ke bank sampah mendapatkan imbalan berupa uang yang dapat ditabung. Tabungan ini dapat diambil setahun sekali, biasanya pada saat hari raya Idul Fitri,

sehingga memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga. Selain itu, program ini juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengelola sampah, karena mereka terlihat langsung manfaat ekonomi dari tindakan mereka.

Program tabungan sampah ini memiliki manfaat lain, di mana uang yang dihasilkan dari penjualan sampah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan uang tersebut dapat dialokasikan untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memberikan perlindungan sosial melalui jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.

Program daur ulang yang dilakukan oleh masyarakat tidak hanya mengurangi jumlah sampah, tetapi juga menciptakan produk baru dari daur ulang sampah, seperti tas, keranjang, bunga yang dapat dijual sehingga mendapat pendapatan masyarakat. Hasil dari daur ulang sampah dapat didaftarkan ke paket wisata Desa Lerep. Dampak ekonomi dari hal ini adalah

terbukanya peluang usaha baru bagi masyarakat, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru, terutama bagi ibu-ibu rumah tangga.

c. Peningkatan Daya Tarik Pariwisata melalui Lingkungan yang Bersih dan Asri

Desa Lerep yang bersih dan bebas dari sampah akan memiliki daya Tarik lebih besar bagi wisatawan, mengingat Desa Lerep adalah desa wisata. Lingkungan yang asri dan terawat dapat menjadi nilai tambah bagi sektor pariwisata, terutama jika desa tersebut memiliki potensi wisata alam atau budaya. Salah satunya adalah Desa Lerep di mana Desa Lerep memiliki banyak budaya seperti Tradisi Iriban, Tradisi Kadeso, Tradisi Nyadran, dan Tradisi Wayangan. Adapun wisata alamnya adalah, Curug Indrokilo, Pasar kuliner “Tempoe Doeloe” Puncak Bidadari dan Embung Siblago. Pengunjung akan merasa nyaman dan tertarik untuk berkunjung kembali atau merekomendasikan Desa Lerep kepada orang lain. Hal ini membuat Desa Lerep berhasil menjadi Desa Wisata hingga saat ini.



Gambar 5. 4 Kunjungan Ganjar Pranowo di Desa Wisata Lerep

Sumber: Dokumen Desa Lerep

Dampak ekonomi dari peningkatan pariwisata adalah meningkatnya pendapatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah. di mana Kepala Desa Lerep telah mendaftarkan kegiatan program-program pengelolaan sampah, seperti kegiatan daur ulang di mana hasil daur ulang di jual kepada para wisatawan, dan pelatihan pengelolaan sampah masuk ke dalam paket wisata.

d.Peningkatan Investasi dan Bantuan Eksternal

Desa Lerep yang berhasil dalam program-program pengelolaan sampah dan membawa banyak prestasi berhasil menarik minat lembaga pemerintah, sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lembaga

pers untuk berinvestasi dan memberikan dukungan kepada Desa Lerep. Para Stakeholders ini memberikan dukungan berupa pendanaan pengelolaan sampah, pelatihan, *workshop* dan promosi dari media. Dampak ekonomi dari hal ini adalah meningkatnya dana investasi ke desa yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

2. Dampak Negatif

a. Tumpang Tindih Kewenangan antara Program Pengelolaan Sampah

Tumpang tindih kewenangan antara program-program pengelolaan sampah dapat menghambat pendapatan ekonomi. Terjadinya tumpang tindih antara TPS3R dan bank sampah dalam pengelolaan sampah non-organik. Menurut TPS3R, dijelaskan bahwa TPS3R hanya berwenang mengolah sampah organik, sedangkan sampah non-organik menjadi tanggung jawab bank sampah. Akibatnya, dalam hal perputaran keuangan, bank sampah kehilangan sebagian

pendapatannya karena TPS3R ikut menjual sampah non-organik kepada pengepul dengan rata-rata Rp. 350.000 per bulan. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi antara bank sampah dan TPS3R. Bank sampah sebenarnya mengumpulkan sampah non-organik langsung dari masyarakat, namun tidak menerima kumpulan sampah non-organik dari TPS3R, sehingga pendapatan bank sampah berkurang. Tumpang tindih lainnya yang terjadi adalah antara BUMDes dengan TPS3R karena pada dasarnya pengelolaan sampah dikelola penuh oleh BUMDes, di mana TPS3R wajib membayar retribusi BUMDes sebesar Rp. 300.000 setiap bulannya, mengingat pengelolaan sampah dikelola penuh oleh BUMDes Gerbang Lentera.

b. Biaya Operasional yang Tinggi

Program pengelolaan sampah di Desa Lerep memberikan banyak manfaat ekonomi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa program ini juga memerlukan biaya operasional yang cukup tinggi. Biaya ini

mencakup pembelian alat dan mesin pengolahan sampah, pembayaran gaji petugas pengangkut sampah, serta biaya perawatan dan pemeliharaan fasilitas pengolahan sampah. Biaya operasional ini harus ditanggung oleh pemerintah desa dan masyarakat melalui iuran yang dibayarkan setiap bulan. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Susilo selaku bendahara BUMDes Gerbang Lentera

“Biaya pengelolaan sampah tinggi, apalagi mobil pengangkut sampah yang sering rusak, belum nanti servis mobil, bayar gaji petugas pengangkut sampah” (Wawancara Ibu Susilo selaku Bendahara BUMDes Gerbang Lentera, Pukul 20.00, Tanggal 17/12/2024, Rumah Ibu Susilo)

Bagi sebagian masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, iuran ini dapat menjadi beban finansial yang cukup berat. Meskipun iuran tersebut relatif kecil, yaitu sebesar Rp. 15.000 per bulan, namun bagi keluarga dengan pendapatan terbatas, biaya ini dapat mengurangi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok

lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Lerep perlu mempertimbangkan kebijakan subsidi atau bantuan finansial bagi masyarakat yang kurang mampu agar mereka tetap dapat berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah tanpa terbebani secara ekonomi.

c. Ketidakmerataan Distribusi Manfaat Ekonomi

Program pengelolaan sampah di Desa Lerep memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, distribusi manfaat tersebut tidak selalu merata. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, seperti Dusun Indrokilo tidak memiliki akses ke bank sampah atau TPS3R juga mengalami kesulitan untuk memanfaatkan program-program tersebut karena hanya terdapat satu bank sampah dan TPS3R, di mana letak nya terdapat di Dusun Soka. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Lerep perlu memastikan bahwa program pengelolaan sampah dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa fasilitas

pengolahan sampah tersedia di seluruh wilayah desa.

C. Dampak Politik

1. Dampak positif

a. Peningkatan Legitimasi Pemerintah Desa Lerep

Kepemimpinan yang efektif dalam pengelolaan sampah di Desa Lerep telah meningkatkan legitimasi pemerintah desa di mata masyarakat. Legitimasi ini muncul karena pemerintah desa, khususnya Kepala Desa Lerep, Bapak Sumariyadi, berhasil menciptakan program- program yang tidak hanya efektif dalam mengatasi masalah sampah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti peningkatan kualitas lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui program bank sampah dan TPS3R.

Legitimasi ini diperkuat dengan oleh transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah Desa Lerep melibatkan masyarakat secara aktif dalam musyawarah dan diskusi terkait pengelolaan sampah, sehingga masyarakat merasa bahwa suara mereka didengar dan

dihargai. Hal ini menciptakan kepercayaan yang lebih besar terhadap Pemerintah Desa Lerep, yang pada gilirannya meningkatkan legitimasi politik mereka. Selain itu, keberhasilan program-program pengelolaan sampah, seperti meraih juara 3 program kampung iklim tingkat nasional, juara 1 lingkungan bersih dan sehat tingkat Kabupaten Semarang, dan juara 1 desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan tahun 2018 menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Desa Lerep mampu mengelola sumber daya dengan baik dan mencapai hasil yang konkret. Prestasi ini tidak hanya meningkatkan citra pemerintah desa di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat nasional

b. Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat

Pengelolaan sampah di Desa Lerep telah mendorong partisipasi politik masyarakat dalam proses pengambilan keputusan hingga pelaksanaan program-program pengelolaan sampah. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada kegiatan fisik, seperti gotong royong membersihkan

lingkungan, tetapi juga mencakup partisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui musyawarah dan forum-forum diskusi yang diadakan oleh Pemerintah Desa lerep.

Partisipasi politik masyarakat ini merupakan indikator penting dari demokratisasi di tingkat desa. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah desa menciptakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program-program yang dijalankan, tetapi juga memperkuat demokrasi partisipatif di tingkat lokal.

Partisipasi politik masyarakat juga tercermin dalam keterlibatan mereka dalam program-program pengelolaan sampah, seperti menjadi anggota bank sampah dan TPS3R, serta menjadi sukarelawan dalam kegiatan program-program pengelolaan sampah. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga menjadi subjek

aktif dalam proses pembangunan Desa Lerep.

c. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Isu Lingkungan

Pengelolaan sampah di Desa Lerep telah meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola isu-isu lingkungan. Kapasitas ini tercermin dalam kemampuan pemerintah desa untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Pemerintah Desa Lerep tidak hanya mengandalkan sumber daya internal, tetapi juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Kementerian PUPR, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Semarang, sektor swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Peningkatan kapasitas ini juga terlihat dari kemampuan pemerintah desa dalam mengelola anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM). Pemerintah Desa Lerep berhasil mengalokasikan dana dari

berbagai APBN, APBD, dan iuran masyarakat untuk mendukung program-program pengelolaan sampah. Selain itu, Pemerintah Desa Lerep juga membentuk tim atau kelompok kerja yang terdiri dari masyarakat dan perangkat desa untuk melaksanakan program-program pengelolaan sampah. Kapasitas Pemerintah Desa Lerep dalam mengelola sampah tidak hanya bermanfaat bagi pengelolaan sampah, tetapi juga dapat diterapkan dalam mengatasi isu-isu lingkungan lainnya, seperti pengelolaan air, pencegahan banjir, dan mitigasi perubahan iklim. Dengan demikian, pengelolaan sampah di Desa Lerep telah menjadi model bagi pengembangan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola isu-isu lingkungan secara lebih luas.

d. Peningkatan Hubungan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Tingkat Atas

Keberhasilan pengelolaan sampah di Desa Lerep juga berdampak pada peningkatan hubungan antara pemerintah desa dengan pemerintah tingkat atas,

seperti pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Pemerintah Desa Lerep berhasil mengelola sampah dengan baik dan meraih prestasi, mendapatkan pengakuan dan dukungan dari pemerintah tingkat atas. Dukungan yang diberikan Pemerintah Desa Lerep dalam bentuk bantuan teknik, pendanaan, dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tingkat atas untuk mendukung program-program pengelolaan sampah di Desa lerep.

Keberhasilan program-program pengelolaan sampah juga membuka peluang bagi Pemerintah Desa Lerep untuk terlibat dalam program-program nasional atau regional yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Hubungan yang baik antara Pemerintah Desa Lerep dengan pemerintah tingkat atas ini tidak hanya bermanfaat bagi pengelolaan sampah, tetapi juga dapat memperkuat posisi politik pemerintah desa dalam mengadvokasi kepentingan masyarakat di tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, pengelolaan sampah di Desa Lerep telah menjadi sarana untuk memperkuat jaringan

politik dan kerja sama antara pemerintah desa dengan pemerintah tingkat atas

e. Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat tentang Isu Lingkungan

Pengelolaan sampah di Desa Lerep telah meningkatkan kesadaran politik masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah. Melalui program-program pengelolaan sampah, masyarakat tidak hanya belajar tentang cara mengelola sampah, tetapi juga memahami bahwa isu lingkungan merupakan bagian penting dari pembangunan desa. Kesadaran politik ini tercermin dalam partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan, seperti gotong royong, pelatihan daur ulang, dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, masyarakat juga mulai memahami bahwa kebijakan lingkungan yang baik dapat memberikan dampak positif bagi kualitas hidup mereka.

Kesadaran politik masyarakat tentang isu lingkungan ini juga dapat menjadi dasar bagi munculnya Gerakan-

gerakan lingkungan di tingkat desa. Masyarakat yang sadar akan pentingnya lingkungan dapat menjadi agen perubahan yang mendorong pemerintah desa untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih pro-lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan sampah di Desa Lerep tidak hanya memberikan dampak langsung terhadap lingkungan, tetapi juga menciptakan kesadaran politik yang lebih luas di kalangan masyarakat.

2. Dampak Negatif

a. Tumpang Tindih Kewenangan

Program-program pengelolaan sampah yang ada di Desa Lerep tidak hanya membawa dampak positif meskipun prestasi yang didapatkan banyak. Terdapat dampak negative yang ditemukan yaitu, terdapat tumpang tindih kewenangan antara TPS3R dengan BUMDes dalam pengambilan sampah, di mana BUMDes mengambil sampah dalam tujuh dusun, sedangkan TPS3R hanya mengambil sampah Dusun Soka karena letak TPS3R di Dusun Soka. Hal ini akan menjadi tumpang tindih dalam kewenangan pengambilan

sampah dan ketidakjelasan kebijakan. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan masyarakat merasa bingung terkait siapa yang berwenang dalam pengambilan sampah. hal ini dijelaskan oleh Ketua Proklim, Bapak Sudiro

“Seharusnya pemerintah desa menjadikan satu kebijakan, yaitu pengambilan sampah cukup dikelola oleh satu bidang saja, karena saya masih menemukan kebingungan masyarakat terkait kebijakan pengambilan sampah.” (Wawancara : Bapak Sudiro, Ketua Proklim, Pukul 20.00 WIB, Tanggal 17/12/2024 Di Rumah Bapak Sudiro).

Tumpang tindih dalam pengambilan sampah dapat menyebabkan kebingungan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pengambilan sampah. Krisis koordinasi ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Tumpang tindih kewenangan ini dapat menciptakan persaingan antara TPS3R dan BUMDes, di mana masing-masing entitas berusaha

untuk menunjukkan bahwa mereka lebih efektif dalam pengambilan sampah. persaingan ini dapat mengarah pada konflik kepentingan dan mengurangi kolaborasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini membawa dampak politik yaitu persaingan ini dapat menciptakan ketegangan di dalam komunitas antara pemimpin desa. Jika tidak ada strategi, hal ini dapat menyebabkan perpecahan di antara warga desa, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas politik

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan mengenai kepemimpinan dalam pengelolaan sampah di Desa Lerep, Kepala Desa Lerep menerapkan gaya kepemimpinan yang efektif, termasuk gaya kepemimpinan aktif - positif, dan gaya kepemimpinan wiraswasta. Gaya kepemimpinan ini telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kepala desa melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pengelolaan sampah. Selain itu, keterlibatan langsung kepala desa dalam berbagai kegiatan, seperti gotong royong dan sosialisasi, menunjukkan komitmennya terhadap kebersihan desa dan menginspirasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif.

Program-program inovatif yang diinisiasi, seperti bank sampah yang didalamnya terdapat layanan tabungan sampah, layanan BPJS Ketenagakerjaan, dan layanan daur ulang, TPS3R, serta pengangkutan sampah oleh BUMDes

Gerbang Lentera juga berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dengan cara mendaur ulang, dan memilah. Secara keseluruhan, kepemimpinan yang efektif di Desa Lerep tidak hanya berhasil mengatasi masalah sampah, tetapi juga membangun budaya partisipatif yang kuat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Program-program pengelolaan sampah membawa Desa Lerep meraih banyak prestasi, seperti Desa Lerep berhasil menjadi kampung iklim dan meraih juara 3 tingkat nasional, juara 1 tingkat Kabupaten Semarang lingkungan bersih, dan juara 1 desa sadar jaminan ketenagakerjaan.

Kepemimpinan Kepala Desa Lerep membawa beberapa dampak, yaitu dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak politik. Dampak dari kepemimpinan pemerintah Desa Lerep, seperti peningkatan kesadaran lingkungan, peningkatan kesadaran partisipasi, peningkatan kualitas hidup, peningkatan solidaritas sosial, penciptaan nilai ekonomi dari sampah, peningkatan pendapatan masyarakat melalui tabungan sampah dan daur ulang, peningkatan daya tarik pariwisata melalui lingkungan yang bersih dan asri, peningkatan investasi dan

bantuan eksternal, peningkatan legitimasi Pemerintah Desa Lerep, penguatan partisipasi politik masyarakat, peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola isu lingkungan, peningkatan hubungan antara pemerintah desa dengan pemerintah atas, dan peningkatan kesadaran politik masyarakat tentang isu lingkungan. Namun kepemimpinan Kepala Desa Lerep tidak hanya membawa dampak positif, terdapat dampak negatif yang ditimbulkan, yaitu tumpang tindih kewenangan antara program pengelolaan sampah, biaya operasional yang tinggi, ketidakmerataan distribusi manfaat ekonomi, dan terganggunya stabilitas politik.

Dengan demikian, kepemimpinan yang diterapkan oleh Kepala Desa Lerep telah menciptakan peningkatan partisipasi masyarakat serta memberikan banyak prestasi, namun ada tantangan yang dihadapi Kepala Desa Lerep. Apabila tantangan dalam pengelolaan sampah tidak teratasi dengan baik, maka akan menimbulkan dampak negatif yang lebih signifikan dan berpengaruh pada lingkungan Desa Lerep.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, beberapa saran dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya :

1. Penelitian selanjutnya dapat melakukan studi perbandingan antara pengelolaan sampah di Desa Lerep dengan desa-desa lain yang memiliki karakteristik serupa. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah.
2. Penelitian lebih lanjut dapat fokus pada analisis dampak panjang dari program pengelolaan sampah yang telah diterapkan serta peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih dalam tentang peran dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, LSM, pemerintah, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. analisis ini dapat memahami dinamika kolaborasi dan kontribusi masing-masing pihak.
3. Penelitian selanjutnya dapat menganalisis kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan sampah di tingkat desa. Ini termasuk evaluasi terhadap efektivitas peraturan yang ada dan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang lebih mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusnai, A., Ilhamsyah, F., & Syahroni, F. (2024). Analisis Tata Kelola Sampah di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Administration, Governance, and Political Issues*, 1(1), 47–58. <https://doi.org/10.47134/jagpi.v1i1.2505>
- Aniq. (2019). Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Sampah di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. *Universitas Negeri Semarang*, 73.
- Atmanti, H. D., & Kadang, J. (2022). WASTE MANAGEMENT DURING A PANDEMIC (CASE STUDY: STUDENT OF ECONOMICS AND BUSINESS FACULTY DIPONEGORO UNIVERSITY AND TADULAKO UNIVERSITY). *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*, 6(2), 930–936.
- GINGTING, M. F. (2024). *PERANAN KEPEMIMPINAN LURAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN KAMPUNG BARU KECAMATAN MEDAN MAIMUN KOTA MEDAN*.
- Handana, D., Anggraini, D., & Rahmadi, D. (2022). Tata Kelola Pengelolaan Sampah Berbasis Bank Sampah di Kota Padang Bank-Based Waste Management Governance in Padang City Waste Bank-Based Waste

Management in Padang City. *Jurnal Suara Politik*, 1(2), 22–27.

Has, I. (2021). *TATA KELOLA SAMPAH OLEH PEMERINTAHAN DAERAH*

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (Studi Di Pasar Tradisional Kelurahan Enok) SKRIPSI.

Hornby, A. S. (1990). *Oxford Edvanded Dictionary of English*. Oxford University Press.

Ismiarta, G. R., Santoso, R. S., & Hanani, R. (2021). Analisis Stakeholders dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Program Kampung Iklim (Proklam) sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Dusun Soka. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 12(4), 1–18.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/30591/25219>

Kappy, T. M., Maimina, S., Latue, P. C., & Rakuasa, H. (2023). The Role of Beta Bank Sampah Community in Plastic Waste Management in Hative Besar Village, Ambon City. *Sinergi International Journal of Economics*, 1(2), 86–99.
<https://doi.org/10.61194/economics.v1i2.69>

Kharisma, I. (2024). *IMPLEMENTASI KONSEP SMART VILLAGE DI DESA LEREP, KECAMATAN*

UNGARAN BARAT, KABUPATEN SEMARANG.

Manik, K. E. S. (2007). *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Djambatan.

Marlina, A. (2020). Tata Kelola Sampah Rumah Tangga melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 11(2), 125–144.
<https://doi.org/10.37640/jip.v11i2.127>

Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Mulyasa. E. (2004). *Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep, Strategi dan Implementasi*. PT. Remaja Rosdakarya.

Nanda, M., Utami, F. S., & Elpina, E. (2022). Tata Kelola Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir (Tpa) Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar. *Warta Dharmawangsa*, 16(4), 708–724.
<https://doi.org/10.46576/wdw.v16i4.2426>

Nawawi, I. (2015). *Budaya Organisasi, Kepemimpinan & Kinerja*. Kencana Prenada Media Group.

Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Rineka Cip).

Nurikah, Jajuli, H. E. R., & Furqon, E. (2022). Waste Management Governance Based On Law Number 18 Of 2008 Of Waste Management Of Waste Based Citizen Participation In The Serang City. *Gorontalo Law Review*, 5(2), 434– 442.

Nurkholis. (2003). *Manajemen Berbasis Sekolah; Teori, Model, dan Aplikasi*.

Grasindo.

Nurrahman, A., Gatningsih, & Syaputra, M. T. (2021). *KEPEMIMPINAN LURAH DALAM PENGELOLAAN BANK SAMPAH DI KELURAHAN RAYA KECAMATAN SINGKEP BARAT KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU*. 3(1), 13–27.

Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). PARTISIPASI MASYARAKAT DESA LEREP DALAM PROGRAM DESA ANTI POLITIK UANG (DAPU) (Studi Kasus: Pilkada 2020 di Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang). *Journal GEEJ*, 7(2).

Prakasdi, R. G., Septiawan, C., & Ardiansyah, A. (2024). *Tata Kelola Pengelolaan Sampah Berbasis Bank*

Sampah. *Journal of Public Health Education*, 3(4), 132–144. <https://doi.org/10.53801/jphe.v3i4.215>

Pratama, M. R., & Fitriyah. (2021). Kepemimpinan Tri Rismaharini dalam Mengatasi Pengelolaan Sampah di Kota Surabaya. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 181–189. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.608>

Rahmadani, H. N. (2020). *TATA KELOLA PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU* SKRIPSI. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)

Rambey, R. R. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru*. 1–88.

Sanapian, F. (1999). *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Aplikasi*. IKIP.

Surbakti, R. (1992). MEMAHAMI ILMU POLITIK. In *Penerbit PT Grasindo*.

Surbakti, R. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. PT Grasindo.

Surbakti, R. (2012). *Teori dan Analisis Politik*. Universitas Brawijaya Press.

- Surbakti, R. (2010). *Sistem Politik Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Sutikno. (2014). *Pemimpin dan Kepemimpin: Tips Praktis untuk Menjadi Pemimpin yang diidolakan*. Holistica Lombok.
- Suwerda, B. (2012). *Bank sampah (Kajian teori dan penerapan)*. Pustaka Rihama.
- Theresia, L. (2021). Tata Kelola Sampah dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Palangka Law Review*, 1(1),56–69. <https://doi.org/10.52850/palarev.v1i1.2554>
- Thoha, M. (n.d.). *Pembinaan Organisasi, Proses Dianosa dan Intervensi, Manajemen Kepemimpinan*. Gava Media.
- Umiarso, B. dan. (2012). *Kepemimpinan Pendidikan Islam; Antara Teori dan Praktek*. Ar Ruzz Media.
- Victoruddien, V. (2022). Bottom-Up Leadership: Peran Kepemimpinan Camat Sindang dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengelolaan Sampah. *Panengen: Journal of Indigenous...*,1(1),87–99. <https://jurnal.panengen.com/index.php/ijop/article/view/56%0Ahttps://jurnal.panengen.com/index.php/ijop/article/download/56/63>

Wardani, S. (2023). *TATA KELOLA RETRIBUSI PERSAMPAHAN DI GAMPONG RUKOH KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH.*

Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 73–85.
<https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.328>

Widoyoko, S. E. P. (2014). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Pustaka

Wulung, R., & Syarif, A. L. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Budidaya Maggot Oleh Tps3R (Tempat Pengolahan Sampah Reuse Reduce Recycle) Sokaku Asri Di Dusun Soka Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.*

Yukl, G. A. (1997). *Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Prenhallindo. Yukl, G. A. (2009). *Kepemimpinan dalam Organisasi*. PT Indeks.

Yukl, G. A. (2013). *Leadership in Organization*. Pearson Education.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi

1. Kepala Desa Lerep

Yth. Bapak Sumariyadi, ST.



2. Kadus Soka

Yth. Bapak Miftachul Arifin



3. Kadus Lerep

Yth. Bapak Suroji



4. Kadus Tegalrejo

Yth. Bapak Slamet Riyadi



5. Kadus Karangbolo

Yth. Bapak Mitwa Amir



6. Kadus Indrokilo

Yth. Bapak Junari



7. Kadus Kretek

Yth. Bapak Hadi Santoso



8. Kadus Mapagan

Yth. Bapak A Fathoni Purwanto



9. Ketua Proklam

Yth. Bapak Sudiro, S.Pd.



10. Direktur Bank Sampah

Yth. Bapak Richard



11. Ketua TPS3R

Yth. Bapak Sri Haryanto

**12. Bendahara BUMDes Gerbang Lentera**

Yth. Ibu Susilo



13. Unit Pengelolaan Sampah

Yth. Bapak Suryadi



14. Anggota Dawis

Yth. Ibu Suwarni



15. Masyarakat Desa Lerep

a. Ibu Yanti



b. Ibu Lia



c. Ibu Wiwik



Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Sejauh mana pemerintah Desa Lerep menjalankan kepemimpinan sesuai dengan definisi konsep tersebut.
 - a. Apa latar belakang dalam meluncurkan program-program pengelolaan sampah di Desa Lerep **(Kepala desa)**
 - b. Bagaimana mendefinisikan kepemimpinan dalam konteks pengelolaan sampah **(Kepala desa)**
 - c. Bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan pemerintah desa Lerep dalam pengelolaan sampah **(Kepala desa, Kadus, Unit pengelolaan sampah)**
 - d. Apa saja inovasi atau program yang telah diterapkan pemerintah Desa Lerep dalam pengelolaan sampah **(Kepala desa, Kadus, Ketua proklim, Ketua TPS3R, Direktur bank sampah)**

- e. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah, dan bagaimana berkontribusi terhadap kebijakan yang ada **(Kepala desa, Kadus, Unit pengelolaan sampah)**
- f. Apakah pemimpin desa terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan sampah **(Kadus, Unit pengelolaan sampah, Ketua proklamasi, Ketua TPS3R, Direktur bank sampah, Masyarakat)**
- g. Bagaimana pemimpin desa memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah **(Kadus, Unit pengelolaan sampah, Ketua proklamasi, Ketua TPS3R, Direktur bank sampah)**
- h. Bagaimana komunikasi antara pemimpin desa masyarakat terkait pengelolaan sampah **(Kepala desa, Kadus)**
- i. Apa tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan dan program pengelolaan sampah, bagaimana cara

mengatasinya **(Kepala Desa, Kadus, Ketua proklim, Ketua TPS3R, Direktur bank sampah)**

- j. Bagaimana cara pemerintah desa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik **(Kepala Desa, Kadus, Unit Pengelolaan Sampah, Ketua proklim, Ketua TPS3R, Direktur bank sampah)**
- k. Bagaimana pengelolaan dana untuk program pengelolaan sampah dilakukan dan sejauh mana pemimpin desa terlibat dalam pengambilan keputusan terkait anggaran **(Bendahara BUMDes Gerbang Lentera, Kepala Desa)**
- l. Bagaimana agar kebijakan pengelolaan sampah dapat terus berjalan lancar **(Unit pengelolaan sampah, Kepala desa, Ketua TPS3R, Direktuk bank sampah)**
- m. Bagaimana peran kadus dalam menyampaikan informasi dan kebijakan pengelolaan sampah kepada masyarakat di

setiap dusun (**Kadus**)

- n. Bagaimana pemimpin desa mendukung inisiatif bank sampah, dan bagaimana pemimpin desa berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat (**Direktur bank sampah, Kepala desa**)
- o. Apa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan TPS3R dan bagaimana pemimpin desa membantu mengatasi tantangan tersebut (**Ketua TPS3R, Kepala desa**)
- p. Bagaimana program kampung iklim berkontribusi pada pengelolaan sampah, dan peran pemimpin desa dalam mendukung program ini (**Ketua proklm**)
- q. Bagaimana peran kelompok sadar wisata dalam mendukung pengelolaan sampah di desa, dan bagaimana pemimpin desa berkolaborasi dengan kelompok ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (**Kepala desa, Pokdarwis**)

- r. Bagaimana pemerintah desa mengevaluasi program pengelolaan sampah yang telah dilaksanakan (**Kepala desa, Unit pengelolaan sampah, Kadus, Ketua TPS3R, Ketua Proklim, Direktur bank sampah**)
 - s. Bagaimana keterlibatan pemimpin desa dalam mendukung program- program pengelolaan sampah (**Kepala desa, Kadus**)
 - t. Apa dampak yang dihasilkan program-program pengelolaan sampah (**Kepala desa, Unit pengelolaan sampah, Kadus, Ketua TPS3R, Ketua Proklim, Direktur bank sampah, Masyarakat**)
2. Sejauh mana pemerintah desa Lerep melaksanakan kepemimpinan sesuai dengan kategorisasi kepemimpinan (proses kepemimpinan dan karakter kepemimpinan, hasil proses kepemimpinan serta sumber kekuasaan)
- a. Proses kepemimpinan dan karakter kepemimpinan

- 1) Apa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah desa untuk merencanakan agar pengelolaan sampah menjadi baik **(Kepala desa, Kadus, Unit pengelolaan sampah)**
- 2) Bagaimana pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sampah **(Kepala desa, Kadus, Unit pengelolaan sampah)**
- 3) Apa strategi yang digunakan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah **(Kepala desa, Kadus, Unit pengelolaan sampah)**
- 4) Bagaimana pemimpin desa menilai efektivitas program pengelolaan sampah yang telah dilaksanakan **(Kepala desa, Kadus, Unit pengelolaan sampah)**
- 5) Bagaimana pemimpin desa berkolaborasi dengan berbagai pihak

(seperti BUMDes, unit pengelolaan sampah, dan kelompok masyarakat) dalam pengelolaan sampah (**Kepala desa, Unit pengelolaan sampah, Pokdarwis, Ketua proklim, Ketua TPS3R, Direktur bank sampah**)

- 6) Bagaimana pemimpin desa menunjukkan keteladanan dalam pengelolaan sampah (**Kepala desa, Kadus, BUMDes unit pengelolaan sampah**)
- 7) Bagaimana pemimpin desa berperan dalam menciptakan pengelolaan sampah yang lebih baik (**Kepala desa, Kadus, BUMDes unit pengelolaan sampah**)
- 8) Apa pendekatan yang digunakan untuk memotivasi masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah (**Kepala desa, Kadus**)

b. Hasil Proses Kepemimpinan

- 1) Apa hasil yang dicapai Desa Lerep

dalam pengelolaan sampah **(Kepala Desa, Kadus, Ketua TPS3R, Ketua Proklam, Direktur Bank Sampah)**

- 2) Bagaimana mengukur keberhasilan program pengelolaan sampah yang telah dilaksanakan dan indikator apa yang digunakan **(Kepala Desa, Kadus, Ketua TPS3R, Ketua Proklam, Direktur Bank Sampah)**
- 3) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah, dan bagaimana hal ini mencerminkan hasil dari proses kepemimpinan **(Kepala Desa, Kadus, Ketua TPS3R, Ketua Proklam, Direktur Bank Sampah)**
- 4) Apa dampak dari program pengelolaan sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat di Desa Lerep **(Kepala Desa, Kadus, Masyarakat)**
- 5) Bagaimana perubahan perilaku masyarakat terkait pengelolaan

sampah setelah adanya program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa **(Kepala desa, Kadus, BUMDes Unit Pengelolaan sampah)**

6) Bagaimana kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat berkontribusi terhadap hasil yang dicapai dalam pengelolaan sampah **(Kepala desa, Kadus, Masyarakat)**

7) Apa umpan balik yang diterima dari masyarakat mengenai program pengelolaan sampah dan bagaimana umpan balik tersebut mempengaruhi kebijakan yang diambil **(Kepala desa, Kadus, Ketua TPS3R, Ketua Proklim, Direktur Bank Sampah)**

3. Sumber Kekuasaan

a. Bagaimana pemimpin desa memanfaatkan kekuasaan formal untuk mempengaruhi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Lerep **(Kepala desa, Kadus, BUMDes unit pengelolaan sampah)**

- b. Apa peran jaringan atau hubungan pemimpin desa dengan pihak lain dalam memperkuat sumber kekuasaan **(Kepala desa, Organisasi masyarakat)**
- c. Bagaimana pemimpin desa menggunakan kekuasaan informal untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah **(Kepala desa, BUMDes unit pengelolaan sampah, Kadus)**
- d. Bagaimana melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sampah dan bagaimana hal ini mempengaruhi sumber kekuasaan **(Kepala desa, BUMDes unit pengelolaan sampah, Kadus)**
- e. bagaimana pemimpin desa menilai dampak dari sumber kekuasaan yang dimiliki terhadap keberhasilan program pengelolaan sampah **(Kepala desa, BUMDes unit pengelolaan sampah, Kadus)**

Lampiran 3 Peraturan Desa Lerep



**KEPALA DESA LEREP KECAMATAN UNGARAN
BARAT KABUPATEN SEMARANG**

**PERATURAN DESA LEREP KECAMATAN
UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG**

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA

DESA LEREP,

- Menimbang : a. bahwa Lingkungan Hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana di amanatkan dalam pasal 28 Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah desa dan masyarakat, karena itu perlu dilakukan upaya-upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup di Desa Lerep perlu disusun Peraturan Desa Lerep tentang Pelestarian Lingkungan Hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu ditetapkan Peraturan Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas–batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

CURICULUM VITAE



Nama : Amanda Rizki Kurniasari
TTL : KAB. Semarang, 27 Oktober 2002
Alamat : Dusun Soka, RT/RW 04/04, Kelurahan
Lerep, Kecamatan Ungaran Barat
NIM : 2106016122
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
IPK : 3,75
Agama : Islam
Email : amandarizkiks@gmail.com
HP : 085875049064

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Lerep 02
2. SMP Negeri 03 Ungaran
3. SMK Negeri 11 Semarang
4. S1 Ilmu Politik Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang

RIWAYAT ORGANISASI

1. Anggota Divisi Mangkang Ceria- HMJ Ilmu
Politik 2022